



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 Kabupaten Bandung Telp (022) 5893002
Email : disnaker@bandungkab.go.id Website : disnaker.bandungkab.go.id

RENCANA TENAGA KERJA KABUPATEN BANDUNG 2024-2030



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Dasar Hukum	1-3
1.3. Tujuan	1-4
1.4. Metodologi.....	1-5
1.5. Sumber Data.....	1-7
1.6. Pengertian.....	1-7
1.7. Sistematika	1-8
 BAB II KONDISI KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG	 2-1
2.1. Kondisi Ekonomi.....	2-1
2.2. Potensi Daerah.....	2-10
2.3. Penduduk Usia Kerja	2-51
2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	2-56
2.5. Angkatan Kerja	2-63
2.6. Penduduk yang Bekerja	2-68
2.7. Penganggur Terbuka	2-78
2.8. Produktivitas Tenaga Kerja.....	2-84
2.9. Pelatihan Tenaga Kerja.....	2-85
2.10. Penempatan Tenaga Kerja	2-86
2.11. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2-88
 BAB III PERKIRAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA	 3-1
3.1. Perkiraan Penduduk Usia Kerja	3-1
3.2. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..	3-7
3.3. Perkiraan Angkatan Kerja	3-12
 BAB IV PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA.....	 4-1
4.1. Perkiraan Perekonomian	4-1
4.2. Perkiraan Kesempatan Kerja	4-6
4.3. Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja.....	4-17
4.4. Perkiraan Pelatihan Tenaga Kerja.....	4-19
 BAB V PERKIRAAN KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA .	 5-1
5.1. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut	

5.2.	Golongan Umur.....	5-1
5.2.	Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan	5-6
5.3.	Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin	5-8
BAB VI KEBIJAKAN DAN PROGRAM		6-1
6.1.	Kebijakan Umum	6-1
6.2.	Kebijakan Pengendalian Angkatan Kerja	6-14
6.3.	Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan	6-18
6.4.	Kebijakan Sektoral	6-23
6.5.	Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja	6-47
6.6.	Kebijakan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	6-51
BAB VII PENUTUP		7-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung (persen) 2019-2023	2-3
Tabel 2.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung, 2019-2023	2-4
Tabel 2.3 Luas Wilayah Kabupaten Bandung Per Kecamatan Tahun 2022	2-5
Tabel 2.4 Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Bandung Per Kecamatan Tahun 2023	2-11
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung, 2019-2023	2-13
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bandung, 2019-2023	2-13
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung, 2019-2023	2-15
Tabel 2.8 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Sederajat Kabupaten Bandung Tahun 2022/2023 dan 2023/2024	2-17
Tabel 2.9 Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Tahun 2019	2-18
Tabel 2.10 Proyeksi Kebutuhan Air dan Tingkat Ketersediaan Air	2-24
Tabel 2.11 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Tahun 2020	2-25
Tabel 2.12 Luas Panen Padi dan Produksi Gabah (Kg) Tahun 2022	2-27
Tabel 2.13 Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (P1) ..	2-31
Tabel 2-14 Lahan Sawah Kabupaten Bandung	2-34
Tabel 2-15 Lahan Kering Kabupaten Bandung	2-34
Tabel 2.16 Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022	2-45
Tabel 2.17 Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung Tahun 2022	2-46
Tabel 2.18 Realisasi Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023	2-49
Tabel 2.19 Sektor Usaha Dengan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Kabupaten Bandung Tahun	

	2023	2-50
Tabel 2.20	Realisasi Investasi Menurut Jumlah Proyek dan Kebutuhan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-51
Tabel 2.21	Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-52
Tabel 2.22	Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-54
Tabel 2.23	Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-55
Tabel 2.24	Penduduk Usia Kerja Menurut Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-56
Tabel 2.25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (persen)	2-57
Tabel 2.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (persen)	2-59
Tabel 2.27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (persen)	2-60
Tabel 2.28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (persen)	2-62
Tabel 2.29	Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-64
Tabel 2.30	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-66
Tabel 2.31	Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-67
Tabel 2.32	Angkatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-67
Tabel 2.33	Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-70
Tabel 2.34	Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-71

Tabel 2.35	Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-73
Tabel 2.36	Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-74
Tabel 2.37	Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-75
Tabel 2.38	Penduduk yang Bekerja Menurut Jabatan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-76
Tabel 2.39	Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-77
Tabel 2.40	Penduduk yang Bekerja Menurut Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-78
Tabel 2.41	Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-79
Tabel 2.42	Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (persen)	2-80
Tabel 2.43	Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-81
Tabel 2.44	Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Persen)	2-81
Tabel 2.45	Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-82
Tabel 2.46	Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (persen)	2-83
Tabel 2.47	Penganggur Terbuka Menurut Perkotaan/Perdesaan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-83
Tabel 2.48	Penganggur Terbuka Menurut Perkotaan/Perdesaan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)	2-84
Tabel 2.49	Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Juta Rp/Tenaga Kerja)	2-85

Tabel 2.50	Jumlah Instruktur, Jumlah Yang Dilatih dan Lulusan Pelatihan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-86
Tabel 2.51	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-87
Tabel 2.52	Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-88
Tabel 2.53	Upah Minimum Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023	2-90
Tabel 3.1	Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	3-3
Tabel 3.2	Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	3-4
Tabel 3.3	Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	3-5
Tabel 3.4	Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	3-6
Tabel 3.5	Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (%)	3-9
Tabel 3.6	Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (%)	3-10
Tabel 3.7	Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (%)	3-11
Tabel 3.8	Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (%)	3-12
Tabel 3.9	Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	3-13
Tabel 3.10	Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	3-14
Tabel 3.11	Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	3-6
Tabel 3.12	Perkiraan Angkatan Kerja Menurut	

	Perkotaan/Perdesaan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	3-16
Tabel 4.1	Perkiraan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional BRutor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (%)	4-3
Tabel 4.2	Perkiraan Struktur Produk Domestik Regional BRutor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (%)	4-5
Tabel 4.3	Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	4-7
Tabel 4.4	Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	4-9
Tabel 4.5	Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	4-10
Tabel 4.6	Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	4-12
Tabel 4.7	Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	4-13
Tabel 4.8	Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang) .	4-15
Tabel 4.9	Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang) .	4-16
Tabel 4.10	Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	4-17
Tabel 4.4	Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030	4-18
Tabel 4.4	Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Staus Pekerjaan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	4-20
Tabel 5.1	Perkiraan Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Golongan Umur Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	5-3
Tabel 5.2	Perkiraan Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Golongan Umur Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (%)	5-3

Tabel 5.3	Perkiraan Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	5-7
Tabel 5.4	Perkiraan Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (%)	5-8
Tabel 5.5	Perkiraan Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	5-9
Tabel 5.6	Perkiraan Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (%)	5-9
Tabel 5.3	Perkiraan Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Perkotaan/Perdesaan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (Orang)	5-10
Tabel 5.3	Perkiraan Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Perkotaan/Perdesaan Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 (%)	5-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung ...	2-8
Gambar 2.2	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung	2-9
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2023	2-14
Gambar 2.4	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung..	2-19
Gambar 2.5	Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Bandung	2-20
Gambar 2.6	Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Bandung	2-24
Gambar 2.7	Klasifikasi Jasa Ekosistem (%) di Kabupaten Bandung Tahun 2020	2-28
Gambar 2.8	Peta Kinerja Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Bandung Tahun 2020	2-29
Gambar 2.9	Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2020	2-29
Gambar 2.10	Peta Daya Dukung Pangan Berdasarkan Status Daya Dukung Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2020	2-30
Gambar 2.11	Grafik Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	2-31
Gambar 2.12	Peta Jasa Penyedia Pangan (P1)	2-32
Gambar 2.13	Peta Sebaran Potensi Pertanian di Kabupaten Bandung	2-35
Gambar 2.14	Peta Kawasan Wisata di Kabupaten Bandung ..	2-39
Gambar 2.15	Peta Sebaran Potensi Pariwisata di Kabupaten Bandung	2-44
Gambar 2.16	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Industri Pengolahan 2018-2022	2-47
Gambar 2.17	Kerangka Pemikiran Karakteristik Lokasi Dan Wilayah	2-48
Gambar 6.1	Visi Kabupaten Bandung Tahun 2024	6-2
Gambar 6.2	Keterkaitan Isu Strategis dan Visi Kabupaten Bandung Tahun 2045	6-6
Gambar 6.3	Penyelarasan Visi Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat 2045	6-6
Gambar 6.4	Sasaran Visi Kabupaten Bandung Tahun 2045	6-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan suatu wilayah selalu memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakatnya. Meskipun terdengar sederhana, namun banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut. Masyarakat yang sejahtera akan terkesan menjadi sesuatu hal yang abstrak dan subjektif jika tanpa dijelaskan menggunakan indikator-indikator yang universal. Pemahaman mengenai potensi dan hambatan suatu wilayah baik dari sudut pandang mikro maupun makro menjadi hal penting suatu pembangunan. Aspek sosial, budaya, ekonomi dan SDM harus berjalan koheren dan konstruktif untuk mencegah konflik horizontal yang menghambat pembangunan. Terlepas dari itu, aspek SDM menjadi isu penting dalam sebuah pembangunan karena sifatnya sebagai aktor dan objek.

Dilihat dari aspek SDM, Kabupaten Bandung merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai 3.623.790 jiwa yang terdiri dari 1.848.018 orang penduduk laki-laki atau 50,99 persen dan 1.775.772 orang perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bandung sebesar 104, yang artinya terdapat 104 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Profil SDM tersebut menjadi modal awal Kabupaten Bandung untuk bertumbuh menjadi daerah yang semakin maju ke depannya.

Isu pandemi Covid-19 masih menjadi isu hangat yang dalam konteks pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor. Pandemi yang pada awalnya hanya berdampak pada sektor kesehatan lambat laun meluas hingga sektor lainnya. Pada tahun 2023 banyak negara yang mulai melonggarkan protokol kesehatan seiring dengan semakin turunnya ancaman Covid-19. Hal tersebut turut menjadi pemicu untuk pertumbuhan yang lebih baik pasca pandemi. Indikator-indikator perekonomian makro dan mikro sudah bergerak ke arah perbaikan yang signifikan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Asia Tenggara pasca pandemi.

Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,31 persen, atau hanya kalah dari Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi. Tidak hanya di Indonesia, Kabupaten Bandung sebagai sentra ekonomi dengan modal manusia dan penduduk usia kerja yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat juga mengalami hal demikian, meskipun perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Bandung berada pada arah perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 tercatat sebesar 126.289 orang, turun dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 151.908 orang. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.808.799 orang, turun jika dibandingkan Agustus 2021 yaitu sebesar 1.824.927 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 63,64 persen turun jika

dibandingkan dengan Agustus 2021 yaitu sebesar 65,12 persen. Akan tetapi pada Tahun 2023 mengalami kenaikan Kembali sebesar 67,10 persen.

Isu kuantitas tenaga kerja dan pembangunan di Kabupaten Bandung menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan perencanaan tenaga kerja. Optimalisasi potensi SDM dimulai dengan perencanaan matang dengan data-data yang akurat. Pemetaan potensi SDM tersebut merupakan sisi hulu yang harus disusun dengan presisi demi mendapatkan output pembangunan yang maksimal. Pada konteks ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja daerah merupakan gambaran utuh potensi SDM tenaga kerja yang menjadi rujukan tentang *supply* dan *demand* tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dibutuhkan untuk menjadi panduan dan rambu-rambu dalam pembangunan ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Bandung. Isu-isu milenial dengan berbagai hal baru dalam ketenagakerjaan dan kehadiran industry 4.0 masih menjadi topik aktual yang perlu diantisipasi. Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Tahun 2024-2030 diyakini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan sinergitas antar OPD di lingkungan Kabupaten Bandung untuk menjadikan SDM ketenagakerjaan lebih berkualitas dan berdaya guna.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);

1.3 TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 ini adalah memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung. Tujuan dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 adalah sebagai berikut:

1. Memotret situasi ketenagakerjaan saat ini dan dampak perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan berbagai karakteristiknya;
2. Memperkirakan persediaan tenaga kerja Tahun 2024-2030 dengan berbagai karakteristiknya;
3. Memperkirakan kesempatan kerja yang akan datang dengan berbagai karakteristik, baik yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi maupun faktor lainnya;
4. Memperkirakan angkatan kerja yang belum terserap (penganggur terbuka) tahun 2024-2030;
5. Menyusun kebijakan, strategi dan program dalam menangani masalah ketenagakerjaan.

1.4 METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkirakan persediaan tenaga kerja, baik Penduduk Usia Kerja (PUK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Angkatan Kerja (AK) dengan menggunakan rumus pertumbuhan geometri yaitu:
 - a. Menghitung laju pertumbuhan Penduduk Usia Kerja (PUK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Penduduk Yang Bekerja (PYB) sebelumnya (historis), dengan rumus:

$$r = \left(\left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right) * 100$$

- b. Memproyeksikan PUK, TPAK dan PYB ke depan, dengan rumus:

$$P_q = P_t(1 + r)^m$$

dengan:

P_0 : Data Dasar PUK, TPAK dan PYB pada tahun awal

P_t : Data Dasar PUK, TPAK dan PYB pada tahun akhir

P_q : PUK, TPAK dan PYB tahun proyeksi

r : Angka pertumbuhan penduduk

n : Periode waktu antara data dasar tahun awal dan tahun akhir

m : Periode waktu antara data dasar tahun akhir dengan tahun proyeksi

- c. Menghitung/memproyeksi kebutuhan tenaga kerja menggunakan pendekatan elastisitas yang merupakan rasio antara perubahan atau pertumbuhan PYB dengan pertumbuhan PDRB, dengan rumus sebagai berikut:

$$E_i = \frac{rl_i}{ry_i}$$

Keterangan:

E_i : Elastisitas tenaga kerja sektor i

rl_i : Laju pertumbuhan PYB sektor i pertahun (%)

ry_i : Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) sektor i per tahun (%)

Sedangkan menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan usaha sampai dengan tahun proyeksi, menggunakan rumus:

$$rla_i = Ea_i \times rya_i$$

Keterangan:

Ea_i : Elastisitas perubahan i

rla_i : Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor (%)

rya_i : Perkiraan laju pertumbuhan ekonomi sektor $-i$ (%)

sementara untuk menghitung proyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha, sampai dengan tahun proyeksi, menggunakan rumus:

$$KK_{ti} = KK_{0i} (1 + rla_i)^m$$

Keterangan:

KK_{0i} : Data dasar PYB pada tahun akhir sektor $-i$

rla_i : Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor $-i$

m : Jarak (selisih) tahun proyeksi (tn) dengan tahun data dasar (t_0)

- d. Data dasar yang digunakan dalam penyusunan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja tersebut adalah data ketenagakerjaan dan data ekonomi tahun 2019 s.d 2023
- e. Perkiraan persediaan tenaga kerja selanjutnya ditabulasikan menurut Jenis Kelamin, Golongan Umur, dan Tingkat Pendidikan.
- f. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja ditabulasikan menurut Jenis Kelamin, Golongan Umur, Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Jam Kerja, dan Jabatan/Jenis Pekerjaan Utama.

1.5 SUMBER DATA

Data yang digunakan untuk penyusunan rencana tenaga kerja ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), instansi sektoral dan instansi penyedia data dan informasi lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

1.6 PENGERTIAN

1. Penduduk Usia Kerja (PUK)
Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas.
2. Angkatan Kerja (AK)
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

3. Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

4. Penganggur Terbuka (PT)

Penganggur Terbuka terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

5. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)

Tingkat penganggur terbuka merupakan rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

6. Pekerja Tidak Penuh

Pekerja tidak penuh adalah kegiatan seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja

8. Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha

Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja seperti digolongkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

- a. Menurut Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun)
 - b. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Persediaan Tenaga Kerja Persediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sudah siap untuk bekerja, disebut angkatan kerja (labour force) yang dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas.
11. Kebutuhan Tenaga Kerja Kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja) adalah jumlah lapangan kerja dalam satuan orang yang dapat disediakan oleh seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan produksi. Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan atau keahliannya).

1.7 SISTEMATIKA

Penulisan RTK Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 ini dibagi dalam 7 (tujuh) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI KETENAGAKERJAAN

BAB III : PERKIRAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA

BAB IV : PERKIRAAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

BAB V : PERKIRAAN KESEIMBANGAN TENAGA KERJA

BAB VI : KEBIJAKAN DAN PROGRAM

BAB VII : PENUTUP

BAB II

KONDISI KETENAGAKERJAAN

2.1 KONDISI EKONOMI

Secara umum kondisi ekonomi merupakan keadaan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan laju kecepatan perubahan output agregat suatu perekonomian yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang akhir dan jasa (*final goods and service*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2023).

Perhitungan PDB maupun PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB menurut lapangan usaha mengikuti pengelompokan sektor ekonomi sesuai dengan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC).

Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran/penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu: 1). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang, dan jasa dikurangi dengan penjualan netto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun. 2). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat maupun daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBD. 3). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang. 4). Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya. 5). Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (FOB) 6). Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut *Cost Insurance Freight* (CIF). Sedangkan perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi)

PDRB dengan pendekatan lapangan usaha sering digunakan pada beberapa kasus yang bertujuan untuk melihat potensi suatu daerah. Metode penghitungan PDRB berdasarkan lapangan usaha ini memungkinkan identifikasi sektor-sektor yang memberikan kontribusi pada perekonomian suatu daerah. Kontribusi juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan per sektor pada rentang waktu tertentu. Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi didasarkan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan atau yang dikenal juga sebagai PDRB riil.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung (persen) 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,45	0,13	1,26	-1,13	3,21
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,63	0,43	1,44	-2,79	0,06
3	Industri Pengolahan	9,05	-3,23	3,6	7,2	3,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,89	-5,13	2,19	-2,16	5,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,06	10,24	7,99	3,95	-0,80
6	Konstruksi	4,11	1,42	1,14	1,13	7,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,49	-3,69	6,86	4,63	5,86
8	Transportasi dan Pergudangan	3,42	-4,14	-2,13	10,37	12,85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,22	-3,12	0,14	5,11	11,58
10	Informasi dan Komunikasi	10,61	23,61	9,54	5,91	8,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	5,72	3,61	-2,1	6,01
12	Real Estat	9,73	-0,37	12,67	5,71	8,47
13	Jasa Perusahaan	8,78	-14,27	9,34	7,63	9,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	-6,40	-2,64	0,17	2,94
15	Jasa Pendidikan	6,35	4,27	4,99	1,86	7,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18	-3,41	3,63	10,79	13,30
17	Jasa lainnya	7,84	-1,53	1,21	8,15	10,93
	Produk Domestik Regional Bruto	6,36	-1,80	3,56	5,35	4,97

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

*sangat sementara

**sangat sangat sementara

Secara keseluruhan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023. Semula pada tahun 2019 laju pertumbuhan mencapai 6,36 persen, menurun drastis pada tahun 2020 menjadi sebesar minus -1,80 persen dan mulai naik tahun 2021 hingga pada tahun 2023 menjadi 4,97 persen. Tren negatif tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang berada pada fase terburuk tahun 2020. Laju pertumbuhan mulai membaik sejak tahun 2021 hingga 2022 seiring dengan transisi dari pandemi menuju ke endemi Covid-19.

Pada masa pandemi tersebut, sektor informasi dan komunikasi tumbuh sangat signifikan dari 10,61 persen di tahun 2019 menjadi 23,61 persen di tahun 2020. Sementara itu sektor jasa perusahaan menjadi sektor yang paling dalam terkontraksi, yakni sebesar -4,27 persen. Secara umum, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pertumbuhannya relatif stabil.

Selama periode 2019-2023, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Bandung. Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2023 sebesar 3,15 persen, sedangkan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai sebesar 5,86 persen. Tersedianya banyak kawasan industri di Kabupaten Bandung turut mendorong tingginya pertumbuhan sektor industri pengolahan ini. Kawasan-kawasan industri tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang menghasilkan multiplier effect bagi sektor lainnya. Beberapa sektor lain yang memiliki kontribusi relatif tinggi pada perekonomian Kabupaten Bandung dari tahun 2019-2023 yaitu sektor konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, jasa

keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta transportasi.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Bandung, 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,70	7,79	7,40	6,98	7,04
B	Pertambangan dan Penggalian	2,00	1,75	1,93	2,26	1,84
C	Industri Pengolahan	53,60	53,05	53,21	53,67	52,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,1	0,10	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,16	6,29	6,28	6,06	6,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,33	12,35	12,67	12,66	12,94
H	Transportasi dan Pergudangan	3,60	3,6	3,43	3,67	4,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,45	2,44	2,39	2,37	2,49
J	Informasi dan Komunikasi	1,54	1,89	1,95	1,86	1,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,66	0,7	0,70	0,67	0,69
L	Real Estat	1,18	1,19	1,26	1,25	1,30
M,N	Jasa Perusahaan	0,45	0,4	0,42	0,43	0,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	2,01	1,88	1,71	1,70
P	Jasa Pendidikan	3,13	3,43	3,48	3,34	3,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,85	0,83	0,84	0,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,11	2,13	2,04	2,09	2,19
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

*sangat sementara

**sangat sangat sementara

Aspek Geografi dan Demografi

Ditinjau dari segi geografis, kondisi umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terbagi atas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi penduduk. Kabupaten Bandung yang berada pada jalur strategis pergerakan di Jawa Barat memberikan keunggulan absolut bagi Kabupaten Bandung. Di samping itu, posisi geografi Kabupaten Bandung yang dikelilingi deretan gunung api menjadikan kondisi lahan Kabupaten Bandung relatif subur dan ditunjang oleh ketersediaan sumber daya air sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya.

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah yang akan dibahas pada bagian ini mencakup luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, serta beberapa kondisi fisik wilayah lainnya.

A. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Bandung meliputi 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dengan cakupan area seluas 1.740,84 km². Secara administratif, wilayah Kabupaten Bandung berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Rincian luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Bandung dijelaskan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Bandung Per Kecamatan Tahun 2022

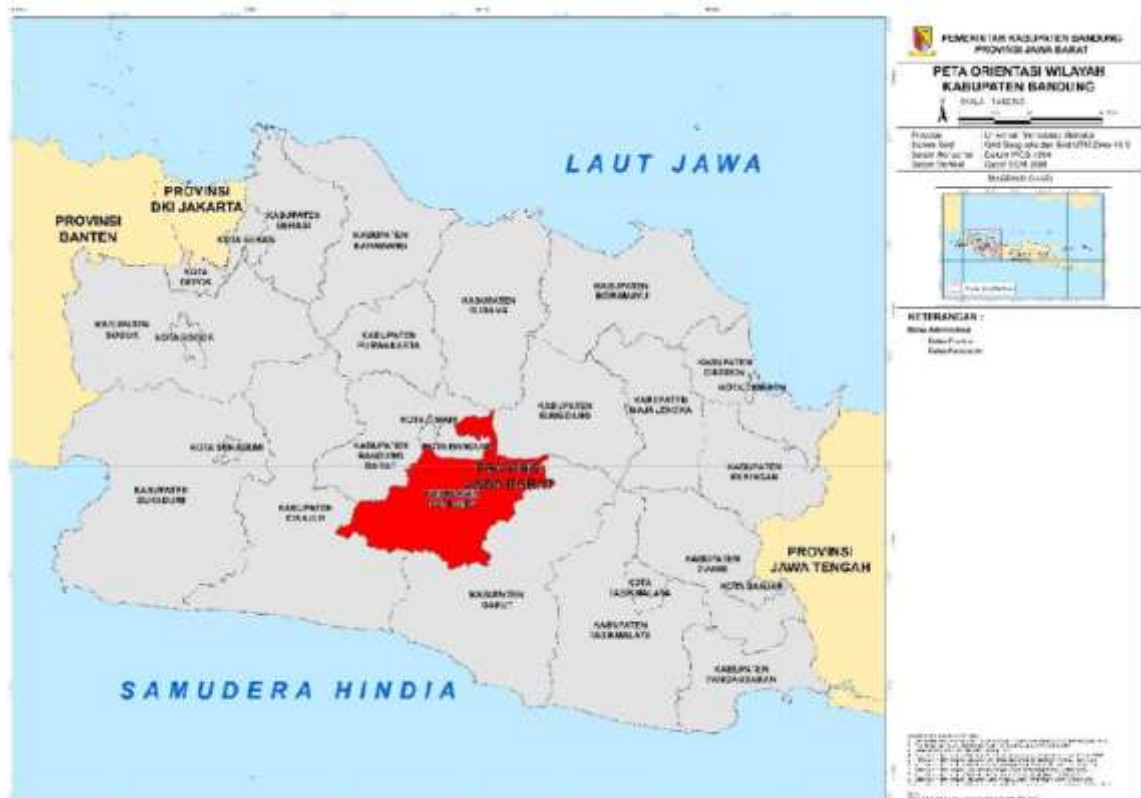
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Soreang	2.537,04	10
2	Kutawaringin	4.705,50	11
3	Katapang	1.561,94	7
4	Rancabali	15.286,64	5
5	Pasirjambu	19.807,79	10
6	Ciwidey	5.519,18	7
7	Baleendah	4.182,97	8
8	Dayeuhkolot	1.115,30	6
9	Bojongsoang	2.822,38	6
10	Banjaran	3.903,25	11
11	Pangalengan	21.656,39	13
12	Cangkuang	2.375,09	7
13	Cimaung	5.955,56	10
14	Arjasari	6.277,55	11
15	Pameungpeuk	1.514,15	6
16	Majalaya	2.431,45	11
17	Ciparay	5.366,72	14
18	Pacet	9.482,01	13
19	Kertasari	13.654,39	8
20	Paseh	4.789,20	12
21	Ibun	5.477,22	12
22	Solokanjeruk	2.435,27	7
23	Cicalengka	4.351,07	12
24	Nagreg	4.282,97	8
25	Cikancung	3.872,63	9
26	Cileunyi	3.063,24	6
27	Rancaekek	4.486,63	14
28	Cimenyan	4.758,98	9
29	Cilengkrang	3.525,17	6
30	Margaasih	1.832,39	6
31	Margahayu	1.054,26	5
TOTAL		174.084,34	280

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, 2023

B. Letak dan Kondisi Geografis

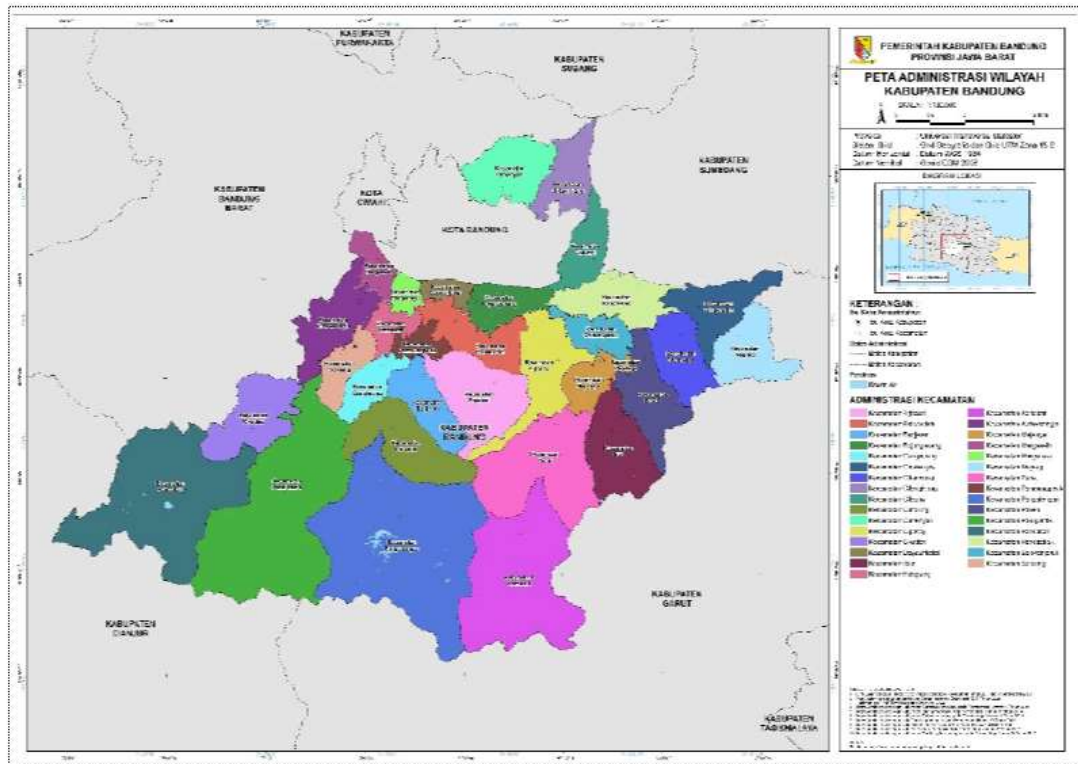
Dari segi administratif, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada $107^{\circ} 14' - 108^{\circ} 56'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 49' - 7^{\circ} 18'$ Lintang Selatan. Peta orientasi wilayah dan wilayah administratif Kabupaten Bandung dapat dilihat pada **Gambar 2-1** dan **Gambar 2-2**.

Gambar 2.1
Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Bandung



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2023

Gambar 2.2
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2023

Kondisi Topografi

Kabupaten Bandung terletak di Cekungan Bandung dengan ciri khas dataran tinggi luas di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan di sebelah barat, selatan, utara dan timurnya. Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang mengalir di kawasan ini sebelum masuk ke waduk Saguling. Topografi wilayah merupakan pengelompokan bentang alam berdasarkan rona, kemiringan, dan ketinggian secara umum pada satuan morfologi.

Sebagian besar ketinggian dataran di Kabupaten Bandung berada pada ketinggian <700 mdpl (19%). Sebagian besar kawasan perkotaan seperti Majalaya, Soreang, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi, Baleendah, dan Bojongsoang

terletak di topografi ini. Kawasan dengan topografi <700 mdpl ini berpotensi mengalami banjir yang dilanda pada setiap musim hujan dikarenakan aliran sungai yang ada di seluruh Cekungan Bandung bermuara ke sungai Citarum ditambah drainase yang buruk, pencemaran sungai yang parah serta dangkalnya sungai.

Adapun Kecamatan yang terletak di Pegunungan yaitu Ciwidey, Pasirjambu dan Pangalengan berada di wilayah Kabupaten Bandung bagian selatan serta Cimenyan dan Cilengkrang di bagian wilayah Kabupaten Bandung bagian utara. Gunung yang ada di Kabupaten Bandung antara lain: Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), Gunung Papandayan (2.262 m), dan Gunung Manglayang.

2.2 Potensi Daerah

1. Aspek Geografi dan Demografi

Ditinjau dari segi geografis, kondisi umum kondisi daerah Kabupaten Bandung terbagi atas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi penduduk. Kabupaten Bandung yang berada pada jalur strategis pergerakan di Jawa Barat memberikan keunggulan absolut bagi Kabupaten Bandung. Di samping itu, posisi geografi Kabupaten Bandung yang dikelilingi deretan gunung api menjadikan kondisi lahan Kabupaten Bandung relatif subur dan ditunjang oleh ketersediaan sumber daya air sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya

2. Karakteristik Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah yang akan dibahas pada bagian ini mencakup luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, serta beberapa kondisi fisik wilayah lainnya.

A. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Bandung meliputi 31 kecamatan, 270 desa, dan 11 kelurahan dengan cakupan area seluas 1.762,4 km². Secara administratif, wilayah Kabupaten Bandung berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Rincian luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Bandung dijelaskan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4
Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Bandung Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha) %	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Ciwidey	2,75	7	
2	Rancabali	8,42	5	
3	Pasirjambu	13,59	10	
4	Cimaung	3,12	10	
5	Pangalengan	11,09	13	
6	Kertasari	8,63	8	
7	Pacet	5,22	13	
8	Ibun	3,1	12	

No	Kecamatan	Luas (Ha) %	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
9	Paseh	2,9	12	
10	Cikancung	2,28	9	
11	Cicalengka	2,04	12	
12	Nagreg	2,8	8	
13	Rancaekek	2,57	13	1
14	Majalaya	1,44	11	
15	Solokanjeruk	1,36	7	
16	Ciparay	2,62	14	
17	Baleendah	2,36	3	5
18	Arjasari	3,69	11	
19	Banjaran	2,44	11	
20	Cangkuang	1,4	7	
21	Pameungpeuk	0,83	6	
22	Katapang	0,89	7	
23	Soreang	1,45	10	
24	Kutawaringin	2,68	11	
25	Margaasih	1,04	6	
26	Margahayu	0,6	4	1
27	Dayeuhkolot	0,63	5	1
28	Bojongsoang	1,58	6	
29	Cileunyi	1,79	6	
30	Cilengkrang	1,71	6	
31	Cimendan	3,01	7	2
TOTAL		100	270	10

Sumber: KBDA 2024 dan
<https://satudata.bandungkab.go.id/integrasi/jumlah-penduduk-laki-laki-dan-perempuan>

Pada tahun 2020, BPS melakukan pendataan kembali melalui Sensus Penduduk 2020 pada September 2020. Berdasarkan hasil SP 2020, maka diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.623.790 jiwa pada tahun 2021 lajut pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan 1,16 persen sehingga penduduk meningkat menjadi 3.666.156 jiwa. Hasil pendataan penduduk yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, selain mencerminkan nilai riil pendataan kependudukan di Kabupaten Bandung yang selama ini dapat bernilai lebih rendah dari nilai proyeksi SP 2010. Berdasarkan hasil proyeksi untuk

tahun 2022, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.718.660 jiwa dengan kepadatan sebesar 2.080 jiwa/km².

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung, 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2019	3.775.279	3,11
2020	3.623.790	-4,18
2021	3.666.156	1,16
2022	3.718.660	1,41
2023	3.721.111	0,07

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Kabupaten Bandung pada tahun 2022 masih lebih banyak dibanding laki-laki yaitu sebanyak 1.895.139 orang dan perempuan 1.823.521 orang. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan laki-laki menjadi 1.894.101 orang dan perempuan 1.827.010 orang. Dari kedua data tersebut diperoleh rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bandung sebesar 103,93 yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Bandung, 2019-2023

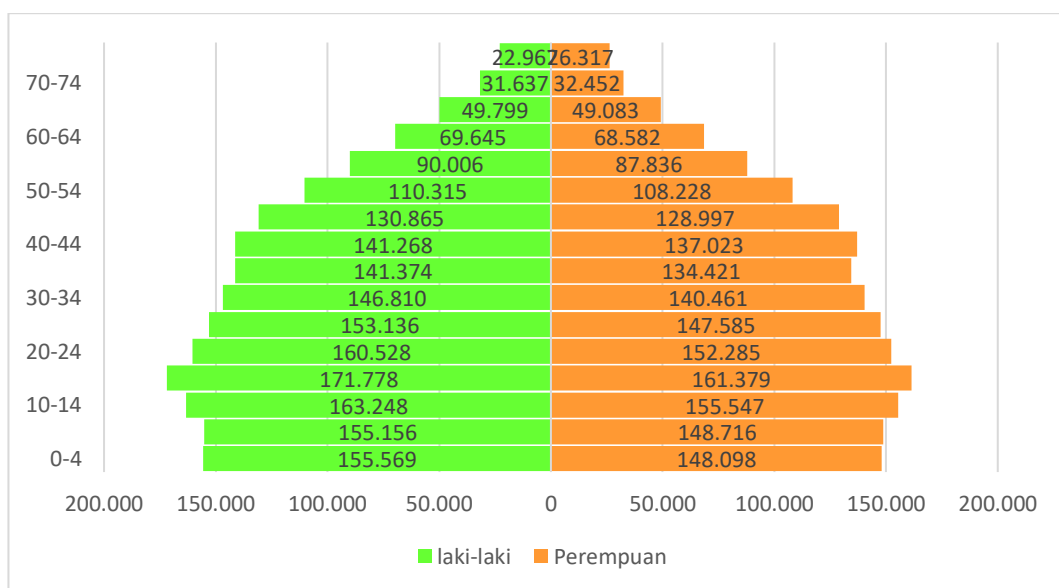
Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio
2019	1.911.189	1.864.090	3.775.279	102,53
2020	1.848.018	1.775.772	3.623.790	104,07
2021	1.869.009	1.684.443	3.666.156	110,96
2022	1.895.139	1.823.521	3.718.660	103,93
2023	1.894.101	1.827.010	3.721.111	103,67

Sumber : Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), dari 2020-2024, diolah

Analisis Hasil Sensus Penduduk 2020 menyebutkan bahwa piramida penduduk Kabupaten Bandung mengalami transisi dari piramida penduduk ekspansif menuju piramida penduduk stasioner, ditunjukkan dari jumlah penduduk usia 0-14 tahun yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk kelompok usia di atasnya. Usia produktif (15 – 64 tahun) di Kabupaten Bandung mendominasi penduduk hingga 69,40 persen dari total populasi penduduknya.

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Dengan struktur penduduk demikian, Kabupaten Bandung masih berada pada periode “jendela kesempatan” (window opportunity) untuk menikmati bonus demografi. Jika dimanfaatkan secara optimal, maka Kabupaten Bandung dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.3
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2023



Sumber : Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA) 2024

Jumlah penduduk menunjukkan proporsi penduduk usia anak (kelompok penduduk usia 0-14 tahun) di Kabupaten Bandung masih cukup besar mencapai 24,89 persen dari total penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa pengarusutamaan anak masih menjadi isu utama. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Menyadari bahwa kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak usia dini, maka pemenuhan hak dan perlindungan anak hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Bandung.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung, 2019-2023

Golongan Umur	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	388.537	313.554	315.527	318.248	303.667
5-9	376.401	309.090	308.162	309.443	303.872
10-14	352.613	336.310	333.521	330.922	318.795
15-19	347.133	324.169	323.784	324.545	333.157
20-24	322.390	309.948	310.176	310.732	312.813
25-29	325.913	300.439	302.176	304.798	300.721
30-34	330.863	279.868	281.709	283.993	287.271
35-39	301.184	282.452	285.113	288.870	275.795
40-44	259.594	275.469	278.674	281.989	278.291
45-49	215.073	239.661	245.165	251.258	259.862
50-54	170.654	197.437	203.007	209.075	218.543

Golongan Umur	2019	2020	2021	2022	2023
55-59	135.164	161.167	167.157	173.455	177.842
60-64	88.377	118.521	124.186	130.462	138.227
65-69	161.383	86.815	91.804	96.857	98.882
70-74	-	46.999	51.077	55.575	64.089
75+	-	41.891	44.918	48.438	49.284
Jumlah	3.775.279	3.623.790	3.666.156	3.718.660	3.721.111

Sumber : Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), dari 2020-2024

Jumlah penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi. Hal ini dilihat dari persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang cukup tinggi yaitu mencapai 69,40 persen. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2019. Struktur penduduk yang demikian dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar atau dengan kata lain disebut “bonus demografi”. Bonus demografi merupakan keadaan kependudukan dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

3. Infrastruktur Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tabel 2.8
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Sederajat
Kabupaten Bandung
Tahun 2022/2023 dan 2023/2024

Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah	
	2021/2022	2022/2023
SD KEBAWAH	34.613	46.768
SMP	581	595
SMA	239	253
SMK	139	141
Diploma I/II/III		
Universitas	7	7

Sumber : KBDA 2024

4. Sumber Daya Alam

a. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung disajikan dalam informasi tutupan lahan yang dihasilkan dari RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036. Tutupan lahan mengalami perubahan sebagian besar menjadi wilayah terbangun. Perubahan tutupan lahan sangat dipengaruhi dari aktivitas pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Pertambahan kebutuhan ruang untuk permukiman dan kebutuhan ruang untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan perubahan tutupan lahan tidak dapat dihindari.

Berdasarkan SNI Nomor 7645-1:2014 mengenai Klasifikasi Penutup Lahan Skala Kecil dan Menengah, tutupan lahan Kabupaten Bandung diklasifikasikan menjadi 34 jenis penggunaan lahan. Rincian penggunaan dan luas lahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

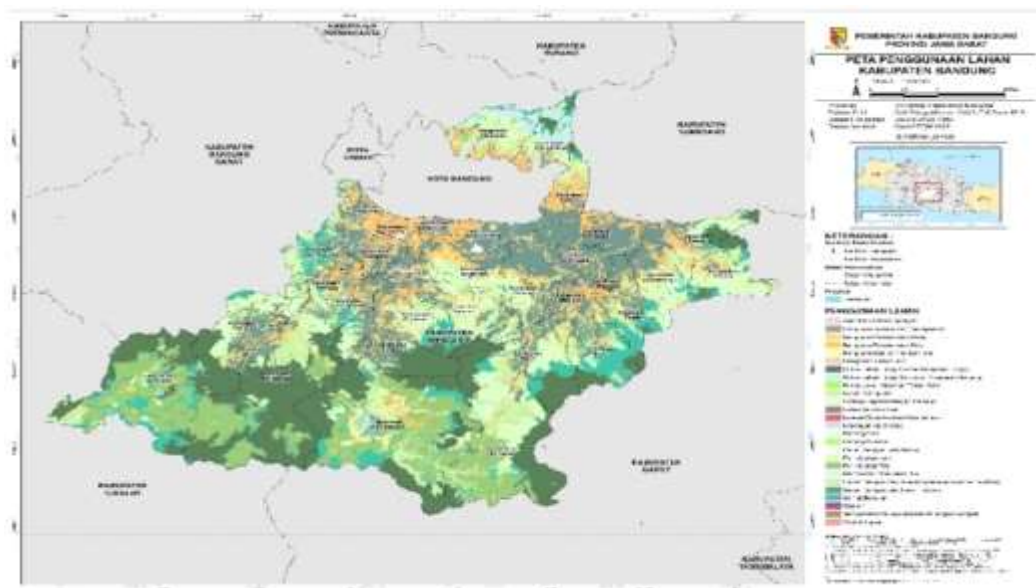
Tabel 2.9
Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Tahun 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Area Parkir Dan Lapangan	6,38	0,00%
2	Bangunan Industri dan Perdagangan	1.750,65	1,00%
3	Bangunan non-permukiman lain	8,84	0,01%
4	Bangunan Permukiman Desa	10.032,77	5,76%
5	Bangunan Permukiman Kota	15.174,40	8,71%
6	Danau Buatan Lainnya	1,19	0,00%
7	Danau/Telaga Alami	214,88	0,12%
8	Embung	3,79	0,00%
9	Hamparan Lahar/Lava	20,93	0,01%
10	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	36.135,45	20,73%
11	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	2.248,20	1,29%
12	Hutan, Jalur Hijau dan Taman Kota	0,66	0,00%
13	Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah	197,99	0,11%
14	Kebun Campuran	8.685,71	4,98%
15	Kolam Air Tawar Lain	44,52	0,03%
16	Kolam Oksidasi dan Pengelolaan Limbahr	81,83	0,05%
17	Ladang/Tegalan dengan Palawija	26.778,70	15,36%
18	Lahan Terbuka Lain	779,83	0,45%
19	Landas Pacu (runway) dan taxiway	71,39	0,04%
20	Lapangan diperkeras	0,71	0,00%
21	Padang Golf	60,76	0,03%
22	Padang Rumput	24,7	0,01%
23	Penambangan Terbuka Lain	121,16	0,07%
24	Perkebunan Lain	1.031,22	0,59%
25	Perkebunan Teh	21.776,70	12,49%
26	Permukaan diperkeras lain	29,71	0,02%
27	Saluran Air	12,16	0,01%
28	Sawah dengan padi diselingi palawija/tanaman lain/bero	3.972,32	2,28%
29	Sawah dengan padi terus menerus	29.983,29	17,20%
30	Semak/Belukar	14.720,69	8,45%
31	Stadion	14,07	0,01%
32	Sungai	247,88	0,14%
33	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	7,94	0,00%
34	Waduk Irigasi	63,21	0,04%
Grand Total		174.304,60	100,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2023

Berdasarkan penggunaan lahan tahun 2019, diketahui bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung didominasi oleh Hutan Lebih Tinggi Primer Kerapatan Tinggi seluas 36.135,45 ha atau sebesar 20,67% dari total luas wilayah. Ketersediaan lahan di Kabupaten Bandung memiliki potensi dalam mendukung kegiatan dan fungsi pertanian dan sebagai kawasan resapan air. Potensi kawasan resapan air dapat dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan banjir dan genangan pada saat musim hujan. Kawasan resapan air di Kabupaten Bandung dibagi menjadi imbuhan Bandung Soreang, Imbuhan Banjarsari, Imbuhan Batujajar, Imbuhan Ciater, Imbuhan Cibuni, Imbuhan Garut, Imbuhan Malangbong, Imbuhan Sumedang, dan Imbuhan Limuang. Peta penggunaan lahan dan peta kawasan resapan air di Kabupaten Bandung secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.4
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2023

Gambar 2.5
Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Bandung



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2023

b. Layanan Kinerja Jasa Ekosistem

Layanan Kinerja Jasa Ekosistem disusun berdasarkan Peta Digital Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya metode yang dilakukan adalah pengolahan data digital skala Provinsi Jawa Barat yang diolah dengan cara melakukan *cropping* menjadi lingkup Kabupaten Bandung, dan dianalisis melalui sistem *database software* Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga dapat menghasilkan nilai kinerja layanan jasa ekosistem. Jasa lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) dapat direpresentasikan oleh jasa ekosistem, dengan pemahaman bahwa DDDTLH merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu ekoregion. Jasa ekosistem terbagi menjadi empat klasifikasi dengan rincian yaitu:

Layanan Penyedia (*Provisioning Services*), yaitu jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti sumber daya genetika, makanan, air, dll.

1. Layanan Pengaturan (*Regulating Services*), yaitu manfaat yang didapat dari pengaturan ekosistem, seperti aturan pengendalian banjir, erosi, dampak perubahan iklim, dll.
2. Layanan Kultural (*Cultural Services*), yaitu manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, serta nilai-nilai estetika dan pengetahuan
3. Layanan Pendukung (*Supporting Services*), yaitu jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, oksigen, nutrisi, air, dll.

1) Jasa Penyedia (P)

Jasa Penyedia. Jasa Penyedia Bahan Pangan (P1) di Kabupaten Bandung sebagian besar kategori sangat rendah seluas 59,209.85 Ha atau 33.50 % dan sangat rendah sebanyak 47,366.52 Ha atau 26,80, selanjutnya kategori sedang 45,989.75 Ha atau 26 %.

Jasa Penyedia Air Bersih (P2) sebagian besar merupakan kategori tinggi seluas 106,922.39 Ha atau 60 %. Jasa penyedia serat fiber (P3) di Kabupaten Bandung sebagian besar kategori sangat tinggi seluas 79.972,58 Ha atau 40.14%. Jasa Penyedia Bahan Bakar (P4) sebagian besar pada kategori sangat tinggi seluas 98.156,02 Ha atau 55,53%, Jasa penyedia sumber daya genetik (P5) sebagian besar merupakan kategori tinggi dengan luas 46.654,52 Ha atau 26,39% dan kategori sangat tinggi dengan luas 40,752 Ha atau 23,05 %.

2) Jasa Pengatur (R)

Jasa Pengatur Iklim (R1) sebagian besar di Kabupaten Bandung pada sebagian besar kategori tinggi 79,737.50 Ha atau 45,108%. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir (R2) sebagian besar pada kategori tinggi seluas 56,536.73 Ha atau 31.98%. Jasa Pengatur Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana sebagian besar sangat tinggi seluas 54,239.30 Ha atau 30.68%. Jasa Pengaturan Permurnian Air (R3) sebagian besar pada kategori sangat tinggi 64314.78 Ha atau 36.68%. Kinerja jasa Pengolahan dan Pemurnian limbah (R5) sebagian besar merupakan kategori tinggi 65,461.42 Ha atau 37.03%. Kinerja Jasa Pemeliharaan Kualitas Udara (R6) sebagian besar kategori tinggi 63,495.27 Ha atau 35,92%. Kinerja Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (R7) sebagian besar kategori tinggi seluas 51,859.56 Ha atau 29.33% dan kategori sangat tinggi seluas 50,071.60 Ha atau 28.33%. Kinerja Jasa pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit (R8) sebagian besar pada kategori sedang seluas 68,619.22 Ha atau 38.82% dan kategori tinggi seluas 56,022.76 Ha atau 31.39%.

3) Jasa Pendukung (D)

Kinerja Jasa Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan (D1) sebagian besar kategori sedang 57,724.03 Ha atau 32.65% dan sangat tinggi seluas 50,298.59 Ha atau 28.45%. Kinerja Jasa Pendukung Siklus Hara (D2) sebagian besar pada kategori tinggi seluas 101,375.17 atau 57.34%. Kinerja Jasa Pendukung Produksi Primer (D3) sebagian besar pada kategori sedang seluas 88,953 Ha atau 50.32%.

Kinerja Jasa Biodiversitas (D4) sebagian besar pada kategori tinggi dengan luas 67377.33 Ha atau 38.116%.

4) Fungsi Budaya (*Cultural*)

Kinerja Jasa Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (C1) sebagian besar pada kategori sedang 87,644.13 Ha atau 49.58 %. Kinerja Jasa Rekreasi dan Ekowisata (C2) sebagian besar pada kategori tinggi seluas 113,180.89 Ha atau 64.03%. Kinerja Jasa Fungsi Estetika (C3) sebagian besar pada kategori tinggi dengan luas 92.446.79 Ha atau 52.29 %

c. Daya Dukung Sumber Daya Air

Daya dukung sumber daya air (DDL-SDA) adalah rasio ketersediaan air dibagi jumlah kebutuhan air, yang dihitung berdasarkan kondisi pada saat ini dan kondisi atau proyeksi yang akan datang.

Apabila nilai rasio 1,0 maka DDL-SDA baik untuk memenuhi kebutuhan air. Ketersediaan air dihitung berdasarkan kondisi besar debit **baseflow** atau Q80%.

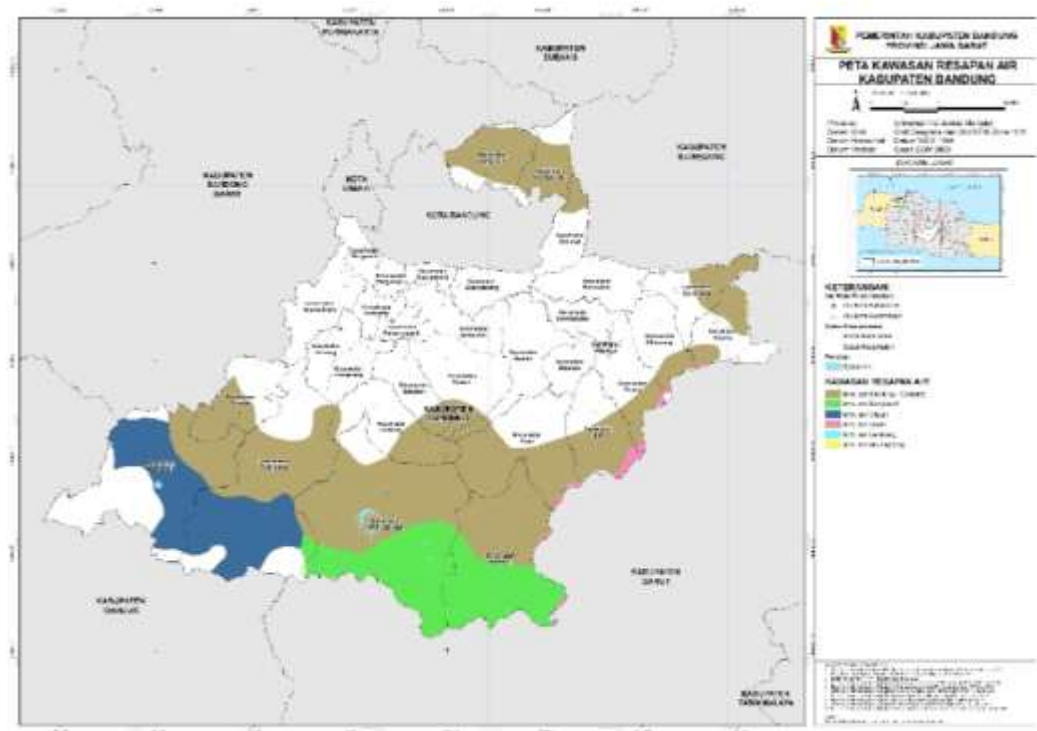
Apabila semua potensi air di musim hujan dan musim kemarau dihitung dan sepanjang waktu tersebut air ditampung dengan bendungan atau waduk maka menggunakan debit air rata-rata atau Q50%. Hasil perhitungan daya dukung sumber daya air tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **DDL-SDA pada Q80%** pada tahun 2019 adalah 0,79 dan proyeksi pada tahun 2030 adalah 0,77. Nilai tersebut <1,0 yang menunjukkan sumber daya air permukaan di Kabupaten Bandung di musim kemarau saat ini kritis **tidak mampu**

memenuhi kebutuhan semua penduduk di Kabupaten Bandung.

b) DDL-SDA pada Q50% pada tahun 2019 adalah 1,20 dan proyeksi pada tahun 2030 adalah 1,24. Nilai tersebut $>1,0$ yang menunjukkan apabila semua air sungai disimpan dalam waduk maka kebutuhan air terjamin bahkan masih terdapat kelebihan air.

Gambar 2.6
Peta Kawasan Resapan Air Kabupaten Bandung



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, 2023

Tabel 2.10
Proyeksi Kebutuhan Air dan Tingkat Ketersediaan Air

Kebutuhan Air dan Daya Dukung SDA	Baseline 2019	Proyeksi 2030
	m3/detik	m3/detik
Air bersih	5,24	6,14
Air irigasi	40,717	40,717
Jumlah	45,96	46,86
Ketersediaan air Q 50 %	58,03	58,03

Kebutuhan Air dan Daya Dukung SDA	Baseline 2019	Proyeksi 2030
	m3/detik	m3/detik
Ketersediaan air Q 80 %	36,11	36,11
Indeks Daya Dukung SDA Q50%	1,26	1,24
Indeks Daya Dukung SDA Q80%	0,79	0,77

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka 2019, KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

Tabel 2.11
Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Tahun 2020

No	Nama	Luas (Ha)	%
1	Sangat Rendah	6367,02	3,6
2	Rendah	15041,17	8,51
3	Sedang	6510,86	3,68
4	Tinggi	106922,4	60,48
5	Sangat Tinggi	41928,91	23,72
	Jumlah	176,770	100

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK, KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

1). Daya Dukung Air berdasarkan Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih

Sebagian besar kondisi jasa ekosistem penyedia air bersih adalah kategori tinggi mencapai 60%, selanjutnya sangat tinggi mencapai 23,72% ini menunjukkan bahwa potensi vegetasi yang berfungsi sebagai infiltrasi air hujan cukup baik, dan memberikan kontribusi sumber daya air bersih bagi Kabupaten Bandung. Namun saat ini distribusi air bersih di beberapa tempat tidaklah merata dan beberapa kecamatan yang memiliki penyediaan air sangat rendah dan rendah sebesar 13,01% yang menyebar pada beberapa kecamatan yang sebagian besar berada di Kecamatan Cimenyan.

d. Daya Dukung Pangan

Daya Dukung pangan adalah kemampuan lahan dalam produksi beras dibagi konsumsi beras penduduk Kabupaten Bandung. Asumsi tingkat kebutuhan pangan yang paling pokok adalah beras. *Daya dukung pangan di Kabupaten Bandung ialah tingkat produksi beras dibagi kebutuhan Konsumsi beras penduduk, menghasilkan indeks daya dukung pangan.*

Daya Dukung Pangan Tinggi = $DD \text{ Pangan} \geq 1$

Daya Dukung Pangan Rendah = $DD \text{ Pangan} \leq 1$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio produksi dan kebutuhan konsumsi beras penduduk per kecamatan menggunakan rilis data tahun 2022, diketahui bahwa terdapat 12 kecamatan yang memiliki tingkat daya dukung pangan rendah. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Pangalengan, Kertasari, Cicalengka, Nagreg, Baleendah, Katapang, Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan. Faktor utama rendahnya tingkat daya dukung pangan di kecamatan-kecamatan tersebut ialah besarnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan kemampuan produksi beras dimana sebagian besar kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang telah memiliki corak perkotaan yang tidak memiliki lahan pertanian yang luas. Adapun untuk kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki corak perkotaan seperti Pangalengan dan Kertasari memiliki tingkat daya dukung pangan rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung sehingga luasan lahan pertanian tidak seluas kecamatan lainnya. Rincian tingkat daya dukung pangan untuk setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

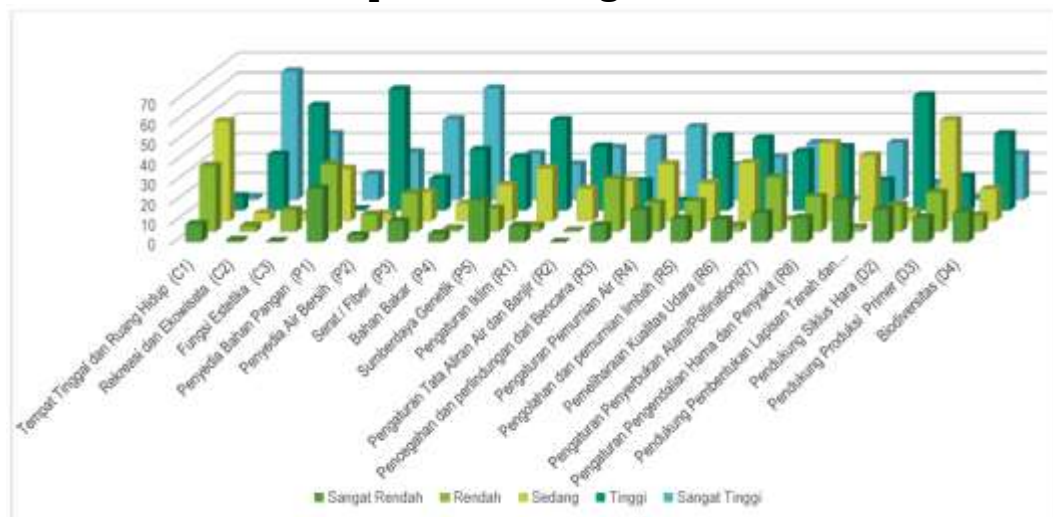
Tabel 2.12
Luas Panen Padi dan Produksi Gabah (Kg) Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Produksi Padi (Ton/tahun)	Produksi Beras (Kg/tahun)	Perkapita kg/Th	Konsumsi (Kg/Tahun)	Ratio	Keterangan
1	Ciwidey	89.436	16.445	10.528.337	92,9	8.308.604	1,27	Memenuhi DD
2	Rancabali	51.846	7.623	4.880.306	92,9	4.816.493	1,01	Memenuhi DD
3	Pasirjambu	93.667	20.832	13.336.664	92,9	8.701.664	1,53	Memenuhi DD
4	Cimaung	89.013	34.400	22.023.054	92,9	8.269.308	2,66	Memenuhi DD
5	Pangalengan	157.568	6.628	4.243.226	92,9	14.638.067	0,29	Tidak memenuhi DD
6	Kertasari	72.462	3.416	2.186.800	92,9	6.731.720	0,32	Tidak memenuhi DD
7	Pacet	118.158	44.432	28.445.718	92,9	10.976.878	2,59	Memenuhi DD
8	Ibun	89.534	17.001	10.884.270	92,9	8.317.709	1,31	Memenuhi DD
9	Paseh	139.939	35.326	22.615.639	92,9	13.000.333	1,74	Memenuhi DD
10	Cikancung	100.031	15.486	9.913.916	92,9	9.292.880	1,07	Memenuhi DD
11	Cicalengka	125.079	17.534	11.225.052	92,9	11.619.839	0,97	Tidak memenuhi DD
12	Nagreg	60.488	7.463	4.777.945	92,9	5.619.335	0,85	Tidak memenuhi DD
13	Rancaekek	189.801	38.273	24.502.471	92,9	17.632.513	1,39	Memenuhi DD
14	Majalaya	162.658	28.994	18.562.331	92,9	15.110.928	1,23	Memenuhi DD
15	Solokan Jeruk	88.829	26.572	17.011.347	92,9	8.252.214	2,06	Memenuhi DD
16	Ciparay	177.408	41.246	26.405.137	92,9	16.481.203	1,6	Memenuhi DD
17	Baleendah	272.914	25.367	16.239.592	92,9	25.353.711	0,64	Tidak memenuhi DD
18	Arjasari	108.853	25.596	16.386.539	92,9	10.112.444	1,62	Memenuhi DD
19	Banjaran	136.169	31.381	20.090.327	92,9	12.650.100	1,59	Memenuhi DD
20	Cangkuang	83.163	23.534	15.066.823	92,9	7.725.843	1,95	Memenuhi DD
21	Pameungpeuk	87.786	13.368	8.558.348	92,9	8.155.319	1,05	Memenuhi DD
22	Katapang	135.321	15.524	9.938.568	92,9	12.571.321	0,79	Tidak memenuhi DD
23	Soreang	119.463	17.552	11.236.590	92,9	11.098.113	1,01	Memenuhi DD
24	Kutawaringin	105.415	34.966	22.384.987	92,9	9.793.054	2,29	Memenuhi DD

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Produksi Padi (Ton/tahun)	Produksi Beras (Kg/tahun)	Perkapita kg/Th	Konsumsi (Kg/Tahun)	Ratio	Keterangan
25	Margaasih	151.890	11.194	7.166.459	92,9	14.110.581	0,51	Tidak memenuhi DD
26	Margahayu	121.952	1.017	651.120	92,9	11.329.341	0,06	Tidak memenuhi DD
27	Dayeuhkolot	107.490	2.336	1.495.430	92,9	9.985.821	0,15	Tidak memenuhi DD
28	Bojongsoang	114.924	31.170	19.954.710	92,9	10.676.440	1,87	Memenuhi DD
29	Cileunyi	192.184	23.891	15.295.093	92,9	17.853.894	0,86	Tidak memenuhi DD
30	Cilengkrang	58.224	5.787	3.704.607	92,9	5.409.010	0,68	Tidak memenuhi DD
31	Cimencyan	116.995	6.359	4.071.249	92,9	10.868.836	0,37	Tidak memenuhi DD
	Jumlah	3.717.291	630.713	403.782.653		345.463.514	1,2	

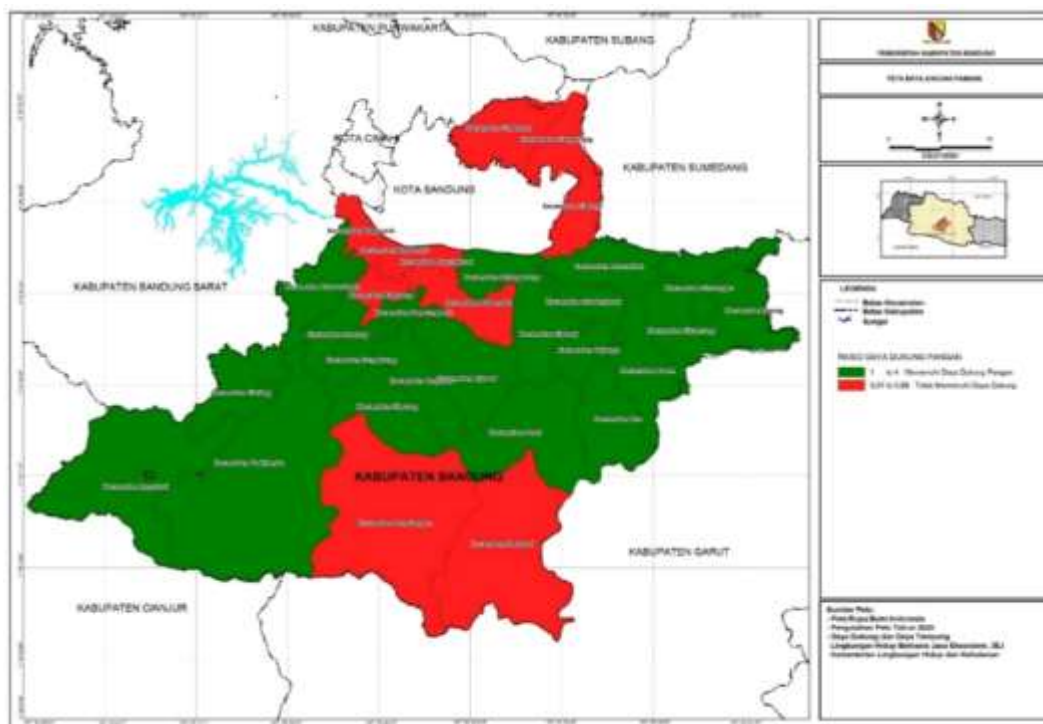
Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2023

Gambar 2.7
Klasifikasi Jasa Ekosistem (%)
di Kabupaten Bandung Tahun 2020



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

Gambar 2.10
Peta Daya Dukung Pangan Berdasarkan Status Daya Dukung
Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2020



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

1) Daya Dukung Pangan Berdasarkan

Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

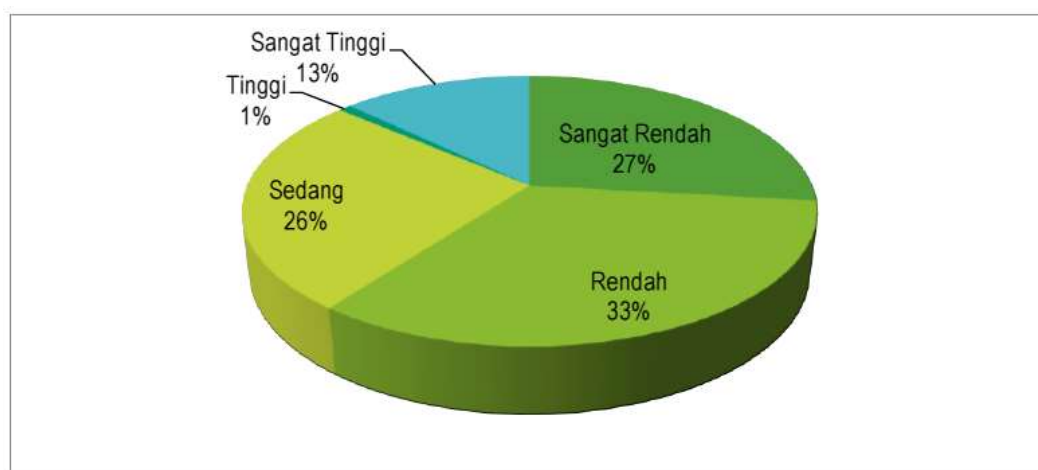
Daya dukung pangan berdasarkan layanan jasa ekosistem pangan sebagian besar adalah kategori rendah mencapai 33 %, selanjutnya sangat rendah mencapai 27%, dan sedang hanya menyediakan 26%. Penyedia pangan sangat tinggi sebesar 13 % dan sebagian kecil klas tinggi hanya 1 %. Dengan demikian setidaknya 60% lahan Kabupaten tidak memenuhi daya dukung Pangan. Sedangkan hanya 40% memenuhi daya dukung pangan.

Tabel 2.13
Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (P1)

No	Nama	Luas (Ha)	%
1	Sangat Rendah	47,37	27
2	Rendah	59,21	33
3	Sedang	45,99	26
4	Tinggi	1,485	1
5	Sangat Tinggi	22,72	13
	Jumlah	176,8	100

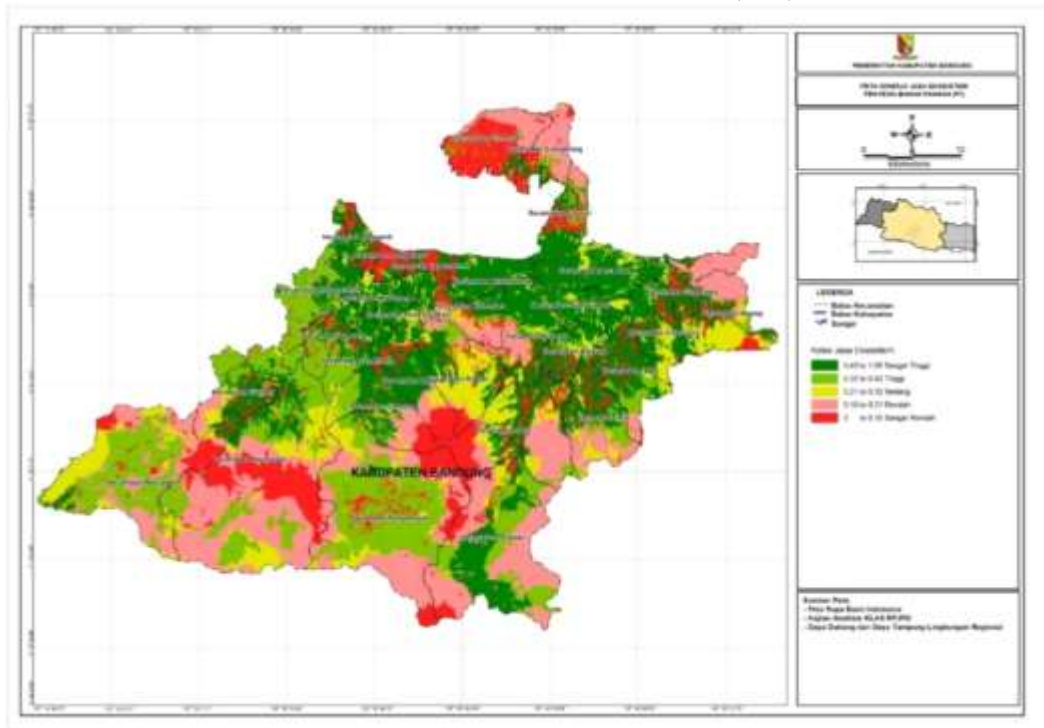
Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK dan KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

Gambar 2.11
Grafik Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan



Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK dan KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

Gambar 2.12
Peta Jasa Penyedia Pangan (P1)



Sumber: D3TLH Provinsi Jawa Barat, dan KLHS RPJMD Kab. Bandung 2021-2025

2) Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung tidak hanya strategis di level internal Kabupaten Bandung, tetapi juga dianggap strategis oleh pemerintah nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dalam level nasional, Kabupaten Bandung merupakan kawasan potensial dari sisi kepentingan ekonomi yang oleh pemerintah pusat telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Cekungan Bandung. Dengan adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak dikenal lagi Kawasan Strategis Propinsi, Kawasan Strategis Kabupaten. Hanya ada Kawasan Strategis Nasional.

Potensi unggulan Kabupaten Bandung salah satunya dapat dilihat dari sektor-sektor yang menjadi unggulan di wilayah Kabupaten

Bandung, seperti: sektor pertanian, pariwisata, perindustrian, potensi kawasan, potensi panas bumi dan sebagainya. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan pangan Jawa Barat maupun berkontribusi terhadap PDRB dan sumber mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil tinjauan ekonomi wilayah, sektor pertanian secara konsisten muncul dalam indikator sektor unggulan ekonomi wilayah (Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung, 2021). Dari sisi penggunaan lahan, kontribusi lahan pertanian di Kabupaten Bandung mencapai 111.161 Ha yang terdiri dari 31.106 Ha lahan sawah dan 80.055 Ha lahan pertanian bukan sawah.

Lokasi KSN yang berlokasi di Kabupaten Bandung adalah KSN Cekungan Bandung. Penetapan KSN didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2028. KSN Cekungan Bandung dipandang penting dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari KSN Cekungan Bandung, pengembangan Kabupaten Bandung dilakukan searah dengan arahan nasional untuk pengembangan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata dan perkebunan.

f. Potensi Pertanian

Berdasarkan peta potensi pertanian di Kabupaten Bandung, diketahui sebaran potensi pertanian paling banyak terdapat di bagian selatan berupa perkebunan dan buah-buahan, dan peternakan, kemudian bagian tenggara berupa perikanan dan hortikultura, serta bagian tengah berupa pangan dan biofarmaka.

Luas lahan pertanian kecamatan secara berurutan (2022) adalah Kecamatan Pasir Jambu, Pangalengan, Rancabali, Kertasari dan Pacet serta lima besar terluas lahan sawah adalah Kecamatan Rancaekek, Ciparay, Pacet, Solokan Jeruk dan Cimaung dan jika digabungkan antara lahan kering pertanian dan lahan sawah maka kecamatan yang terluas lahan pertaniannya adalah Kecamatan Pasirjambu, Pangalengan, Rancabali, Kertasari dan Pacet.

Tabel 2-14
Lahan Sawah Kabupaten Bandung

No	Kondisi Lahan Sawah	Luas (hektar)
1	Sawah Irigasi	27.948
2	Sawah Tadah Hujan	3.158
Total		31.106

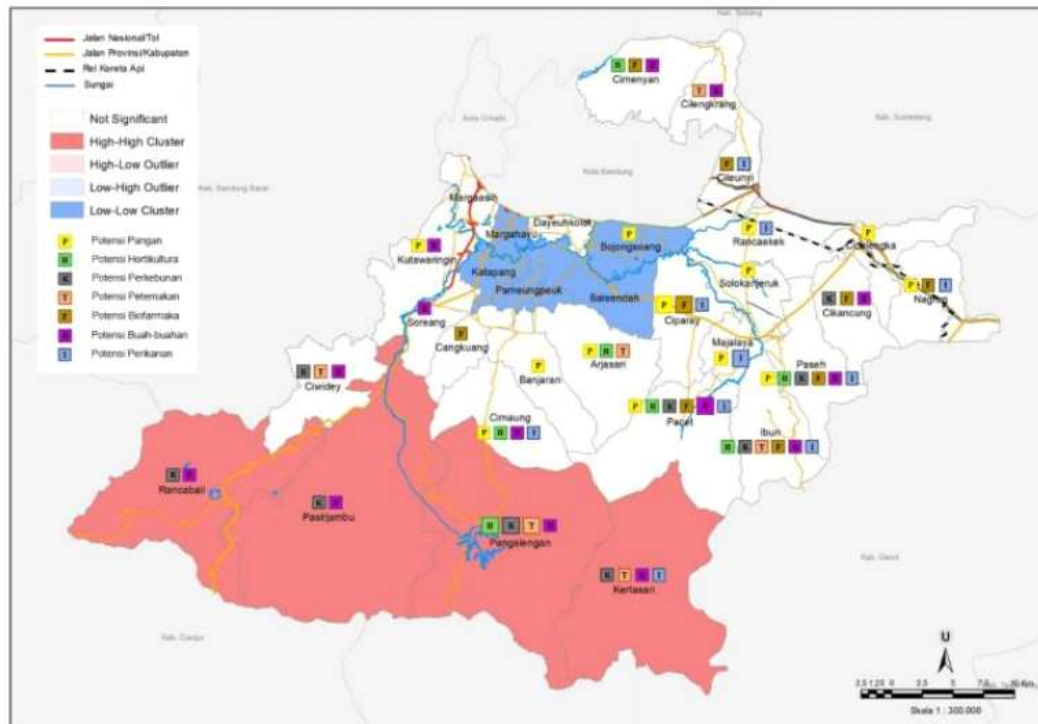
Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2023

Tabel 2-16
Kondisi Lahan Kering Kabupaten Bandung

No	Kondisi Lahan Kering	Luas(hektar)
1	Tegal/Kebun	25.822
2	Ladang/Huma	11.139
3	Perkebunan (PBS/PTP)	20.414
4	Hutan Rakyat	10.233
5	Pengembalaan/Padang Rumput	660
6	Hutan Negara	36.364
7	Sementara tidak diusahakan	7.547
8	Lainnya	4.240
Total		116.419

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Bandung, 2023

Gambar 2.13
Peta Sebaran Potensi Pertanian di Kabupaten Bandung



Sumber: Masterplan Ekonomi Kabupaten Bandung, 2021

Selain itu, sumber daya petani yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam membangun sektor pertanian yang tangguh. Upaya peningkatan kualitas sumber daya petani di Kabupaten Bandung selama ini ditempuh melalui pendekatan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang berjumlah 264 Gapoktan. Saat ini di Kabupaten Bandung terdapat 3.433 Kelompok Tani, yang terdiri dari:

- Kelompok Tani Pemula : 2.561 Kel.
- Kelompok Tani Lanjut : 769 Kel.
- Kelompok Tani Madya : 97 Kel.
- Kelompok Tani Utama : 6 Kel

Adapun Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung mencapai 6,97% pada tahun 2022. Pada tahun 2022, produksi tanaman sayuran di Kabupaten Bandung sebanyak 725.567 Ton dengan bawang merah menjadi komoditas dengan produksi terbesar yang mencapai 77.279 Ton yang ditopang oleh daerah sentra produksi yaitu Kecamatan Cimaung, Cimeyang, dan Arjasari. Sementara lima komoditas utama lainnya adalah kentang dengan produksi 72.366 Ton ditopang oleh daerah sentra produksi yaitu kecamatan Pangalengan dan Kertasari, tomat sebesar 66.159 Ton yang ditopang oleh daerah sentra produksi yaitu kecamatan Pangalengan dan Cimaung, cabai keriting sebesar 63.833 Ton yang ditopang oleh daerah sentra produksi yaitu kecamatan Cimaung dan Pangalengan, Labu Siam sebesar 59.884 Ton yang ditopang oleh daerah sentra produksi yaitu kecamatan Pangalengan dan Pasirjambu, dan Petsai/Sawi sebesar 53.509 Ton yang ditopang oleh daerah sentra produksi yaitu kecamatan Pangalengan dan Cangkuang. Sementara itu, produksi buah-buahan sebanyak 149.269 Ton dengan alpukat, Jeruk, Pisang, dan jambu menjadi komoditas dengan produksi terbesar, dan produksi tanaman biofarmaka sebanyak 1.544 Ton, sedangkan produksi tanaman hias cukup bervariasi menurut jenisnya. Produk pertanian unggulan Kabupaten Bandung lainnya adalah sektor perkebunan, terutama komoditi teh dan kopi. Dua komoditi ini merupakan salah satu produk ekspor unggulan, baik ekspor antar wilayah maupun ekspor ke luar negeri. Komoditi teh diproduksi oleh perkebunan rakyat, swasta dan negara. Pada tahun 2022, produksi teh di Kabupaten Bandung mencapai 3.177 ton lebih yang ditopang oleh daerah sentra produksi yaitu kecamatan Rancabali, Ciwidey, dan Pangalengan. Komoditi unggulan kedua dari perkebunan adalah kopi dengan tingkat produksi 8.276 ton

yang ditopang oleh daerah sentra produksi yaitu kecamatan Pangalengan, Paseh, dan Ciwidey.

Di sisi lain, perubahan komoditas unggulan di Kabupaten Bandung tak lepas dari langkah strategi integrasi pembangunan ekonomi dengan pengelolaan lingkungan. Pengembangan kawasan kopi sebagai salah pengembangan agro forestry. Luas pengembangan kopi saat ini di Kabupaten Bandung seluas 14.000 hektar dengan 8.183 ton produksi kopi arabika (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, 2022).

Selain dari komoditas-komoditas tersebut, terdapat potensi pengembangan komoditas seledri di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu, dan Rancabali. Nilai produksi komoditas seledri pada tahun 2022 mencapai 10.836 Ton dengan rata-rata produktivitas sebesar 18 ton/hektar. Hanya saja, pencacahan data pokok komoditas seledri pada Survey Statistik Pertanian Hortikultura Sayuran Buah Semusim (SPH-SBS) belum terintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Statistik Pertanian Hortikultura (SIM-SPH). Sehingga data pokok komoditas seledri belum terpublikasi secara resmi.

Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis ternak antara lain: sapi perah, sapi potong, domba dan unggas. Dari komoditi sapi perah, Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar baik level Jawa Barat maupun Nasional. Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Untuk memenuhi kebutuhan susu secara nasional, saat ini Indonesia masih

mengandalkan impor yang mencapai 70 % (mayoritas dalam bentuk olahan) dan sisanya (30 %) dari produksi dalam negeri, sehingga peluang pengembangan ternak sapi perah masih cukup tinggi. Beberapa wilayah pengembangan sapi perah di kabupaten Bandung diantaranya: Kecamatan Pangalengan, Pasirjambu, Kertasari, Ciwidey, Arjasari dan Cilengkrang Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar masih dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di lain pihak, bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini tentunya menjadi peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di kabupaten Bandung dan sekitarnya. Beberapa kecamatan yang pengembangan sapi potong di kabupaten Bandung ialah Cikancung, Cimaung, Cimenyan, dan beberapa kecamatan lainnya. Selain sapi potong, domba merupakan jenis ternak yang potensial dikembangkan. Memelihara ternak domba sudah menjadi kultur masyarakat petani/peternak di perdesaan. Ternak domba berfungsi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan bila diperlukan, di samping sebagai penghasil pupuk yang sangat diperlukan untuk bercocok tanam. Saat ini permintaan daging domba semakin meningkat, sementara ternak bakalan masih sulit didapat. Kecamatan pengembangan ternak domba di Kabupaten Bandung diantaranya sebagai berikut: Kecamatan Ibun, Paseh, Pacet, Majalaya, Solokanjeruk, Arjasari dan beberapa kecamatan lainnya di kabupaten Bandung.

1044 | **KEMASAN FARMASI**
 FARMASI - UIN KRISTIDARUS



Adapun potensi wisata di Kabupaten Bandung eksisting di kabupaten Bandung secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kawasan Pariwisata Alam, meliputi Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang, arung jeram lamajang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibum), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Paseh), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang);
- Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojongmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi);
- Kawasan Pariwisata Agro, meliputi:
 - ✓ Agrowisata Strawberry: Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibum, Kecamatan Paseh;

- ✓ Agrowisata Teh: Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan), Rancabali (Kecamatan Rancabali), Gambung (Kecamatan Pasirjambu);
- ✓ Agrowisata Sayuran: Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan;
- ✓ Agrowisata Herbal: Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey;
- Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pengalengan).

Kondisi sumber daya alam seperti terurai di atas mendukung terutama di wilayah Bandung Selatan sangat menjanjikan untuk dikembangkan menjadi daerah kunjungan wisata. Selama tahun 2021 tercatat 265.759 kunjungan pada akomodasi dan 1.590.407 kunjungan terhadap objek wisata di Kabupaten Bandung. Objek wisata alam masih menjadi primadona wisata Kabupaten Bandung. Sebagian besar lokasi wisata alam terdapat di wilayah selatan Kabupaten Bandung yaitu di kecamatan Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu dan Kertasari. Namun potensi wisata alam masih bisa dikembangkan di wilayah utara yaitu di kecamatan Cimenyan dan Cilengkrang. Dalam industri pariwisata salah satu komponen utama aktivitas pariwisata adalah akses dan akomodasi. Akses masuk ke Kabupaten Bandung semakin mudah dengan telah beroperasinya tol Soreang-Pasirkoja sejak Desember 2017. Adapun

hotel atau penginapan sebagai sarana akomodasi utama pariwisata telah banyak didirikan di Kabupaten Bandung. Terdapat banyak hotel dengan berbagai kelas dari hotel bintang lima hingga hotel melati atau penginapan jenis lainnya seperti *guest house* atau *home stay*. Fasilitas penunjang pariwisata lainnya seperti tempat makan atau restoran juga telah banyak beroperasi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data tahun 2020, setidaknya terdapat 258 rumah makan/restoran yang berperan dalam mendukung pariwisata di Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung juga memiliki 10 desa wisata yang dikembangkan di beberapa kecamatan dengan beberapa produk unggulan, diantaranya yaitu: Desa Alamendah Kecamatan Rancabali (aneka makanan olahan, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan), Desa Mekarsari/Gambung Kecamatan Pasirjambu (aneka makanan olahan stroberi, kerajinan tangan, peternakan, perikanan, pertanian dan seni budaya), Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey (peternakan kelinci, pertanian, perikanan dan kerajinan tangan), Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey (kerajinan tangan dan wisata agroedukasi), Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan (seni budaya, arung jeram, homestay, kuliner, pertanian, peternakan), Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah (seni budaya, seni lukis, dan kuliner tradisional), Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan (seni budaya dan peternakan), Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi (kampung seni, kuliner tradisional), Desa Laksana Kecamatan Ibun (Kawah Kamojang, seni budaya, kuliner tradisional, peternakan, pertanian dan perkebunan), dan Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey (seni budaya, kuliner tradisional, pertanian dan perkebunan).

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Bandung memiliki cukup banyak potensi wisata dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut.

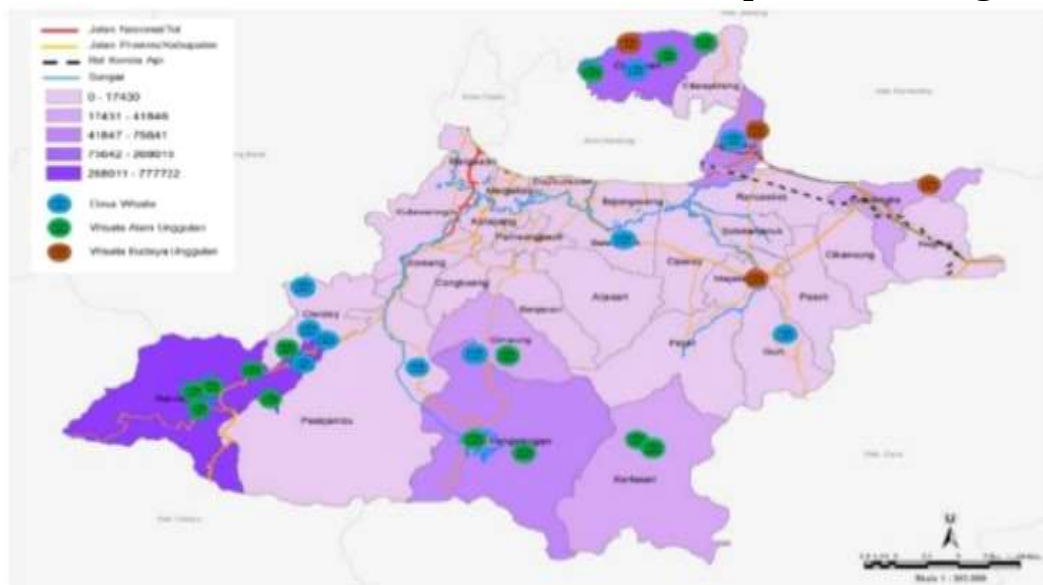
- a. Kawasan Pariwisata Alam, meliputi Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang, arung jeram lamajang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibum), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Paseh), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang);
- b. Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojongmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi);
- c. Kawasan Pariwisata Agro, meliputi: Agrowisata Strawberry: Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibum, Kecamatan Paseh; Agrowisata Teh: Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan), Rancabali

(Kecamatan Rancabali), Gambung (Kecamatan Pasirjambu);
Agrowisata Sayuran: Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan;
Agrowisata Herbal: Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey;

- d. Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pangalengan).

Gambar dibawah merupakan informasi spasial sebaran potensi wisata unggulan di Kabupaten Bandung, dimana wilayah yang memiliki daya tarik paling tinggi adalah Rancabali, Cimenyan, Pangalengan dan Cileunyi.

Gambar 2.15
Peta Sebaran Potensi Pariwisata di Kabupaten Bandung



Sumber: Masterplan Ekonomi Kabupaten Bandung, 2021

Tabel 2.16
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Ke Kabupaten Bandung Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan wisata (orang)	2.449.515	2.807.660	2.072.697	3.880.600	6.550.563

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2023

h. Potensi Panas Bumi

Kabupaten Bandung memiliki potensi energi panas bumi sebesar 2.711 megawatt (mW). Dari jumlah tersebut, yang sudah dimanfaatkan (ter-install) mencapai ± 697 mW masing-masing di wilayah Kamojang, Wayang Windu, Darajat, Patuha, dan Area Cibuni. Energi yang berasal dari Kabupaten Bandung sudah mampu menyuplai kebutuhan energi listrik Jawa-Madura-Bali dan ini akan terus berkembang dengan adanya perluasan di area Kamojang, Wayang Windu, dan Patuha dengan total rencana perluasan mencapai sekitar 360 MW.

Berdasarkan dokumen KBDA tahun 2022, Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah produksi listrik di Jawa Barat. Terdapat delapan titik lokasi pembangkit listrik di Kabupaten Bandung dengan PLTP Wayang Windu 1 dan 2 yang berlokasi di kecamatan Pangalengan sebagai produsen listrik terbesar yang mampu menghasilkan listrik 1,9 juta Kwh selama tahun 2020 atau 48 persen dari total produksi listrik Kabupaten Bandung. Berdasarkan informasi dari PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat yang tercantum dalam KBDA tahun 2022, pelanggan listrik PLN UP3 Majalaya terbagi ke dalam lima area. Kelima area

tersebut di antaranya adalah Majalaya, Soreang, Rancaekek, Banjaran, dan Baleendah. Pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah pelanggan listrik di bulan Mei dan Oktober. Penurunan ini terjadi bersamaan di kelima area PLN UP3 Majalaya tersebut.

Tabel 2.17
Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung Tahun 2022

No	WKP Panas Bumi	Pemegang WKP	Lapangan	Pengembang	Potensi	Kapasitas Terpasang
			PLTP		(MW)	(MW)
1	Pangalengan	PT Pertamina Geothermal Energy	Wayang Windu	PT. Star Energy	400	227
2	Pasirjambu	PT Geo Dipa Energi	Patuha	PT Geo Dipa Energi	706	50
3	Ibun	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy	855	240
4	Kertasari	PT Pertamina Geothermal Energy	Darajat	PT. Star Energy	610	270
5	Cibuni	PT Koperasi Jasa Keahlian Teknosa (KKT)	Cibuni	PT Koperasi Jasa Keahlian Teknosa (KKT)	140	0
Jumlah					2711	787

Sumber: Susenas/Bappenas 2022

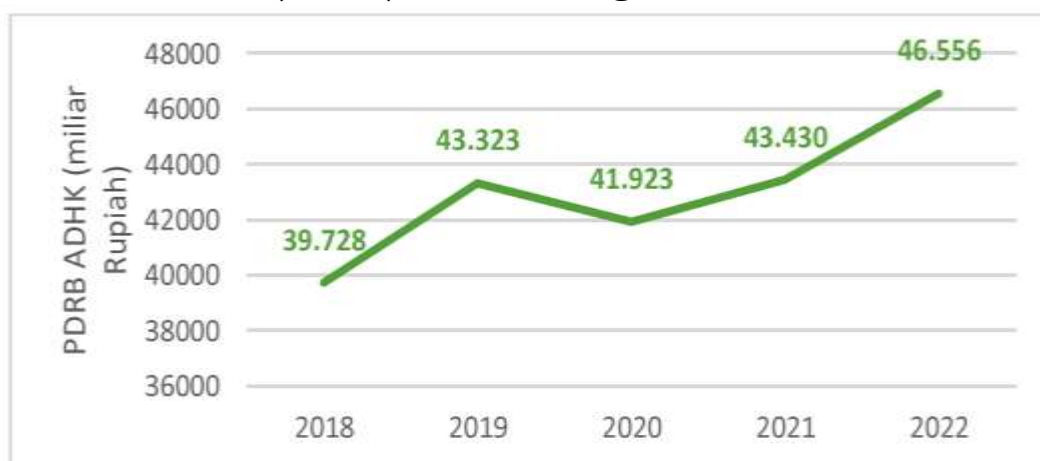
Potensi Panas Bumi di Kabupaten Bandung sebesar 2.711 MW, sementara yang telah terinstall sebesar 787 MW. Oleh karena itu terdapat potensi pengelolaan Panas Bumi yang besar di Kabupaten Bandung untuk mencapai output optimal melalui investasi. Potensi Investasi dalam sektor panas bumi di Kabupaten Bandung sebesar +/- 1.924 MW.

i. Potensi Industri

Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri, yang terdiri dari industri kecil, industri menengah dan industri besar. Menurut BPS Kabupaten Bandung dalam KBDA 2020 perusahaan industri besar dan sedang yang tercatat dan dalam kondisi aktif pada tahun pada tahun 2019 sebanyak 1.564 perusahaan yang terdiri dari

perusahaan besar dan sedang. Jumlah ini belum termasuk industri dengan skala kecil atau industri rumah tangga. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, penambahan ini bisa dari industri yang baru berdiri maupun dari baru masuk daftar. Kontribusi PDRB untuk lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami peningkatan dari 50,94 persen di tahun 2010 menjadi 53,67 persen di tahun 2022. Laju pertumbuhan kategori Industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan kategori Industri di Kabupaten Bandung tahun 2022 mencapai 7,20 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 3,60 persen. Kategori industri Kabupaten Bandung mempunyai peran yang sangat besar tidak hanya di Kabupaten Bandung namun juga di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.16
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Industri Pengolahan 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2023

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diidentifikasi bahwa berdasarkan lokasi geografi dan potensi pengembangan wilayah, Kabupaten Bandung potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Keterkaitan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan wilayah tersebut sejalan mengikuti arahan kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut.

Gambar 2.17
Kerangka Pemikiran Karakteristik Lokasi Dan Wilayah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

j. Realisasi Investasi

Peningkatan nilai realisasi terutama kenaikan PMDN merupakan dampak dari gencarnya promosi investasi, selain itu juga faktor letak geografis, infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, SDM Kabupaten Bandung lebih unggul, banyaknya kawasan industri dan nilai ICOR Kabupaten Bandung yang lebih rendah dari rata-rata Nasional. Peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ketahun. Hal ini menandakan kualitas pelayanan

perizinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar. Indikator lain yang menggambarkan kinerja bidang penanaman modal yakni Realisasi Investasi terhadap serapan Tenaga Kerja. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, serapan tenaga kerja pada tahun 2023 merupakan paling tinggi yaitu 150.408 orang dengan realisasi investasi sebesar 30,35T. Hal ini menggambarkan setiap 1 Triliun realisasi investasi menyerap tenaga kerja 4.955 orang. Kondisi ini merupakan sinyal ada ketidaksesuaian di lapangan antara tenaga kerja yang dibutuhkan dengan tenaga kerja yang tersedia, sebab investasinya merupakan padat modal dan pada teknologi.

Tabel 2.18
Realisasi Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi Investasi (Triliun) (Rp)	23,34	26,30	29,00	29,47	30,35
Tenaga Kerja (Jiwa)	47.297	50.246	60.432	127.997	150.408
Penyerapan Tenaga Kerja per 1 Triliun (Rp)	2.027	1.910	2.084	4.343	4.955

Sumber: LKPM 2023, diolah

Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2023, dari 10 sektor usaha 3 penyumbang realisasi investasi terbesar adalah Sektor Perumahan, Kawasan industry & perkantoran, Sektor Jasa Lainnya, dan Sektor Industri Makanan. Namun sektor tersebut ada yang tidak termasuk kedalam sektor usaha dengan rasio penyerapan tenaga kerja tinggi. Penyerapan tenaga kerja tinggi 3 sektor teratas yaitu sektor Perdagangan & reparasi, Sektor Industri Makanan, dan Sektor Industri Tekstil. Dari data tersebut seperti yang tercantum pada tabel di bawah, menggambarkan bahwa sektor usaha yang penyerapan tenaga kerja tertinggi malah secara

realisasi investasinya rendah. Sedangkan yang realisasi investasi tinggi, maka tenaga kerjanya harus yang mempunyai kompetensi tertentu.

Tabel 2.19
Sektor Usaha Dengan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Kabupaten Bandung Tahun 2023

Sektor Usaha	Realisasi Investasi (T) (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)	Tenaga Kerja (per RP. 1T (Orang)
Perdagangan & reparasi	2,40	42.003	17.522
Industri makanan	4,51	35.263	7.815
Industri tekstil	4,45	30.696	6.894
Jasa Lainnya	4,52	21.656	4.792
Industri lainnya	0,95	2.962	3.105
Perumahan, kawasan industri & perkantoran	8,96	2.791	311
Tanaman Pangan & Perkebunan	0,06	2.307	36.895
Industri barang dari kulit & alas kaki	0,13	1.791	14.058
Hotel & restoran	0,49	1.740	3.553
Industri Logam, mesin & elektronika	0,13	1.349	10.719

Sumber: LKPM 2023, diolah

Ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang terserap, pada tahun 2019, jumlah kebutuhan tenaga kerja mencapai 47.283 orang dengan nilai investasi Rp. 23.337.742.992.779,- dan total proyek 7.095. Pada periode 2019-2023 pola nilai investasi dan jumlah kebutuhan tenaga kerja cenderung stabil. Anomali terjadi pada tahun 2020 dan 2021 di mana jumlah investasi yang tinggi tidak mampu meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Pada tahun 2020, investasi senilai Rp. 26.300.207.834.856,- dengan jumlah proyek 6.164 hanya membutuhkan tenaga kerja sebanyak 50.213 orang.

Demikian juga di tahun 2021 di mana investasi senilai Rp. 28.999.969.698.490,- dengan jumlah proyek 6.359 hanya mampu membutuhkan tenaga kerja sebanyak 60.307 orang. Pola investasi padat karya dan padat modal sangat menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja tersebut. Dewasa ini dengan pertumbuhan teknologi informasi dan digitalisasi, arah investasi lebih ke arah padat modal dengan keterlibatan SDM tenaga kerja yang minim.

Tabel 2.20
Realisasi Investasi Menurut
Jumlah Proyek dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	Investasi	Proyek	Kebutuhan TA
2019	23.337.742.992.779	7.095	47.283
2020	26.300.207.834.856	6.164	50.213
2021	28.999.969.698.490	6.359	60.307
2022	29.470.459.885.913	26.505	127.888
2023	30.354.574.210.736	41.716	150.305

2.3. PENDUDUK USIA KERJA

Penduduk usia kerja (*the working age population*) didefinisikan oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yaitu penduduk yang berusia 15 hingga 64 tahun (OECD, 2023). Menurut ILO (2022) dan *World Bank* (2022) penduduk usia kerja yaitu “*Who are ages 15 and older are generally considered the working-age population*”, artinya orang-orang yang berusia 15 tahun atau lebih yang secara umum dianggap sebagai penduduk usia kerja. Indonesia sebagai anggota ILO menggunakan pengertian penduduk usia kerja (PUK) sesuai dengan definisi ILO yaitu penduduk berumur 15 tahun atau lebih (Badan Pusat Statistik, 2023). Penduduk usia kerja merupakan salah satu indikator

penting untuk mengukur, menganalisis hingga memproyeksikan kondisi ketenagakerjaan. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Penduduk usia kerja (PUK) di Kabupaten Bandung selama periode tahun 2019-2023 mengalami penambahan sebanyak 68.301 orang, dari 2.731.785 orang pada tahun 2019 menjadi 2.800.086 orang pada tahun 2023. PUK dikelompokkan dengan beberapa karakteristik yaitu golongan umur, tingkat pendidikan, dan kabupaten/kota.

1. Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

PUK menurut golongan umur di Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2023, tercatat golongan umur tertinggi pada tahun 2019 diraih golongan umur 15-19 tahun sebanyak 323.195 orang dan bertambah sebanyak 9.871 orang menjadi 333.066 orang pada tahun 2023. Golongan umur tertinggi kedua pada tahun 2019 yaitu golongan umur 60+ tahun sebanyak 312.802 orang dan bertambah sebanyak 45.626 orang menjadi 358.428 orang pada tahun 2023.

Tabel 2.21
Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur
Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023 (Orang)

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	323.195	324.346	324.202	323.897	333.066
20-24	312.929	312.226	312.245	311.970	312.592
25-29	314.518	321.918	323.033	323.945	300.689
30-34	310.270	319.635	321.423	323.154	287.318
35-39	291.638	293.803	295.980	297.501	276.077
40-44	269.036	259.933	263.852	267.945	278.511
45-49	237.529	233.696	237.694	241.202	260.599
50-54	196.752	196.637	202.553	208.327	219.343

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
55-59	163.116	165.330	171.303	177.552	173.463
60+	312.802	333.725	350.091	366.876	358.428
JUMLAH	2.731.785	2.761.249	2.802.376	2.842.369	2.800.086

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

Data Tabel diatas menunjukkan jumlah PUK terendah tahun 2019 terdapat pada golongan umur 55-59 tahun sebanyak 163.116 orang, namun mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu sebanyak 10.347 orang menjadi 173.463 orang pada tahun 2023. Golongan umur terendah kedua pada tahun 2019 yaitu golongan umur 50-54 tahun sebanyak 196.752 orang dan bertambah sebanyak 22.591 orang menjadi 219.343 orang pada tahun 2023.

Selain itu meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan, diantaranya Puskesmas keliling, Balai Pengobatan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang memudahkan masyarakat dalam rangka menjaga kesehatan. Perkembangan usia harapan hidup di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga tahun 2023 menjadi sebesar 74,03 persen.

Rata-rata PUK menurut golongan umur di Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2023 tertinggi yaitu golongan umur 60+ tahun yaitu sebanyak 344.384 orang (12,35 persen). Kedua pada golongan umur 15-19 tahun rata-rata sebanyak 325.741 orang (11,69 persen), dan ketiga pada golongan umur 25-29 tahun rata-rata sebanyak 316.821 orang (11,37 persen).

2. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Secara absolut PUK menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung periode 2019-2023 didominasi oleh kelompok pendidikan SD ke bawah yaitu di atas 900 ribu orang. Kelompok pendidikan SD

ke bawah menjadi penyumbang terbesar dari struktur PUK berdasarkan pendidikan.

Tabel 2.22
Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
≤SD	997.848	958.226	943.778	854.433	943.687
SMTp	760.876	792.494	790.263	743.711	763.882
SMTA Umum	533.589	562.624	579.128	682.991	641.360
SMTA Kejuruan	251.700	244.530	283.946	272.504	259.035
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	48.965	49.214	47.639	66.313	44.009
UNIVERSITAS	138.807	154.161	157.622	222.417	148.113
JUMLAH	2.731.785	2.761.249	2.802.376	2.842.369	2.800.086

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

Data Tabel diatas menunjukkan selama tahun 2019-2023 tercatat PUK tingkat pendidikan SD ke bawah sebanyak 997.848 orang menurun pada tahun 2023 menjadi 943.687 orang.

Ditinjau dari sisi tingkat pertambahan PUK menurut tingkat pendidikan selama periode tahun 2019-2023, menunjukkan bahwa lulusan SMTA Umum mengalami peningkatan yang tertinggi sebesar 21,52 persen, dan diikuti lulusan SMTA Kejuruan sebesar 9,41 persen. Sedangkan pertambahan PUK lulusan SMP cukup rendah sebesar 27,63 persen, dan PUK lulusan Diploma I/II/III mengalami penurunan sebesar 1,84 persen.

Rendahnya tingkat pendidikan Diploma di Kabupaten Bandung disebabkan kecenderungan kebutuhan di dunia kerja bagi tingkat pendidikan ini semakin sedikit dan terdapatnya kesadaran

masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari tingkat pendidikan Diploma ke Universitas yang tidak mengenal usia.

Sementara itu, tingkat pendidikan Universitas pada periode tahun 2019-2023 secara jumlah berfluktuasi, dimana memiliki kecondongan kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019 sebanyak 2.731.785 orang meningkat menjadi sebanyak 2.761.249 orang pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 2.800.086 orang pada tahun 2023. Kondisi ini menjadi kabar baik bagi di Kabupaten Bandung, karena menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas PUK di Kabupaten Bandung.

3. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

Penduduk usia kerja (PUK) menurut jenis kelamin di Kabupaten Bandung selama periode tahun 2019-2023 jumlah laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah PUK perempuan. Pada tahun 2019, PUK laki-laki tercatat sebanyak 1.379.079 orang dan naik sebesar 43.509 orang pada tahun 2023 menjadi 1.422.588 orang.

Tabel 2.23
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	1.379.079	1.397.358	1.417.773	1.437.701	1.422.588
Perempuan	1.352.706	1.363.891	1.384.603	1.404.668	1.377.498
JUMLAH	2.731.785	2.761.249	2.802.376	2.842.369	2.800.086

Sedangkan jumlah PUK perempuan meningkat cukup signifikan pada periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, PUK perempuan tercatat sebanyak 1.352.706 orang dan meningkat sebesar 24.792 orang pada tahun 2023 menjadi 1.377.498 orang.

4. Penduduk Usia Kerja Menurut Perdesaan/Perkotaan

Penduduk usia kerja (PUK) menurut Perdesaan/Perkotaan di Kabupaten Bandung selama periode tahun 2019-2023 terbanyak pada tahun 2022 yaitu sebesar 2.842.369 orang, dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2.800.086 orang.

Tabel 2.24
Penduduk Usia Kerja Menurut Perdesaan dan Perkotaan
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

DAERAH	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perkotaan	2.626.020	2.686.218	2.766.489	1.437.701	2.770.185
Perdesaan	105.765	75.031	35.887	1.404.668	29.901
JUMLAH	2.731.785	2.761.249	2.802.376	2.842.369	2.800.086

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas (Badan Pusat Statistik, 2023). TPAK merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi pasar kerja di suatu wilayah. TPAK dihasilkan dari Angkatan Kerja (AK) yang terdiri Penduduk Yang Bekerja (PYB) dan Penganggur, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja, lalu dipresentasikan. TPAK memiliki beberapa karakteristik yang digunakan untuk kebutuhan analisis agar dapat mengetahui gambaran mengenai masing-masing kondisi berdasarkan karakteristiknya seperti golongan umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi akan dihimpun pada TPAK.

Selama periode tahun 2019-2023, TPAK di Kabupaten Bandung bervariasi berdasarkan karakteristiknya. Secara keseluruhan, TPAK di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sebesar 1,72 poin dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 tercatat TPAK di Kabupaten Bandung sebesar 65,38 persen meningkat menjadi 67,10 persen pada tahun 2023.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut golongan umur di Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2023 tertinggi terdapat pada golongan umur kisaran 35-39 tahun sebesar 79,48 persen pada tahun 2019, sementara pada tahun 2023 TPAK tertinggi terdapat pada golongan umur 30-34 tahun sebesar 79,08 persen.

Tabel 2.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(persen)

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	29,53	25,17	28,98	29,97	34,27
20-24	68,03	66,07	70,67	64,08	75,89
25-29	67,72	64,75	70,81	70,87	75,02
30-34	77,79	72,87	70,53	76,19	79,08
35-39	79,48	77,00	78,80	71,70	71,61
40-44	78,04	75,64	82,93	79,59	79,06
45-49	75,13	69,94	75,19	74,94	78,27
50-54	72,51	69,79	71,86	76,40	74,64
55-59	73,20	69,33	62,77	61,01	66,95
60+	45,14	44,92	48,86	43,94	48,22
JUMLAH	65,38	62,20	65,12	63,64	67,10

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2019-2023, diolah

TPAK untuk golongan umur 55 tahun ke atas besarnya mulai menurun, kondisi ini dipengaruhi dengan bertambahnya umur

maka produktivitas akan menurun dan sebagian orang akan mengambil waktu untuk menikmati hidup (leisure).

TPAK menurut golongan umur di Kabupaten Bandung terendah ditempati oleh golongan umur 15-19 tahun, hal ini patut dibanggakan karena golongan umur ini merupakan usia sekolah sehingga sewajarnya mereka masih berada di bangku sekolah untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, alasan rendahnya TPAK golongan umur 15-19 tahun bukanlah tanpa sebab, hal ini dapat terjadi karena program Wajib Belajar 12 tahun dan kecondongan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya cukup tinggi di Kabupaten Bandung.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung selama periode tahun 2019-2023 didominasi oleh lulusan perguruan tinggi (Universitas) yaitu diatas 73 persen, Pada tahun 2019 TPAK tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan Universitas sebesar 81,31 persen hingga berlanjut di tahun 2023 sebesar 82,45 persen, selisih jauh dengan tingkat pendidikan lainnya termasuk Diploma I/II/III maupun SMTA Kejuruan.

Tabel 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(persen)

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
≤SD	64,39	60,36	62,67	61,83	64,84
SMTp	57,06	57,16	58,98	53,66	57,40
SMTA Umum	70,23	63,60	66,74	66,34	72,03
SMTA Kejuruan	75,48	73,20	76,72	79,29	81,78
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	65,10	69,56	74,64	74,55	73,72
UNIVERSITAS	81,31	74,52	80,85	73,20	82,45
JUMLAH	65,38	62,20	65,12	63,64	67,10

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2019-2023, diolah

Apabila dilihat secara seksama pergerakan TPAK, menunjukkan bahwa seluruh TPAK menurut pendidikan selama periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Angka TPAK menurut pendidikan tertinggi terdapat pada pendidikan Universitas. Sedangkan TPAK yang terendah sepanjang periode tersebut terdapat pada pendidikan SMP. Apabila dilihat TPAK yang berpendidikan SMA Kejuruan senantiasa lebih besar dibanding dengan TPAK berpendidikan SMA umum.

Tingginya TPAK SMA Kejuruan tidak serta merta menunjukkan jumlah angkatan kerja berpendidikan SMA Kejuruan lebih besar dibandingkan SMA Umum, namun minat PUK yang berpendidikan SMA Kejuruan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi lebih besar dibandingkan PUK lulusan SMA Umum.

Namun menjadi catatan tersendiri bagi TPAK dengan tingkat pendidikan maksimal SD. Selama periode tahun 2019-2023, TPAK

berpendidikan maksimal SD justru mengalami fluktuasi yaitu dari 64,39 persen di tahun 2019, meningkat menjadi 64,84 persen pada tahun 2023. Dengan perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIKA) yang semakin menuntut keahlian dan keterampilan tinggi, tentu nantinya harus ada penyiapan tenaga kerja dari sisi supply yang harus diperhatikan lebih oleh pemerintah di Kabupaten Bandung.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut jenis kelamin periode tahun 2019-2023 menunjukkan TPAK laki-laki berfluktuasi namun mengalami sedikit peningkatan. Sementara TPAK perempuan pun sama mengalami fluktuasi selama 5 tahun. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya keinginan perempuan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi semakin berkembangnya teknologi, sehingga membuka peluang bagi perempuan untuk berperan ganda menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga sekaligus aktif dengan kegiatan ekonomi perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja perempuan.

Tabel 2.27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(persen)

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	82,31	79,77	83,08	81,11	84,44
Perempuan	48,13	44,19	46,73	45,76	49,19
JUMLAH	65,38	62,20	65,12	63,64	67,10

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2019-2023, diolah

Tingginya peningkatan TPAK perempuan di Kabupaten Bandung menunjukkan semakin terbukanya kesempatan kerja. Namun demikian kesenjangan antara TPAK laki-laki dan perempuan menjadi isu di Kabupaten Bandung bahkan juga tingkat Nasional maupun Internasional. Isu mengenai kesenjangan jenis kelamin di dunia kerja disebut gender gap merupakan isu global yang diupayakan lebih terkondisikan. Proporsional kesenjangan jenis kelamin harus diatasi agar tidak terus mengalami peningkatan yang berdampak pada kondisi ketenagakerjaan.

Gender gap adalah persoalan yang dibahas di dunia internasional dan bersama-sama dalam upaya mengurangi kesenjangan tersebut. Pada tahun 2014, Pemimpin G20 berkomitmen di Brisbane untuk mengurangi kesenjangan dalam TPAK antara laki-laki dan perempuan sebesar 25,00 persen pada tahun 2025 dengan tujuan membawa 100 juta perempuan ke pasar tenaga kerja untuk meningkatkan pertumbuhan global dan inklusif serta mengurangi kemiskinan dan ketidaksamaan (G20 Italia, 2021). Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan langkah-langkah kebijakan dalam the G20 Roadmap Towards and Beyond the Brisbane Target yakni (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas lapangan kerja perempuan; (2) memastikan kesempatan yang sama dan mencapai hasil yang lebih baik di pasar tenaga kerja; (3) mempromosikan pemerataan perempuan dan laki-laki di seluruh sektor dan pekerjaan; (4) mengatasi kesenjangan upah jenis kelamin; (5) mempromosikan distribusi pekerjaan berbayar dan tidak berbayar yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki; (6) mengatasi diskriminasi dan stereotip jenis kelamin di pasar tenaga kerja.

Gender gap TPAK laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2023 mengalami penurunan secara fluktuatif. Pada tahun 2019 terdapat gender gap sebesar 34,18 persen, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi sebesar 35,58 persen, terus naik pada tahun 2021 menjadi 36,35 persen, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 35,35 persen, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 35,25 persen.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurut Perkotaan/Perdesaan di Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dan tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 67,10 persen. Pada tahun 2019 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perkotaan dan sama-sama mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Tabel 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Perkotaan/Perdesaan
Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(persen)

DAERAH	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perkotaan	65,23	62,08	65,09	81,11	66,95
Perdesaan	69,12	66,16	67,85	45,76	80,25
JUMLAH	65,38	62,20	65,12	63,64	67,10

Sumber : BPS Sakernas Agustus Tahun 2019-2023, diolah

2.5. Angkatan Kerja

Angkatan kerja (AK) merupakan kategori bagi penduduk usia kerja (PUK) yang bekerja dan menganggur. Korelasi antara penduduk usia kerja dengan angkatan kerja adalah peningkatan jumlah yang terjadi pada penduduk usia kerja akan mempengaruhi peningkatan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja mampu memberikan gambaran tenaga kerja di suatu wilayah dengan melihat karakteristiknya seperti menurut golongan umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.

Angkatan kerja Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2023 mengalami pertambahan cukup tinggi. Pada tahun 2019 tercatat jumlah angkatan kerja Kabupaten Bandung sebanyak 1.786.162 orang meningkat sebesar 92.595 orang pada tahun 2023 menjadi 1.878.757 orang. Khusus pada tahun 2023, terlihat bahwa angkatan kerja berdasarkan karakteristik menurut golongan umur tertinggi pada golongan umur 20-24 tahun, menurut tingkat pendidikan tertinggi adalah tamatan SD ke bawah, dan menurut jenis kelamin didominasi oleh laki-laki.

1. Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Melihat kondisi eksisting angkatan kerja selama periode tahun 2019-2023 yang ada di Kabupaten Bandung, cukup menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena jumlah angkatan kerja di kelompok usia sekolah yaitu pada golongan umur 15-19 tahun jumlahnya mengalami peningkatan. pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 95.431 orang meningkat menjadi 114.140 orang pada tahun 2023.

Lebih lanjut, dilihat perkembangan di setiap golongan umur menunjukkan terjadi peningkatan di semua kelompok kecuali golongan umur 35-39 tahun. Dengan melihat perkembangan di angkatan kerja di semua golongan umur yang merupakan usia produktif maka tentunya diharapkan mampu berkontribusi serta berperan aktif di dalam pasar kerja baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Peran aktif pemerintah perlu dilakukan secara masif karena jumlah angkatan kerja selalu meningkat maka perlu diimbangi dengan peningkatan peluang kerja agar tidak menjadi beban baru bagi pemerintah yaitu usia produktif namun tidak termanfaatkan alias menjadi penganggur.

Tabel 2.29
Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	95.431	81.622	93.969	97.085	114.140
20-24	212.892	206.298	220.648	199.913	237.239
25-29	213.005	208.456	228.742	229.578	225.576
30-34	241.348	232.923	226.703	246.223	227.221
35-39	231.784	226.242	233.225	213.299	197.693
40-44	209.952	196.623	218.800	213.248	220.198
45-49	178.460	163.444	178.717	180.763	203.983
50-54	142.671	137.225	145.552	159.165	163.715
55-59	119.407	114.627	107.520	108.318	116.141
60+	141.212	149.916	171.051	161.207	172.851
JUMLAH	1.786.162	1.717.376	1.824.927	1.808.799	1.878.757

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

Data Tabel diatas menunjukkan pertambahan angkatan kerja di Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2023 menurut golongan umur tertinggi pada golongan umur 60 tahun keatas sebesar 34,17

persen, diikuti golongan umur 45-49 tahun sebesar 27,56 persen, dan berikutnya golongan umur 20-24 tahun sebesar 26,29 persen.

2. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Proporsi angkatan kerja menurut pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah serius Kabupaten Bandung. Angkatan kerja (AK) berpendidikan rendah masih mendominasi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data Sakernas tahun 2019-2023 diperoleh bahwa angkatan kerja berpendidikan rendah (SD ke bawah dan SMP) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja pada tingkat pendidikan rendah sebanyak 642.495 orang dan menurun menjadi 611.898 orang di tahun 2023, atau menurun 30.597 orang dalam lima tahun. Penurunan angkatan kerja yang berpendidikan rendah ini signifikan jika dikaitkan dengan peningkatan angkatan kerja dilihat dari golongan umur, dimana peningkatan terbesar justru terjadi di kelompok usia dewasa.

Sedangkan pada pendidikan menengah (SMA Umum dan SMA Kejuruan) juga mengalami peningkatan dari 1.076.682 orang pada tahun 2019 menjadi 673.835 orang di tahun 2023.

Ketersediaan infrastruktur pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah yang semakin merata di Kabupaten Bandung menjadi salah satu indikasi positif terhadap kemajuan dunia pendidikan. Pemberian layanan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat berupa program wajib belajar pendidikan dasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2021 – 2026 pada bidang pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatnya aksesibilitas

dan mutu Pendidikan bagi penduduk usia 16-18 tahun (Sekolah Menengah) dengan harapan tidak ada siswa yang putus sekolah.

Tabel 2.30
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
≤SD	642.495	578.384	591.458	528.330	611.898
SMP	434.187	453.015	466.119	399.088	438.468
SMTA Umum	374.765	357.854	386.515	453.085	461.992
SMTA Kejuruan	189.971	179.003	217.833	216.058	211.843
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	31.876	34.232	35.558	49.435	32.442
UNIVERSITAS	112.868	114.888	127.444	162.803	122.114
JUMLAH	1.786.162	1.717.376	1.824.927	1.808.799	1.878.757

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

Tren peningkatan juga ditunjukkan oleh angkatan kerja yang berpendidikan tinggi tahun 2019 sebanyak 112.868 orang dan di tahun 2023 bertambah menjadi 122.114. Peningkatan ini menunjukkan hal yang positif karena kualitas angkatan kerja di Kabupaten Bandung semakin meningkat, namun tidak demikian halnya dengan lulusan DI/II/III jumlahnya mengalami fluktuasi. Lokasi geografis Kabupaten Bandung yang dekat dengan ibukota negara menjadikan Kabupaten Bandung memiliki banyak alternatif untuk pendidikan tinggi ini.

3. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Bandung selama periode tahun 2019-2023 masih didominasi oleh laki-laki. Jumlah angkatan kerja laki-laki di tahun 2019 sebanyak 1.135.074 orang dan pada tahun 2023 mencapai sebanyak

1.201.220 orang. Terjadi pertambahan sebanyak 66.146 orang di periode tersebut. meningkatnya jumlah angkatan kerja laki-laki sesuai dengan kodratnya sebagai kepala rumah tangga maka laki-laki akan berusaha tanggung jawab dalam pemenuhan kehidupan keluarga sehingga mengharuskan aktif dalam kegiatan ekonomi untuk mencari nafkah.

Tabel 2.31
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

DAERAH	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	1.135.074	1.114.704	1.177.942	1.166.083	1.201.220
Perempuan	651.088	602.672	646.985	642.716	677.537
JUMLAH	1.786.162	1.717.376	1.824.927	1.808.799	1.878.757

4. Angkatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan

Angkatan Kerja (AK) menurut Perkotaan/Perdesaan di Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dan tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.854.761 orang. Pada tahun 2019 sebesar 1.713.061 Angkatan Kerja (AK) Perkotaan dan Perdesaan sama-sama mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Tabel 2.32
Angkatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

DAERAH	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perkotaan	1.713.061	1.667.735	1.800.578	1.166.083	1.854.761
Perdesaan	73.101	49.641	24.349	642.716	23.996
JUMLAH	1.786.162	1.717.376	1.824.927	1.808.799	1.878.757

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

2.6. Penduduk Yang Bekerja

Penduduk yang bekerja (PYB) merupakan salah satu bagian dari angkatan kerja, sehingga indikator ini akan memberikan informasi mengenai jumlah dan persentase pekerja yang terdapat pada angkatan kerja. Penduduk yang bekerja ini adalah penduduk yang telah memiliki pekerjaan baik pekerjaan formal maupun informal. Penduduk yang bekerja akan dikategorikan berdasarkan beberapa karakteristik yakni menurut lapangan usaha, golongan umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status pekerjaan utama, jabatan, dan jam kerja.

Kondisi penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 menurut lapangan usaha tertinggi adalah sektor Industri Pengolahan, untuk golongan umur mayoritas adalah golongan umur 35-39 tahun dan tingkat pendidikan tertinggi adalah SMP, sedangkan berdasarkan jenis kelamin yakni laki-laki dengan status pekerjaan utama tertinggi adalah buruh/karyawan/pegawai, serta jabatan tertinggi sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerjaan kasar, lainnya dengan rata-rata jam kerja lebih dari 45 jam selama seminggu.

1. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Karakteristik ini akan memberikan gambaran jumlah pekerja pada sektor lapangan usaha. Hal ini akan membantu mengetahui sektor mana saja yang memberikan banyak penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2023. Seperti diketahui bahwa terdapat 3 sektor yang berkontribusi besar pada PDRB Kabupaten Bandung selama periode tahun 2019-2023 adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor pertanian, kehutanan

dan perikanan. Sepanjang tahun 2019-2023 sektor industri pengolahan yang mampu memberikan penyerapan terbesar pada tenaga kerja di Kabupaten Bandung. Ketiga lapangan usaha tersebut menjadi sandaran utama PDRB Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2019, sektor Industri Pengolahan menyerap tenaga kerja sebanyak 580.007 orang (34,36%, kemudian menurun menjadi sebanyak 500.626 orang (28,50%) pada tahun 2023 atau setidaknya menurun sebanyak 79.381 orang. Tingginya penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri Pengolahan bukanlah tanpa sebab, seperti diketahui Kabupaten Bandung banyak memiliki Kawasan Industri yang pendistribusiannya tidak hanya di Kabupaten Bandung namun juga antarprovinsi bahkan diekspor dipasarkan ke luar negeri. Sehingga sektor perdagangan ini juga mendukung keberadaan kawasan industri di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Terkait penggunaan tenaga kerja di sektor industri dapat dilihat terdapat kawasan industri diantaranya EJIB.

Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terkecil yakni 0,32 persen (2.386 orang) pada tahun 2019 dan sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen (6.066 orang) pada tahun 2023. Perkembangan sektor pengadaan listrik dan gas kurun waktu tahun 2019-2023 bertambah sebanyak 3.680 orang dengan pertambahan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,20 poin. Perkembangan sektor pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Bandung belum begitu signifikan karena belum menjadi sektor unggulan (prima), namun masuk dalam klasifikasi sektor berkembang yakni sektor yang sedang mengalami peningkatan.

Tabel 2.33
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	147.181	205.749	221.212	119.514	119.354
B Pertambangan dan Penggalan	5.437	2.013	3.253	6.909	2.311
C Industri Pengolahan	580.007	464.339	474.935	505.534	500.626
D Pengadaan Listrik dan Gas	2.386	7.884	7.403	9.168	6.066
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.659	14.271	16.881	12.959	10.772
F Konstruksi	119.004	96.432	121.793	128.106	140.452
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	354.449	364.141	377.795	380.073	401.316
H Transportasi dan Pergudangan	78.261	77.670	83.425	86.845	96.299
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113.053	106.576	119.237	141.241	140.079
J Informasi dan Komunikasi	16.603	13.544	12.291	16.170	19.207
K Jasa Keuangan dan Asuransi	22.650	23.519	23.362	30.214	18.398
L Real Estat	4.279	6.323	3.795	6.643	9.754
M,N Jasa Perusahaan	23.410	12.935	28.632	35.602	55.157
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial W	27.939	32.546	35.678	28.390	19.045
P Jasa Pendidikan	61.288	48.275	53.352	64.075	79.405
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27.842	20.160	26.778	31.018	20.859
R,S,T,U Jasa Lainnya	86.758	73.597	63.197	80.049	117.228
JUMLAH	1.688.206	1.569.974	1.673.019	1.682.510	1.756.328

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur

Struktur penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung didominasi oleh kelompok usia dewasa (35-39 tahun). Pada kelompok ini, golongan umur 35-39 tahun menjadi yang tertinggi di tahun 2019 sebanyak 229.222 orang. Komposisinya bergeser pada tahun 2023

di mana golongan umur 40-44 tahun menjadi yang tertinggi di tahun ini dengan jumlah sebanyak 219.105 orang yang bekerja.

Secara umum, terjadi pergeseran jumlah penduduk yang bekerja dari golongan usia muda menjadi usia dewasa dan usia tua di Kabupaten Bandung. Pada kelompok tua (50 tahun keatas) mengalami penambahan dari 394.208 orang di tahun 2019 menjadi 447.767 orang di tahun 2023. Kondisi juga sepertinya dipengaruhi oleh terbukanya kesempatan kerja sektor informal di Kabupaten Bandung sebagai dampak meningkatnya kegiatan di kawasan industri pengolahan.

Kondisi ini perlu diperhatikan dalam kebijakan ketenagakerjaan untuk menarik sebanyak mungkin penduduk usia kerja khususnya di usia muda untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Penduduk usia muda yang dimaksud adalah mereka yang telah menyelesaikan minimal pendidikan menengah atas dan diprioritaskan pendidikan tinggi.

Tabel 2.34
Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	72.520	61.874	63.286	60.594	75.792
20-24	188.893	164.693	170.468	151.402	190.267
25-29	200.043	180.400	204.570	210.418	212.649
30-34	228.165	213.327	215.927	239.053	218.502
35-39	229.222	217.489	226.997	207.922	194.962
40-44	198.835	188.513	215.560	212.645	219.105
45-49	176.320	157.688	172.994	179.464	200.284
50-54	141.600	124.486	141.108	157.812	158.527

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
55-59	115.516	112.738	104.320	108.318	117.800
60+	137.092	148.766	157.789	154.882	168.440
JUMLAH	1.688.206	1.569.974	1.673.019	1.682.510	1.756.328

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

3. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Berbeda halnya dengan kondisi penduduk yang bekerja menurut golongan umur, pada penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan Jenjang Universitas menunjukkan tren peningkatan pada jenjang pendidikan sejak tahun 2019 hingga 2023, pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III. Pendidikan SD ke bawah mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Meskipun secara absolut pendidikan SD menjadi yang tertinggi, namun secara persentase penduduk yang bekerja yang berpendidikan SMA Umum meningkat lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan akses penduduk dalam pendidikan dasar dan menengah telah memberikan dampak besar terhadap jumlah lulusan jenjang pendidikan tersebut untuk aktif dalam pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentu menjadi hal yang positif untuk mengurangi pengangguran.

Tabel 2.35
Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
≤SD	626.438	557.763	561.684	512.833	587.313
SMP	415.349	413.159	433.210	377.194	416.433
SMTA Umum	341.590	315.198	331.173	406.242	418.915
SMTA Kejuruan	174.424	150.914	196.857	185.807	186.907
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	31.876	26.676	31.718	46.672	29.771
UNIVERSITAS	98.529	106.264	118.377	153.762	116.989
JUMLAH	1.688.206	1.569.974	1.673.019	1.682.510	1.756.328

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin

Penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin di kabupaten Bandung tahun 2019-2023 masih didominasi oleh laki-laki. Secara proporsi, laki-laki yang bekerja mencapai 63,66 persen di tahun 2019, yaitu sebanyak 1.074.767 orang. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.116.497 orang di tahun 2023. Meskipun meningkat 41.730 orang dalam lima tahun, secara proporsi penduduk laki-laki yang bekerja mengalami penurunan menjadi 63,57 persen di tahun 2023. Hal ini berarti bahwa keberadaan perempuan dalam pasar kerja mulai berdampak dan mengalami kesetaraan.

Tren positif tersebut secara tidak langsung menjawab paradigma selama ini bahwa secara budaya perempuan merupakan kelompok kedua dalam dunia kerja jika dibandingkan laki-laki. Perempuan dalam budaya timur diasosiasikan dengan pekerjaan rumah tangga sehingga membatasi akses dan ruang geraknya dalam kegiatan ekonomi. Isu kesetaraan gender sudah digaungkan Pemerintah Kabupaten Bandung sejak lama.

Tabel 2.36
Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	1.074.767	1.013.331	1.071.058	1.082.814	1.116.497
Perempuan	613.439	556.643	601.961	599.696	639.831
JUMLAH	1.688.206	1.569.974	1.673.019	1.682.510	1.756.328

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

5. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang termasuk dalam dunia ketenagakerjaannya. Salah satu karakteristiknya adalah masih adanya sektor informal di dalamnya selain tenaga kerja formal. Jika mengacu pada kategori status pekerjaan utama, tenaga kerja formal berada pada status buruh/karyawan/pegawai dan berusaha sendiri. Jumlah tenaga kerja formal di tahun 2019 mencapai 909.107 orang. Jumlah tersebut menurun menjadi 833.558 orang di tahun 2023.

Tren penurunan tenaga kerja formal tersebut diduga sebagai dampak dari digitalisasi dunia ketenagakerjaan. Digitalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja tertarik untuk bekerja secara lepas (freelance) tanpa terikat hubungan dengan pemberi kerja. Selain itu, maraknya jasa transportasi online yang berdampak besar pada pengangguran juga saat ini pekerjaanya dikategorikan sebagai tenaga kerja informal.

Tabel 2.37
Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

STATUS PEKERJAAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Berusaha sendiri	329.813	264.027	308.113	335.852	355.996
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	156.164	178.477	177.987	145.649	142.504
3. Berusaha dibantu buruh tetap	46.096	51.363	46.980	62.870	63.346
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	909.107	773.338	734.458	818.116	833.558
5. Pekerja bebas di Pertanian	63.944	73.385	92.015	39.047	59.846
6. Pekerja bebas di Non Pertanian	92.919	89.793	144.964	155.765	156.052
7. Pekerja tidak dibayar	90.163	139.591	168.502	125.211	145.026
JUMLAH	1.688.206	1.569.974	1.673.019	1.682.510	1.756.328

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

6. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan

Sektor industri pengolahan sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian Kabupaten Bandung memberi dampak yang cukup besar terhadap komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan jabatan. Kelompok-kelompok jabatan pekerja pengolahan, kerajinan, dan ybdi; operator dan perakitan mesin serta pekerja kasar merupakan kelompok-kelompok jabatan yang mayoritas ada di sektor ini, selain jabatan pada level atas. Pada kategori penduduk yang bekerja menurut jabatan ini, kelompok jabatan tenaga pekerja kasar menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 899.268 orang di tahun 2019 dan menurun menjadi 888.654 orang di tahun 2023. Selain itu, Tenaga usaha jasa menjadi yang peringkat kedua dengan 485.860 orang pada tahun 2019 dan trennya terus meningkat hingga mencapai 572.923 orang di tahun 2023.

Kabupaten Bandung selain menjadi produsen berbagai komoditi hasil industri dan jasa, juga merupakan pasar yang potensial mengingat jumlah penduduknya yang besar. Keberadaan tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan yang tinggi secara tidak langsung semakin menguatkan hipotesis tersebut.

Tabel 2.38
Penduduk yang Bekerja Menurut Jabatan
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

JENIS PEKERJAAN/JABATAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
0/1. Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis	47.322	73.686	115.447	69.112	39.183
2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan	79.279	15.348	28.186	94.054	80.709
3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis	50.836	68.834	60.105	61.330	66.279
4. Tenaga usaha penjualan	61.919	385.918	506.343	69.546	57.743
5. Tenaga usaha jasa	485.860	98.163	221.649	502.240	572.923
6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	63.722	205.588	95.534	63.945	50.837
7/8/9/X/00. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, Lainnya	899.268	722.437	645.755	822.283	888.654
JUMLAH	1.688.206	1.569.974	1.673.019	1.682.510	1.756.328

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

7. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

Salah satu problem ketenagakerjaan di Indonesia adalah tingginya setengah penganggur atau pengangguran terselubung. Kelompok ini ditandai dari penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. bahwa jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam di Kabupaten Bandung mencapai 1.346.940 orang atau 79,79 persen di tahun 2019. Jumlahnya menurun menjadi 1.317.099 orang atau 74,99 persen di tahun 2023.

Peningkatan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Meskipun kekurangan jam kerja dipandang sebagai suatu hal yang negatif, namun pada tren millennial saat ini, pola kerja fleksibel tidak terpaku pada jam kerja. Kelompok pekerja ini memiliki jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan tidak berkeinginan untuk menambah jam kerjanya karena secara ekonomi pendapatannya sudah sesuai dengan ekspektasi.

Tabel 2.39
Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

JAM KERJA	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
0*)	26.906	54.229	38.059	19.126	16.841
1 – 9	32.348	39.280	61.569	30.095	53.312
10 -14	41.718	62.764	74.875	67.967	37.569
15 – 24	99.424	171.673	248.644	105.372	156.500
25 – 34	140.870	168.769	214.459	172.875	175.007
35 – 44	345.321	380.479	386.961	509.447	470.747
45 – 59	675.665	471.690	429.339	566.301	581.725
60+	325.954	221.090	219.113	211.327	264.627
JUMLAH	1.688.206	1.569.974	1.673.019	1.682.510	1.756.328

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

*Sementara tidak bekerja

8. Penduduk yang Bekerja Menurut Perkotaan/Perdesaan

Secara geografis, Kabupaten Bandung memiliki keragaman sumber perekonomian. Di sisi utara cenderung lebih didominasi oleh sektor industri dan jasa mengingat posisinya yang sangat dekat dengan pusat pertumbuhan Jawa Barat. Selain itu, Kabupaten Bandung juga dikenal sebagai lumbung padi nasional dengan produksi berasnya yang mampu mencukupi kebutuhan penduduknya. Jika ditinjau dari lokasinya, jumlah penduduk yang bekerja di

Kabupaten Bandung berkonsentrasi di daerah-daerah dengan pusat industri dan jasa.

Penduduk yang bekerja Menurut Perkotaan/Perdesaan di Kabupaten Bandung periode tahun 2019-2023 mengalami peningkatan, dan tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.756.328 orang. Pada tahun 2019 sebesar 1.688.206 orang Penduduk yang bekerja menurut Perkotaan dan Perdesaan sama-sama mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Tabel 2.40
Penduduk yang Bekerja Menurut Perdesaan dan Perkotaan
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

DAERAH	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perkotaan	1.620.039	1.524.297	1.650.243	1.082.814	1.116.497
Perdesaan	68.167	45.677	22.776	599.696	639.831
JUMLAH	1.688.206	1.569.974	1.673.019	1.682.510	1.756.328

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

2.7. Penganggur Terbuka

Penganggur terbuka menjadi indikator penting dalam perkembangan ketenagakerjaan suatu daerah. Penganggur juga menjadi isu sensitif dalam setiap rezim pemerintahan karena menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengintervensi ketenagakerjaan yang paling mudah untuk dilihat. Secara umum jumlah penganggur terbuka di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sampai tahun 2023, semula sebanyak 97.956 orang menjadi di tahun 2018 menjadi 122.429 orang di tahun 2023.

1. Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur

Struktur penganggur terbuka berdasarkan umur di Kabupaten Bandung didominasi oleh golongan umur muda. TPT tertinggi pada tahun 2019 berada pada golongan umur 20-24 tahun, yaitu sebesar 23.999 orang, dan terus meningkat menjadi 46.972 orang pada tahun 2023. Pada usia tersebut merupakan transisi penduduk usia muda dari dunia pendidikan khususnya pendidikan menengah ke dunia kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan keterampilan dari dunia kerja. Keberadaan balai latihan kerja sebagai penghubung kedua hal tersebut diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik.

Tabel 2.41
Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

GOLONGAN UMUR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	22.911	19.748	30.683	36.491	38.348
20-24	23.999	41.605	50.180	48.511	46.972
25-29	12.962	28.056	24.172	19.160	12.927
30-34	13.183	19.596	10.776	7.170	8.719
35-39	2.562	8.753	6.228	5.377	2.731
40-44	11.117	8.110	3.240	603	1.093
45-49	2.140	5.756	5.723	1.299	3.699
50-54	1.071	12.739	4.444	1.353	5.188
55-59	3.891	1.889	3.200	-	-
60+	4.120	1.150	13.262	6.325	2.752
JUMLAH	97.956	147.402	151.908	126.289	122.429

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

Di sisi lain tren penurunan persentase penganggur terbuka terjadi pada golongan umur 25-29 tahun. Pada tahun 2019, jumlah penganggur pada golongan umur 25-29 sebesar 13,23 persen dan menurun menjadi 10,56 persen. Sedangkan pada golongan umur

40-44 turun dari 11,35 persen menjadi 0,89 persen. Pada golongan umur tersebut merupakan umur puncak di mana seorang angkatan kerja mulai berpikir pada pekerjaan yang tetap. Faktor lain adalah angkatan kerja mulai menemukan keterampilan yang sesuai dengan minat sehingga enggan untuk berganti ke keterampilan yang lain.

Tabel 2.42
Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(persen)

GOLONGAN UMUR	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	23,39	13,40	20,20	28,89	31,32
20-24	24,50	28,23	33,03	38,41	38,37
25-29	13,23	19,03	15,91	15,17	10,56
30-34	13,46	13,29	7,09	5,68	7,12
35-39	2,62	5,94	4,10	4,26	2,23
40-44	11,35	5,50	2,13	0,48	0,89
45-49	2,18	3,90	3,77	1,03	3,02
50-54	1,09	8,64	2,93	1,07	4,24
55-59	3,97	1,28	2,11	0,00	0,00
60+	4,21	0,78	8,73	5,01	2,25
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023, data diolah

2. Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Tingginya jumlah penduduk yang bekerja dari SMA Umum juga sebanding dengan jumlah pengangguran di jenjang pendidikan yang sama. Tingkat pengangguran terbuka pada jenjang SMA Umum pada tahun 2019 mencapai 33.87 persen atau sebanyak 33.175 orang. Jumlah tersebut meningkat menjadi 35,19 persen atau 43.077 orang pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi link and match pada jenjang pendidikan ini mulai menampakkan hasil positif.

Tabel 2.43
Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
≤SD	16.057	20.621	29.774	15.497	24.585
SMTp	18.838	39.856	32.909	21.894	22.035
SMTA Umum	33.175	42.656	55.342	46.843	43.077
SMTA Kejuruan	15.547	28.089	20.976	30.251	24.936
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	0	7.556	3.840	2.763	2.671
UNIVERSITAS	14.339	8.624	9.067	9.041	5.125
JUMLAH	97.956	147.402	151.908	126.289	122.429

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

Tren positif pada jenjang perguruan tinggi tidak diikuti oleh jenjang pendidikan lainnya, khususnya SD ke bawah, SMP, SMA umum dan SMA Kejuruan. Di mana seluruh jenjang pendidikan tersebut mengalami peningkatan penganggur terbuka secara absolut. Peningkatan pengangguran tertinggi dalam jangka waktu lima tahun terjadi pada jenjang SMA umum, yaitu sebanyak 9.903 orang. SMA Umum memang diprioritaskan bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena porsi konsep dan teori didesain lebih besar dibandingkan praktiknya. Namun kondisi di lapangan seringkali dijumpai lulusan-lulusan SMA Umum tersebut justru langsung terjun ke pasar kerja.

Tabel 2.44
Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Persen)

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
≤SD	16,39	13,99	19,60	12,27	20,08

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
SMTK	19,23	27,04	21,66	17,34	18,00
SMTA Umum	33,87	28,94	36,43	37,09	35,19
SMTA Kejuruan	15,87	19,06	13,81	23,95	20,37
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	0,00	5,13	2,53	2,19	2,18
UNIVERSITAS	14,64	5,85	5,97	7,16	4,19
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

3. Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Penganggur terbuka berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bandung pada tahun 2019-2023 didominasi oleh laki-laki. Hal ini sejalan dengan TPAK laki-laki yang selalu menjadi yang tertinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2019, jumlah penganggur terbuka berjenis kelamin laki-laki sebanyak 93.022 orang. Jumlah tersebut merupakan 5,31 persen dari seluruh angkatan kerja laki-laki. Jumlahnya Pengangguran Terbuka laki-laki meningkat di tahun 2023 menjadi 84.723 orang.

Tabel 2.45
Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	60.307	101.373	106.884	83.269	84.723
Perempuan	37.649	46.029	45.024	43.020	37.706
JUMLAH	97.956	147.402	151.908	126.289	122.429

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

Peningkatan dari sisi absolut juga diikuti dengan peningkatan dalam persentasenya. Pada tahun 2023, persentase Pengangguran Terbuka laki-laki sebanyak 7,05 persen dari total angkatan

kerjanya. Pemulihan pasca pandemi Covid-19 menjadi alasan mengapa tingkat pengangguran laki-laki masih relatif tinggi. Bahkan pada saat puncak pandemi tahun 2020 dan 2021, persentasenya mencapai berturut-turut 9,09 dan 9,07 persen.

Tabel 2.46
Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(persen)

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-Laki	61,57	68,77	70,36	65,94	69,20
Perempuan	38,43	31,23	29,64	34,06	30,80
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023, data diolah

4. Penganggur Terbuka Menurut Perkotaan/Perdesaan

Secara umum tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung mengalami tren perbaikan pasca pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 yang merupakan masa puncak pandemi, TPT di Kabupaten Bandung mencapai 9,09 persen. Jika dirinci berdasarkan Perkotaan/Perdesaan, jumlah penganggur terbuka tertinggi berada pada tahun 2021 jumlah penganggur mencapai 150.335 orang dan menurun menjadi 121.045 orang di tahun 2023.

Tabel 2.47
Penganggur Terbuka Menurut Perkotaan/Perdesaan
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

DAERAH	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perkotaan	93.022	143.438	150.335	83.269	121.045
Perdesaan	4.934	3.964	1573	43.020	1.384
JUMLAH	97.956	147.402	151.908	126.289	122.429

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023

Meskipun secara absolut menjadi yang tertinggi, namun secara persentase tingkat penganggur terbuka tertinggi pada berada di tahun 2021 menjadi 98,96 persen.

Tabel 2.48
Penganggur Terbuka Menurut Perkotaan/Perdesaan
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Orang)

DAERAH	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perkotaan	94,96	97,31	98,96	65,94	98,87
Perdesaan	5,04	2,69	1,04	34,06	1,13
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023, data diolah

2.8. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting untuk menarik investor ke suatu daerah. Secara umum produktivitas merupakan nilai tambah yang timbul dalam proses produksi, atau selisih dari output dan input. Proses produksi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labour*). Pada konteks makro, sangat sulit untuk menghitung kontribusi modal dan tenaga kerja secara spesifik dalam sebuah proses produksi. Sehingga pada beberapa penelitian, produktivitas dihitung dengan mengasumsikan faktor modal dan tenaga kerja sebagai satu kesatuan, atau sering juga disebut *Total Factor Productivity* (TFP).

TFP juga digunakan untuk menghitung produktivitas tenaga kerja pada dokumen ini. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2019-2023 secara umum mengalami tren positif dari Rp 48,90 juta/tenaga kerja menjadi Rp 52,85 juta/tenaga kerja.

Tabel 2.49
Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023
(Juta Rp/Tenaga Kerja)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,83	27,10	25,52	46,71	48,27
B Pertambangan dan Penggalian	313,06	849,22	533,09	243,99	729,90
C Industri Pengolahan	74,69	90,29	91,44	92,09	95,92
D Pengadaan Listrik dan Gas	39,76	11,42	12,42	9,82	15,58
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,57	2,14	1,95	2,64	3,16
F Konstruksi	46,42	58,10	46,53	44,74	43,91
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	30,05	28,18	29,02	30,18	30,26
H Transportasi dan Pergudangan	37,27	36,00	32,80	34,78	35,39
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,96	18,46	16,52	14,66	16,49
J Informasi dan Komunikasi	120,11	182,00	219,70	176,87	162,00
K Jasa Keuangan dan Asuransi	25,33	25,79	26,90	20,36	35,45
L Real Estat	260,17	175,42	329,30	198,86	146,91
M,N Jasa Perusahaan	17,32	26,87	13,27	11,49	8,12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial W	57,03	45,83	40,70	51,23	78,62
P Jasa Pendidikan	42,21	55,88	53,09	45,03	39,06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,44	33,94	26,48	25,33	42,67
R,S,T,U Jasa Lainnya	19,65	23,16	27,30	23,31	17,65
JUMLAH	48,90	51,63	50,18	52,56	52,85

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2019-2023, data diolah

2.9. Pelatihan Tenaga Kerja

Kabupaten Bandung memerlukan fasilitasi pelatihan tenaga yang memadai untuk menjawab tantangan dunia kerja. Salah satu komponen penting dalam pelatihan adalah jumlah instruktur. Dalam lima tahun ke belakang, jumlah instruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerjanya. Pada tahun 2022, jumlah instruktur pemerintah sebanyak 497 orang dan meningkat

sebanyak 66 orang di tahun 2023. Pada konteks instruktur, intervensi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga instruktur.

Tabel 2.50
Jumlah Instruktur, Jumlah Yang Dilatih dan Lulusan Pelatihan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Balai Latihan Kerja Swasta			81	89	92
Kapasitas Lembaga Pelatihan					
Jumlah Instruktur				49	66
Jenis Kejuruan					
Jumlah Lulusan				3320	
Jumlah Lulusan yang ditempatkan					
Jumlah Peserta Latihan				3320	1840

Sumber : <https://satudata.bandungkab.go.id>

2.10. Penempatan Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung begitu dinamis. Persediaan tenaga kerja yang melebihi kebutuhan tenaga kerja menyebabkan masih banyaknya tenaga kerja yang belum terserap dengan baik. Isu mengenai revolusi industri bukanlah kabar baru, isu tersebut telah bergaung cukup lama dan harus secara komprehensif direspon oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mempersiapkannya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Kabupaten Bandung sebagai pemegang gelar Kota Industri yang memang pada kenyataannya banyak perusahaan besar sebagai pemasok di regional Kabupaten Bandung bahkan di luar itu. Selain isu revolusi industri, pandemi Covid-19 juga masih didepan mata dan dirasakan hingga saat ini. Pandemi Covid-19 banyak membuat kontraksi tajam di berbagai sektor lapangan usaha bahkan pada

sektor-sektor dengan distribusi besar pada PDRB di Kabupaten Bandung.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung selama periode tahun 2019-2023 cukup memprihatinkan, jumlah pencari kerja terdaftar berbanding lowongan kerja terdaftar belum sepadan. Pada tahun 2021, lowongan kerja terdaftar sebanyak 3 lowongan, namun pencari kerja terdaftar berjumlah 3.113 orang. Kemudian, pada tahun 2022 jumlah lowongan yang dibuka sebanyak 16 lowongan, sedangkan jumlah pencari kerja terdata sebanyak 7.521 orang.

Diperlukan link and match antara pencari kerja dan permintaan pasar kerja agar mampu mengatasi kondisi penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bandung. Selain itu, perlunya perluasan kesempatan kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja. Jika melihat rumusan 9 lompatan besar Kementerian Ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja akan mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka perluasan kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan.

Tabel 2.51
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja
Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Lowongan Kerja Terdaftar			3	16	10
Pencari Kerja Terdaftar			3.113	7.521	
Pencari Kerja Yang Ditempatkan			109	142	2.232
Bursa Kerja Swasta					
Jumlah Pengantar Kerja	2	2	3	6	10

Sumber : Sumber : <https://satudata.bandungkab.go.id>

2.11. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tersebut tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, namun juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial, serta perlindungan tenaga kerja. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat diwujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Jumlah mediator di Kabupaten Bandung sebanyak 63 orang pada tahun 2022.

Tabel 2.52
Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perusahaan Besar, Sedang Dan Kecil		2.168	582		
Jumlah Perusahaan dengan Peraturan Perusahaan (PP)	204	128	173	188	186
Jumlah Perusahaan Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	11	5	10	14	15
Jumlah Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB)				329	
Jumlah Mediator Kabupaten/Kota				63	
Upah Minimum Provinsi					
Upah Minimum Kabupaten Bandung	2.893.100	3.139.300	2.893.100	3.241.900	3.492.500
Jumlah Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	46	37	37	103	106

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Peserta Aktif Jamsostek			183.197	180.271	
Jumlah Perusahaan Aktif Jamsostek					

Sumber : Sumber : <https://satudata.bandungkab.go.id>

Sementara itu, mengenai pengupahan yakni penetapan upah minimum oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berguna sebagai standar upah agar upah yang diberikan oleh pemberi kerja tidak rendah dan sesuai dengan komposisi kerja yang diberikan. Pengupahan merupakan hal sensitif dalam dunia kerja, kedua belah pihak yakni pemberi dan penerima memiliki ukuran yang berbeda-beda. Peranan penting Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menetapkan standar upah akan berdampak bagi kesejahteraan tenaga kerja secara pribadi serta keluarganya.

Perkembangan upah minimum di Kabupaten Bandung tertera pada Tabel dibawah ini yakni pada tahun 2019 UMK Kabupaten Bandung sebesar Rp. 2.893.100,- dan meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 3.492.500,- Secara umum UMK ini terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, namun dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp. 2.893.100. Kondisi tersebut wajar terjadi karena pandemi Covid-19 memberikan pengaruh besar pada ekonomi yang terhubung langsung dengan permintaan pasar dan produksi perusahaan.

Tabel 2.53
Upah Minimum
Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	Upah Minimum Kabupaten Bandung (Juta Rupiah)
2019	2.893.100
2020	3.139.300
2021	2.893.100
2022	3.241.900
2023	3.492.500

Sumber :

<https://bandungkab.bps.go.id/indicator/19/345/1/upah-minimum-kabupaten-bandung-tahun.html>

BAB III

PERKIRAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA

Perkiraan persediaan tenaga kerja menjadi indikator penting baik di lingkup nasional maupun daerah. Perkiraan persediaan tenaga kerja ini meliputi kondisi perkiraan ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2024-2030. Gambaran mengenai perkiraan persediaan tenaga kerja erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dan perkiraan pemenuhan akan kebutuhan tenaga kerja. Perkiraan persediaan tenaga kerja berisi informasi yang mencakup tiga indikator ketenagakerjaan, yang meliputi perkiraan Penduduk Usia Kerja, perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan perkiraan Angkatan Kerja dari berbagai karakteristik.

3.1. PERKIRAAN PENDUDUK USIA KERJA (PUK)

Perkiraan PUK suatu daerah berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk alami dan non alami. Pertumbuhan penduduk alami merupakan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Sedangkan pertumbuhan penduduk non alami merupakan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh perpindahan penduduk masuk dan keluar di wilayah tersebut. Dalam konteks perkiraan PUK Kabupaten Bandung tahun 2024-2030, diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. PUK Kabupaten Bandung diperkirakan sebanyak 2.945.369 orang pada tahun 2024 dan pada tahun 2030 jumlahnya diperkirakan

mencapai 3.250.889 orang. Dengan demikian, peningkatan jumlah PUK selama periode tersebut diperkirakan sebanyak 305.520 orang. Perkiraan PUK Kabupaten Bandung periode 2024-2030 terbagi menjadi beberapa karakteristik, berikut akan dijelaskan di bawah ini.

1. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

Secara absolut, PUK berdasarkan golongan umur di Kabupaten Bandung diperkirakan akan mengalami peningkatan. Struktur PUK hingga tahun 2030 juga diperkirakan tetap didominasi oleh PUK muda hingga dewasa antara 223.551 orang pada tahun 2024-2030. Pada golongan umur 15-19 tahun diperkirakan menjadi usia muda yang tertinggi pada tahun 2024 dengan jumlah mencapai 350.347 orang. Tren tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga 2025. Pada tahun 2030, golongan umur 15-19 tahun diperkirakan menjadi golongan umur dengan jumlah PUK tertinggi di Kabupaten Bandung. golongan ini juga terus menjadi yang tertinggi hingga tahun 2030 diperkirakan jumlahnya mencapai 386.688 orang.

Komposisi PUK di Kabupaten Bandung diperkirakan masih akan menikmati fase bonus demografi hingga berakhirnya periode 2024-2030. Selain karena pertumbuhan penduduk alaminya, lokasi beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung yang berada di dekat ibukota Bandung atau merupakan daerah penyangga, banyaknya lokal-lokal pendidikan khususnya pendidikan tinggi serta banyaknya kawasan industri sebagai pusat-pusat pertumbuhan mampu menarik penduduk dari luar daerah untuk bermigrasi masuk.

Tabel 3.1
Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15-19	350.347	356.404	362.461	368.518	374.575	380.632	386.688
20-24	328.811	334.495	340.180	345.865	351.549	357.234	362.918
25-29	316.290	321.758	327.226	332.695	338.163	343.631	349.099
30-34	302.226	307.451	312.675	317.900	323.125	328.350	333.575
35-39	290.401	295.422	300.442	305.463	310.483	315.504	320.524
40-44	292.962	298.026	303.091	308.156	313.221	318.285	323.350
45-49	274.120	278.859	283.598	288.337	293.076	297.815	302.554
50-54	230.724	234.712	238.701	242.690	246.679	250.668	254.656
55-59	182.464	185.618	188.772	191.927	195.081	198.236	201.390
60+	377.025	383.543	390.061	396.579	403.097	409.615	416.133
JUMLAH	2.945.369	2.996.289	3.047.209	3.098.129	3.149.049	3.199.969	3.250.889

Kabupaten Bandung juga perlu memberikan perhatian pada jumlah PUK usia tua (60+ tahun) yang cenderung mengalami peningkatan jumlahnya. *Ageing population* menjadi hal yang tidak dapat dihindari sebagai fase pasca bonus demografi. Pada golongan umur ini, secara absolut jumlahnya diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari yang semula diperkirakan sebanyak 377.025 orang pada tahun 2024 menjadi 416.133 orang pada tahun 2030.

2. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas PUK. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pada tahun 2024 hingga 2030 perkiraan PUK menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung masih didominasi oleh PUK tamatan Sekolah Menengah Pertama ke bawah. Meskipun dalam perkembangannya, proporsinya diperkirakan akan terus menurun dan diikuti

penambahan PUK pada jenjang pendidikan di atasnya. Target pergeseran ke arah positif ini dapat dicapai jika penduduk Kabupaten Bandung sadar akan pentingnya pendidikan didukung dengan pelayanan maupun fasilitas pendidikan semakin ditingkatkan oleh pemerintah.

Peningkatan jumlah absolut PUK berdasarkan pendidikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh jenjang pendidikan PUK berpendidikan SMP yang diperkirakan sebanyak 803.516 orang pada tahun 2024 terus meningkat menjadi 886.864 orang pada tahun 2030. Meningkatnya kualitas PUK di Kabupaten Bandung selama periode 2024-2030 sangat dipengaruhi oleh program pemerintah yang sampai saat ini masih dilaksanakan yaitu program Pemberian layanan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat berupa wajib belajar pendidikan dasar. Amanat pemberian layanan bagi masyarakat dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Perubahan) Kabupaten Bandung tahun 2021–2026. Dalam RPJMD tersebut telah ditetapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu Pendidikan bagi penduduk usia 16-18 tahun (Sekolah Menengah), dengan demikian diharapkan tidak ada siswa yang putus sekolah. Dengan pelaksanaan program yang masif tersebut maka diharapkan kualitas PUK Kabupaten Bandung akan semakin meningkat.

Tabel 3.2
Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
≤SD	992.650	1.009.812	1.026.973	1.044.134	1.061.295	1.078.456	1.095.617
SMP	803.516	817.408	831.299	845.190	859.081	872.973	886.864
SMA Umum	674.637	686.300	697.964	709.627	721.290	732.953	744.617
SMA Kejuruan	272.475	277.186	281.896	286.607	291.317	296.028	300.739

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	46.292	47.093	47.893	48.693	49.494	50.294	51.094
UNIVERSITAS	155.798	158.491	161.185	163.878	166.572	169.265	171.959
JUMLAH	2.945.369	2.996.289	3.047.209	3.098.129	3.149.049	3.199.969	3.250.889

Selain itu, keberadaan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Bandung juga turut menjadi faktor penunjang peningkatan PUK pada kelompok pendidikan menengah dan tinggi ini. Kuantitas dan persebaran sekolah juga menjadi hal yang sangat menentukan untuk peningkatan akses kelompok masyarakat yang jauh dari perkotaan. Selain itu, kebijakan zonasi pada kelompok pendidikan menengah juga turut berkontribusi pada pemerataan kualitas pendidik dan siswa.

3. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

PUK berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bandung diperkirakan relatif seimbang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, PUK berjenis kelamin laki-laki memiliki proporsi sebanyak 50,81 persen atau 1.496.399 orang, berbanding PUK perempuan sebesar 1.448.970 orang. Jumlah PUK terus meningkat hingga pada tahun 2030 diperkirakan PUK laki-laki berjumlah 2.890.860 orang.

Tabel 3.3
Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	1.496.399	2.664.456	2.709.737	2.755.018	2.800.299	2.845.579	2.890.860
Perempuan	1.448.970	331.833	337.472	343.111	348.751	354.390	360.029
JUMLAH	2.945.369	2.996.289	3.047.209	3.098.129	3.149.049	3.199.969	3.250.889

Jenis kelamin pada PUK menjadi salah satu indikator yang terkait dalam kebijakan ketenagakerjaan. Meskipun kesetaraan gender di

Indonesia sudah semakin baik, namun secara patriarki pria masih dianggap memiliki kesempatan yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Mengingat hal tersebut perlu upaya pemerintah untuk mendorong dan mendayagunakan perempuan sehingga minat untuk aktif dalam kegiatan ekonomi semakin meningkat.

4. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan yang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah kabupaten terbanyak kedelapan di Jawa Barat. Kaitannya dengan penduduk usia kerja, diperkirakan PUK di Kabupaten Bandung bertambah 305.520 orang dalam jangka waktu 2024 hingga 2030.

Jumlah PUK Kabupaten Bandung diperkirakan sebanyak 2.945.369 orang pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 3.250.889 orang pada tahun 2030. Menurut perkiraan pada tahun 2024 jumlah PUK Perkotaan sebanyak 2.913.917 dan terjadi penurunan pada tahun 2030. Dan sebaliknya PUK Perdesaan mengalami kenaikan pada tahun 2024 perkiraan PUK sebanyak 31.452 orang menjadi 360.029 orang pada tahun 2030.

Tabel 3.4
Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

DAERAH	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perkotaan	2.913.917	2.664.456	2.709.737	2.755.018	2.800.299	2.845.579	2.890.860
Perdesaan	31.452	331.833	337.472	343.111	348.751	354.390	360.029
JUMLAH	2.945.369	2.996.289	3.047.209	3.098.129	3.149.049	3.199.969	3.250.889

3.2. PERKIRAAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur lima belas tahun ke atas. Perkiraan TPAK dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja, baik penduduk yang bekerja maupun penganggur dalam sebuah besaran jumlah penduduk usia kerja yang erat kaitannya dengan kondisi perekonomian. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK di Kabupaten Bandung dari tahun 2024-2030 diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, TPAK diperkirakan sebesar 67,23 persen, tahun 2025 meningkat menjadi 67,50 persen. Persentase terus meningkat hingga diperkirakan mencapai 69,67 persen pada tahun 2030.

1. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

TPAK berdasarkan golongan umur di Kabupaten Bandung diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya hampir di semua golongan umur kecuali golongan umur 15-19 tahun. TPAK golongan umur 15-19 tahun diperkirakan menurun sampai tahun 2030 karena golongan umur tersebut merupakan kelompok usia sekolah, sehingga diperkirakan masih aktif dalam dunia pendidikan dan belum masuk dalam pasar kerja. Pada tahun 2024, diperkirakan golongan umur ini memiliki TPAK sebesar 35,03 persen dan turun menjadi 33,83 persen pada tahun 2029. Penurunan ini dapat tercapai jika pemerintah secara konsisten melaksanakan kebijakan dengan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan bagi penduduk usia 16-18 tahun (Sekolah

Menengah) dengan indikator sasarannya melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan pada golongan umur 20-24 tahun diperkirakan TPAK nya meningkat dari 76,79 persen pada tahun 2024 menjadi 77,18 persen pada tahun 2030. Tingginya peningkatan golongan umur 20-24 tahun yang tergolong kelompok usia muda, menunjukkan bahwa kedepan semakin banyak kelompok umur tersebut yang aktif dalam kegiatan ekonomi, dengan demikian maka pemerintah perlu memberikan pembekalan baik formal maupun informal melalui pelatihan agar menjadi tenaga kerja muda yang berkualitas, kompeten dan berdaya saing.

Selama periode 2024-2030 diperkirakan TPAK tertinggi terdapat pada golongan umur 30-34 tahun. Pada tahun 2024 diperkirakan TPAK nya mencapai 79,08 persen terus meningkat setiap tahun menjadi 82,46 persen pada tahun 2030. Tingginya TPAK pada golongan umur tersebut sesuai dengan siklus kehidupan dimana pada batasan umur tersebut seseorang mencapai puncaknya dalam kegiatan ekonomi.

Selain TPAK pada kelompok umur muda, hal yang perlu dicermati adalah peningkatan TPAK pada kelompok umur tua (65+). Pada kelompok umur ini, diperkirakan persentasenya terus meningkat dari 47,68 persen pada tahun 2024 menjadi 49,97 persen di tahun 2030. Meningkatnya TPAK kelompok umur tua sangat dipengaruhi program fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah.

Tabel 3.5
Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Golongan umur
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(%)

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15-19	35,03	34,10	33,03	33,30	33,57	33,83	34,09
20-24	76,79	75,94	75,03	75,58	76,12	76,66	77,18
25-29	75,13	75,49	76,08	76,57	77,05	77,52	77,99
30-34	79,08	79,64	80,47	80,98	81,48	81,97	82,46
35-39	71,48	72,18	73,18	73,63	74,08	74,52	74,95
40-44	78,87	79,73	80,92	81,42	81,91	82,39	82,86
45-49	78,16	78,89	79,93	80,43	80,92	81,40	81,87
50-54	74,60	75,19	76,03	76,51	76,98	77,45	77,91
55-59	67,72	68,50	69,57	69,99	70,41	70,82	71,23
60+	47,68	48,14	48,79	49,09	49,39	49,68	49,97
JUMLAH	67,23	67,50	67,95	68,39	68,82	69,25	69,67

2. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan tingkat pendidikan diperkirakan terus mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan mulai dari SD kebawah sampai dengan jenjang universitas.

TPAK untuk yang berpendidikan SMA keatas diperkirakan peningkatan tertinggi berada pada kelompok pendidikan Universitas dengan jumlah 82,47 persen pada tahun 2024 meningkat menjadi 85,92 persen pada tahun 2030. Sedangkan TPak tertinggi diperkirakan terus konsisten berada pada kelompok pendidikan SMA Umum. Pada jenjang pendidikan ini TPak pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 72,33 persen dan meningkat menjadi 74,47 persen.

Tabel 3.6
Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(%)

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
≤SD	64,85	65,29	65,95	66,37	66,78	67,19	67,59
SMP	57,45	57,78	58,28	58,65	59,02	59,38	59,74
SMA Umum	72,33	72,38	72,58	73,06	73,54	74,01	74,47
SMA Kejuruan	82,26	82,10	82,04	82,60	83,15	83,69	84,23
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	73,96	74,11	74,42	74,91	75,40	75,87	76,34
UNIVERSITAS	82,47	83,02	83,84	84,37	84,89	85,41	85,92
JUMLAH	67,23	67,50	67,95	68,39	68,82	69,25	69,67

3. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik demografi yang berpengaruh erat terhadap perkembangan TPAK salah satunya adalah jenis kelamin. Perkembangan TPAK menurut jenis kelamin sangat beragam, meskipun secara umum tren TPAK perempuan selalu lebih rendah daripada TPAK laki-laki. Hal ini perlu diantisipasi dan diarahkan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir ketimpangan yang muncul dalam aspek pembangunan. Pada tahun 2023 diperkirakan gender gap antara TPAK laki-laki dengan perempuan sebesar 84,64 persen, meskipun mulai menurun dibandingkan tahun 2024 namun masih lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Barat. Target tersebut dapat tercapai jika peluang kerja bagi perempuan semakin meningkat dan perlu upaya lintas sektor untuk memberdayakan perempuan sehingga mau berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Untuk mendorong gender gap semakin kecil maka pemerintah perlu secara terus menerus memberikan pelatihan bagi perempuan di

kelompok bukan angkatan kerja dan sekaligus mendorong mereka khususnya kelompok mengurus rumah tangga untuk aktif dalam kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2024-2030 diperkirakan TPAK laki-laki mengalami penurunan dan TPAK perempuan mengalami peningkatan. TPAK laki-laki diperkirakan sebesar 84,64 persen pada tahun 2024 menurun menjadi 71,07 persen pada tahun 2030. Sedangkan TPAK perempuan meningkat dari 49,25 persen pada tahun 2024 menjadi 58,45 persen pada tahun 2030.

Tabel 3.7
Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(%)

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	84,64	68,89	69,30	69,75	70,20	70,64	71,07
Perempuan	49,25	56,35	57,05	57,41	57,76	58,10	58,45
JUMLAH	67,23	67,50	67,95	68,39	68,82	69,25	69,67

Peningkatan ini diharapkan dapat tercapai, dengan demikian gender gap akan semakin kecil. Kondisi ini dapat terwujud jika PUK jenis kelamin perempuan mulai berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesetaraan gender sudah semakin baik terjadi di Kabupaten Bandung. Akses perempuan ke berbagai jenjang pendidikan juga mendorong partisipasi yang semakin tinggi dalam angkatan kerja.

4. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan

Secara keseluruhan TPAK menurut Perkotaan/Perdesaan di Kabupaten Bandung diperkirakan meningkat dari tahun 2024 hingga 2030 Perkiraan TPAK sebesar 67,23 persen pada tahun 2024 dan menjadi 69,67 pada tahun 2030. Dimana perkiraan TPAK Perkotaan 44,87 persen pada tahun 2024 menjadi 71,07 persen pada tahun 2030, dan Perkiraan TPAK Perdesaan 21,39 persen pada tahun 2024 menjadi 58,45 persen pada tahun 2030.

Tabel 3.8
Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Kabupaten/kota
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(%)

DAERAH	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perkotaan	44,87	68,89	69,30	69,75	70,20	70,64	71,07
Perdesaan	21,39	56,35	57,05	57,41	57,76	58,10	58,45
JUMLAH	67,23	67,50	67,95	68,39	68,82	69,25	69,67

3.3. PERKIRAAN ANGKATAN KERJA (AK)

Angkatan kerja adalah salah satu indikator yang memegang peranan penting dalam perencanaan tenaga kerja suatu daerah. Penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, sehingga jumlah angkatan kerja pada dasarnya dipengaruhi oleh jumlah PUK.

Angkatan kerja di Kabupaten Bandung diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 1.980.172 orang pada tahun 2024 menjadi 2.264.937 orang di tahun 2030. Perkiraan

angkatan kerja Kabupaten Bandung 2024-2030 terbagi menjadi beberapa karakteristik, berikut akan dijelaskan di bawah ini.

1. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Angkatan kerja menurut golongan umur di Kabupaten Bandung diperkirakan masih didominasi oleh golongan umur dewasa (25-44 tahun). Pada kelompok ini diperkirakan memiliki proporsi angkatan kerja sebanyak 46,22 persen dari seluruh golongan umur pada tahun 2024. Dari kelompok tersebut, golongan umur 20-24 tahun diperkirakan memiliki persentase tertinggi angkatan kerja di Kabupaten Bandung.

Angkatan kerja pada golongan umur tua (60+ tahun) diperkirakan secara absolut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 jumlahnya diperkirakan sebesar 179.776 orang dan meningkat menjadi 207.953 orang pada tahun 2030. Golongan umur ini secara persentase jumlahnya juga cenderung meningkat dari diperkirakan 9,08 persen pada tahun 2024 menjadi 9,18 persen pada tahun 2036. Angkatan kerja Lansia menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian karena termasuk dalam pekerja rentan.

Tabel 3.9
Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15-19	122.717	121.536	119.711	122.711	125.730	128.766	131.819
20-24	252.508	254.023	255.251	261.415	267.613	273.844	280.108
25-29	237.614	242.903	248.940	254.730	260.550	266.399	272.275
30-34	239.011	244.860	251.601	257.424	263.276	269.157	275.065
35-39	207.571	213.250	219.859	224.914	229.995	235.100	240.228
40-44	231.048	237.610	245.270	250.897	256.551	262.232	267.940

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
45-49	214.244	219.997	226.681	231.899	237.143	242.413	247.707
50-54	172.124	176.472	181.496	185.689	189.903	194.138	198.392
55-59	123.559	127.140	131.328	134.337	137.360	140.398	143.450
60+	179.776	184.647	190.310	194.689	199.090	203.511	207.953
JUMLAH	1.980.172	2.022.436	2.070.446	2.118.706	2.167.212	2.215.957	2.264.937

2. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu indikator penting yang menjadi proksi dari keterampilan seseorang. Pada skala agregat, pendidikan menunjukkan keberpihakan kebijakan suatu daerah terhadap peningkatan keterampilan angkatan kerjanya. Angkatan kerja menurut pendidikan di Kabupaten Bandung diperkirakan masih didominasi oleh tingkat pendidikan dasar (SMP ke bawah). Jumlah angkatan kerja pada kelompok ini diperkirakan sebesar 1.105.359 orang pada tahun 2024 atau sebesar 55,82 persen. Namun di tahun 2030 tren jumlahnya terus meningkat menjadi 1.270.353 orang atau 56,09 persen.

Tabel 3.10
Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
≤SD	643.733	659.353	677.334	693.019	708.781	724.620	740.534
SMP	461.626	472.282	484.490	495.738	507.043	518.404	529.819
SMA Umum	487.944	496.763	506.580	518.476	530.433	542.451	554.528
SMA Kejuruan	224.148	227.564	231.270	236.736	242.231	247.754	253.305
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	34.237	34.899	35.643	36.477	37.316	38.159	39.006
UNIVERSITAS	128.484	131.575	135.130	138.260	141.407	144.568	147.745
JUMLAH	1.980.172	2.022.436	2.070.446	2.118.706	2.167.212	2.215.957	2.264.937

Peningkatan tertinggi kedua adalah pada tingkat pendidikan menengah yang diperkirakan meningkat dari 712.092 orang di tahun 2024 menjadi 807.833 orang di tahun 2030. Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan akses penduduk pada pendidikan dasar juga diikuti oleh kesadaran yang semakin tinggi untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Angkatan kerja dengan jenis kelamin laki-laki periode 2024-2030 diperkirakan akan terus mendominasi dibandingkan angkatan kerja perempuan. Angkatan kerja laki-laki mencapai lebih dari 50 persen, tepatnya sebesar 63,96 persen atau sebanyak 1.266.565 orang di tahun 2024. Dari segi proporsi pun terus mengalami peningkatan, angkatan kerja laki-laki masih tetap tertinggi hingga tahun 2030 yakni sebesar 90,71 persen, atau menjadi sebanyak 2.054.515 orang, menurun 26,75 persen atau 787.515 orang secara jumlah. Hal ini didasari bahwa secara patriarki laki-laki adalah tulang punggung keluarga yang secara tidak langsung mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya sehingga lebih banyak terlibat di angkatan kerja.

Berbanding terbalik dengan angkatan kerja laki-laki, angkatan kerja perempuan yang tergolong rendah memiliki pola yang terus menurun hingga tahun 2028, baik dari segi proporsi maupun jumlahnya. Diperkirakan angkatan kerja perempuan ini menurun dari 713.607 orang di tahun 2024 menjadi 210.422 orang pada tahun 2036 (36,04 persen menjadi 9,29 persen). Selain meningkatnya pembangunan di Kabupaten Bandung yang berimbas pada terciptanya kesempatan kerja yang semakin besar, faktor menurunnya ketimpangan gender diperkirakan juga mempengaruhi kondisi tersebut. Kemunculan komitmen *zero harassment* di industri sebagai perwujudan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi membuka peluang bagi perempuan untuk

terjun berpartisipasi ke dunia usaha dan industri. Saat ini, tidak lagi hanya laki-laki yang turut andil dalam melakukan pekerjaan, melainkan para perempuan pun dapat semakin berperan ke dalam angkatan kerja.

Tabel 3.11
Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	1.266.565	1.835.432	1.877.910	1.921.732	1.965.776	2.010.039	2.054.515
Perempuan	713.607	187.003	192.536	196.975	201.436	205.918	210.422
JUMLAH	1.980.172	2.022.436	2.070.446	2.118.706	2.167.212	2.215.957	2.264.937

4. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan

Komposisi angkatan kerja di Kabupaten Bandung diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berasal dari Perkotaan. Jumlah Angkatan kerja Perkotaan menurut Perkotaan/Perdesaan di Kabupaten Bandung diperkirakan meningkat dari tahun 2024 hingga 2030 Perkiraan AK sebesar 1.980.172 pada tahun 2024 dan menjadi 2.264.937 orang pada tahun 2030. Dimana perkiraan AK Perkotaan 1.307.501 pada tahun 2024 menjadi 2.054.515 pada tahun 2030, dan Perkiraan AK Perdesaan 672.671 orang pada tahun 2024 menjadi 210.422 orang pada tahun 2030.

Tabel 3.12
Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

DAERAH	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perkotaan	1.307.501	1.835.432	1.877.910	1.921.732	1.965.776	2.010.039	2.054.515
Perdesaan	672.671	187.003	192.536	196.975	201.436	205.918	210.422
JUMLAH	1.980.172	2.022.436	2.070.446	2.118.706	2.167.212	2.215.957	2.264.937

BAB IV

PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

4.1. PERKIRAAN PEREKONOMIAN

Perekonomian Kabupaten Bandung diperkirakan sampai tahun 2026 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perbaikan perekonomian ini seiring adanya implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) setelah terkena dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat banyak kegiatan perekonomian menjadi berkurang atau tutup. Setelah setahun lebih pandemi Covid-19 melanda Indonesia, perekonomian Kabupaten Bandung mulai membaik setelah sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,80 persen. Secara umum, PDRB Kabupaten Bandung diperkirakan akan tumbuh pada kisaran angka 4,63 persen pada tahun 2024, terus meningkat menjadi 4,85 persen pada tahun 2030. Sejalan dengan berbagai aktivitas seperti sekolah kembali tatap muka, work from office, dan leisure yang kembali bergairah dimana berbagai destinasi wisata mulai ramai dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beberapa lapangan usaha diperkirakan laju pertumbuhannya akan mengalami pergeseran selama tahun 2024 hingga 2030 diantaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial, real estat, jasa perusahaan, informasi komunikasi, transportasi dan pergudangan dan jasa lainnya. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi tertinggi diperkirakan pada sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yakni

sebesar 9,24 persen dan diperkirakan meningkat menjadi sebesar 10,79 persen pada tahun 2030. Peningkatan kebutuhan obat-obatan, peralatan kesehatan, serta layanan test PCR Covid-19 khususnya selama kasus Covid-19 belum berakhir (diperkirakan masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan) membuat jasa kesehatan pertumbuhannya selalu positif karena sektor ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kesehatan.

Sektor lain yang pertumbuhannya tinggi pada tahun 2024 adalah real estat dan jasa perusahaan, masing-masing sebesar 8,95 persen dan 8,83 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi terendah diperkirakan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tercatat pada tahun 2024 sebesar -0,43 persen, namun tahun 2030 diperkirakan pertumbuhannya masih menurun menjadi sebesar -0,66 persen.

Masih di periode yang sama diperkirakan beberapa sektor pertumbuhannya mengalami peningkatan diantaranya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pertumbuhan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2024 diperkirakan mencapai angka 5,61 persen meningkat menjadi 7,42 persen pada tahun 2030. Target ini optimis bisa dicapai dikarenakan penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Bandung sangat meningkat sehingga prospek teknologi informasi dapat meningkatkan nilai tambah sektor informasi komunikasi khususnya di era industri 4.0.

Demikian juga untuk sektor transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya diperkirakan masih akan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2024 sampai dengan 2030, sektor transportasi

dan pergudangan ini sangat mendukung pendistribusian hasil-hasil industri dan perdagangan yang terdapat di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung. Selain itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 sampai saat ini diperkirakan meningkatkan kemampuan daya beli pada masyarakat sampai beberapa tahun kedepan.

Tabel 4.1
Perkiraan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(%)

No	Lapangan Usaha	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,11	1,06	1,79	1,32	1,39	1,50	1,41
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,43	-1,05	-0,47	-0,65	-0,73	-0,62	-0,66
3	Industri Pengolahan	4,65	5,00	4,26	4,64	4,63	4,51	4,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	1,51	2,73	1,97	2,07	2,26	2,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,71	2,29	1,73	2,58	2,20	2,17	2,32
6	Konstruksi	3,30	4,01	4,97	4,09	4,36	4,48	4,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,78	5,43	5,69	5,63	5,58	5,63	5,62
8	Transportasi dan Pergudangan	7,03	10,08	9,99	9,03	9,70	9,58	9,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,61	7,43	8,21	7,08	7,57	7,62	7,42
10	Informasi dan Komunikasi	8,08	7,60	8,16	7,95	7,90	8,00	7,95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,50	2,14	3,55	2,73	2,81	3,03	2,85
12	Real Estat	8,95	7,71	8,38	8,35	8,14	8,29	8,26
13	Jasa Perusahaan	8,83	8,66	9,00	8,83	8,83	8,89	8,85
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,16	1,09	1,40	0,88	1,12	1,13	1,04
15	Jasa Pendidikan	4,79	4,72	5,67	5,06	5,15	5,29	5,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,24	11,11	11,22	10,52	10,95	10,90	10,79
17	Jasa lainnya	6,76	8,61	8,77	8,05	8,48	8,43	8,32
	Perkiraan Laju Pertumbuhan	4,63	4,98	4,86	4,82	4,89	4,85	4,85

Struktur PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bandung diperkirakan ditopang oleh sektor Transportasi dan pergudangan, kemudian diikuti Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Sektor Jasa Lainnya. Sektor industri pengolahan diperkirakan menyumbang PDRB sebesar 4,65 persen di tahun 2024.

Sektor lain yang mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB adalah Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, Pengadaan air, Pengelolaan Sampai, Limbah dan Daur ulang, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi dan real estat. Penurunan kontribusi terbesar diperkirakan dialami oleh sektor Pengadaan air, Pengelolaan Sampai, Limbah dan Daur ulang. Penurunan ini mengindikasikan bahwa tren pandemi yang mengurangi mobilitas masyarakat sudah berkurang, dan interaksi sudah mengarah ke tatap muka. Selain itu, indikasi pemerataan struktur PDRB di Kabupaten Bandung diperkirakan tidak hanya ditopang dari sektor industri pengolahan, meskipun secara absolut nilai sektor ini masih sangat dominan.

Sektor-sektor lainnya yang diperkirakan mengalami peningkatan adalah Pertanian, Kehutanan, dan perikanan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya. Peningkatan kontribusi terbesar dihasilkan oleh sektor transportasi dan pergudangan yang meningkat 2,41 persen antara tahun 2024 hingga 2030.

Tabel 4.2
Perkiraan Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(%)

Kategori	Lapangan Usaha	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
B	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
H	Transportasi dan Pergudangan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
J	Informasi dan Komunikasi	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
L	Real Estat	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
P	Jasa Pendidikan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Produk Domestik Regional Bruto	97.124.010	101.960.364	106.912.741	112.066.722	117.542.101	123.248.267	129.230.380

4.2. PERKIRAAN KESEMPATAN KERJA

Kesempatan kerja di Kabupaten Bandung diperkirakan akan meningkat tahun 2024 hingga 2030. Pada tahun 2024, kesempatan kerja yang tercipta diperkirakan sebesar 1.842.191 orang dan terus meningkat menjadi 2.138.755 orang pada tahun 2030. Sehingga peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Bandung mencapai 296.564 orang selama periode tersebut. Dalam subbab ini, perkiraan kesempatan terbagi menjadi beberapa karakteristik, diantaranya perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha, perkiraan kesempatan kerja menurut golongan umur, perkiraan kesempatan kerja menurut tingkat pendidikan, perkiraan kesempatan kerja menurut jenis kelamin, perkiraan kesempatan kerja menurut status pekerjaan, perkiraan kesempatan kerja menurut jabatan, dan perkiraan kesempatan kerja menurut jam kerja.

1. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha yang diperkirakan menyerap tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 adalah Industri pengolahan, yaitu sebesar 525.100 orang. Sektor ini diperkirakan masih terus bertumbuh positif dan menyerap mayoritas tenaga kerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2030. Pada tahun 2030, diperkirakan kesempatan kerja yang tercipta pada sektor Industri pengolahan adalah 609.633 orang, atau meningkat 84.533 orang selama periode tahun 2024-2030. Meningkatnya kesempatan kerja yang tercipta pada sektor ini diperkirakan karena tumbuh pesatnya perdagangan retail di hampir seluruh wilayah pemukiman padat penduduk. Penggunaan kendaraan bermotor juga turut menjadi andil atas besarnya reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Bandung.

Industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan dalam indikator kesempatan kerja menurut lapangan usaha ini. Kesempatan kerja yang tercipta diperkirakan sebesar 525.100 orang di tahun 2024 dan meningkat menjadi 609.633 orang di tahun 2026. Sedangkan ditinjau dari persentase kenaikannya, sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang mengalami peningkatan kesempatan kerja yang signifikan. Kesempatan kerja yang tercipta di sektor ini diperkirakan meningkat sebesar 28,50 persen dari tahun 2024 hingga 2030.

Tabel 4.3
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

Kategori	Lapangan Usaha	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	125.189	128.817	133.060	136.109	139.172	142.250	145.342
B	Pertambangan dan Penggalian	2.424	2.494	2.576	2.635	2.695	2.754	2.814
C	Industri Pengolahan	525.100	540.319	558.116	570.904	583.753	596.664	609.633
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.363	6.547	6.763	6.918	7.073	7.230	7.387
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.299	11.626	12.009	12.284	12.561	12.838	13.118
F	Konstruksi	147.318	151.588	156.581	160.169	163.774	167.396	171.034
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	420.935	433.135	447.402	457.652	467.953	478.302	488.699
H	Transportasi dan Pergudangan	101.007	103.934	107.358	109.817	112.289	114.773	117.267
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	146.927	151.185	156.165	159.743	163.339	166.951	170.580
J	Informasi dan Komunikasi	20.146	20.730	21.413	21.903	22.396	22.892	23.389
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.297	19.857	20.511	20.981	21.453	21.927	22.404
L	Real Estat	10.231	10.527	10.874	11.123	11.374	11.625	11.878
M,N	Jasa Perusahaan	57.853	59.530	61.491	62.900	64.316	65.738	67.167
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19.976	20.555	21.232	21.719	22.207	22.698	23.192
P	Jasa Pendidikan	83.287	85.701	88.524	90.552	92.590	94.638	96.695

Kategori	Lapangan Usaha	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21.879	22.513	23.254	23.787	24.323	24.860	25.401
R,S,T,U	Jasa lainnya	122.959	126.523	130.690	133.684	136.693	139.716	142.753
	Jumlah	1.842.191	1.895.581	1.958.018	2.002.880	2.047.960	2.093.253	2.138.755

2. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur

Berdasarkan golongan umur, diperkirakan jumlah pertambahan kesempatan kerja selama periode 2024-2030 terus menunjukkan peningkatan. Pada golongan umur 15-19 tahun secara absolut diperkirakan mengalami peningkatan jumlah kesempatan kerja, namun secara persentase mengalami penurunan. Pada tahun 2024 kesempatan kerja yang tercipta pada golongan umur 15-19 tahun diperkirakan 79.497 orang, di tahun 2030 diperkirakan jumlahnya bertambah menjadi 92.295 orang, atau meningkat 12.798 orang. Upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan partisipasi penduduk ke dalam dunia pendidikan diperkirakan memberikan dampak positif pada tahun 2024-2030 ini.

Pada golongan umur lainnya, kelompok umur muda hingga dewasa (35-54 tahun) menunjukkan angka yang relatif seimbang. Kontribusi kedua kelompok umur tersebut diperkirakan mencapai lebih 130.503 orang di setiap kelompok golongannya. Kondisi ini diperkirakan besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan, jasa konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mengambil proporsi besar penduduk usia produktif.

Sedangkan untuk golongan umur tua (55-65+ tahun) masih menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Diperkirakan pada golongan umur 50-54 tahun meningkat sebanyak 166.277 orang dan golongan umur 55-59 tahun sebanyak 123.559 orang. Bahkan

pada golongan umur 65+ tahun diperkirakan mengalami penambahan kesempatan kerja terbesar dari seluruh kategori umur, yaitu mencapai 176.675 orang. Pada golongan umur tua ini peningkatan tidak hanya terjadi secara absolut namun juga persentase dari total kesempatan kerja yang tercipta. Kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus melibatkan pekerja lansia ke dalam kegiatan-kegiatan produktif memberikan dampak positif terhadap kesempatan kerja yang tercipta. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah melibatkan kelompok purna untuk menjadi pengajar-pengajar di dunia pendidikan.

Tabel 4.4
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15-19	79.497	81.801	84.496	86.432	88.377	90.332	92.295
20-24	199.569	205.353	212.117	216.977	221.860	226.767	231.696
25-29	223.045	229.509	237.069	242.501	247.959	253.443	258.952
30-34	229.184	235.826	243.594	249.175	254.784	260.418	266.079
35-39	204.493	210.420	217.351	222.331	227.335	232.363	237.413
40-44	229.817	236.477	244.266	249.863	255.487	261.137	266.813
45-49	210.075	216.164	223.284	228.400	233.540	238.705	243.894
50-54	166.277	171.096	176.732	180.781	184.850	188.938	193.045
55-59	123.559	127.140	131.328	134.337	137.360	140.398	143.450
60+	176.675	181.795	187.783	192.086	196.409	200.753	205.117
JUMLAH	1.842.191	1.895.581	1.958.018	2.002.880	2.047.960	2.093.253	2.138.755

3. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tuntutan keterampilan yang semakin tinggi dalam dunia kerja diperkirakan akan terus mewarnai pergeseran struktur kesempatan kerja yang tercipta. Sebagaimana dapat dilihat bahwa tren peningkatan kesempatan kerja terutama pada kelompok pendidikan SD ke bawah diperkirakan terus terjadi. Jumlah kesempatan kerja pada tingkat ini diperkirakan sebesar 616.025

orang pada tahun 2024 dan terus menurun hingga mencapai 715.196 di tahun 2030.

Pada pendidikan SMP hingga universitas tren kesempatan kerja yang tercipta diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan pada tingkat pendidikan SMA Kejuruan yang meningkat dari 196.044 orang di tahun 2024 menjadi 227.605 orang di tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMA Kejuruan mulai mendapatkan pengakuan di dunia kerja mengingat sebelumnya tingkat pendidikan ini menjadi penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia.

Sejalan dengan SMA Kejuruan, hal positif juga terjadi pada tingkat universitas di mana kesempatan kerja yang tercipta diperkirakan meningkat dari 122.708 orang di tahun 2024 menjadi 142.462 orang di tahun 2030. Upaya keras yang dilakukan pemerintah khususnya Kabupaten Bandung untuk meningkatkan link and match dunia pendidikan dan dunia kerja memberikan dampak positif terhadap transisi lulusan pendidikan formal ini.

Tabel 4.5
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
≤SD	616.025	633.879	654.758	669.760	684.834	699.980	715.196
SMP	436.791	449.450	464.255	474.892	485.580	496.319	507.108
SMA Umum	439.395	452.129	467.022	477.722	488.474	499.278	510.131
SMA Kejuruan	196.044	201.726	208.371	213.145	217.942	222.762	227.605
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	31.226	32.131	33.190	33.950	34.714	35.482	36.253
UNIVERSITAS	122.708	126.265	130.424	133.412	136.415	139.432	142.462
JUMLAH	1.842.191	1.895.581	1.958.018	2.002.880	2.047.960	2.093.253	2.138.755

4. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Selama periode 2024-2030, diperkirakan kesempatan kerja menurut jenis kelamin Kabupaten Bandung tertinggi adalah laki-laki. Komposisi jumlah kesempatan kerja laki-laki diperkirakan sebanyak 1.171.080 orang pada tahun 2024, dan akan terus meningkat menjadi 1.932.588 orang pada tahun 2030. Terjadi peningkatan sebanyak 761.508 orang. Sedangkan untuk komposisi jumlah kesempatan kerja perempuan, diperkirakan 671.111 orang di tahun 2024 dan sebanyak 206.167 orang pada tahun 2030, menurun 464.944 orang, lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kesempatan kerja laki-laki yang berkembang. Lebih banyaknya perkiraan kesempatan kerja laki-laki daripada perempuan merupakan hal wajar dalam kondisi ketenagakerjaan. Kondisi wanita di Indonesia, pada umumnya tanggung jawab pekerjaan rumah tangga akan diserahkan kepada wanita pada saat mulai dianggap dewasa dan mampu mengemban tanggung jawab. Selain itu, tenaga kerja laki-laki juga dianggap memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi daripada tenaga kerja perempuan.

Meskipun secara absolut menunjukkan demikian, namun secara proporsi berkata lain. Dalam proporsi, kesempatan kerja laki-laki diperkirakan akan terus mengalami penurunan dibandingkan dengan kesempatan kerja perempuan yang justru meningkat. Pada tahun 2024, proporsi kesempatan kerja laki-laki diperkirakan sebesar 63,57 persen dan di tahun 2030 menjadi 90,36 persen.

Tabel 4.6
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	1.171.080	1.712.855	1.769.273	1.809.811	1.850.545	1.891.472	1.932.588
Perempuan	671.111	182.726	188.745	193.069	197.415	201.781	206.167
JUMLAH	1.842.191	1.895.581	1.958.018	2.002.880	2.047.960	2.093.253	2.138.755

5. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan

Kesempatan kerja menurut status pekerjaan dikategorikan menjadi 2 (dua), formal dan informal. Status pekerjaan formal mencakup berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan pekerja/buruh/karyawan. Sedangkan informal mencakup berusaha sendiri tanpa bantuan, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Kesempatan kerja menurut status pekerjaan di Kabupaten Bandung diperkirakan masih akan didominasi oleh tenaga kerja formal. Sektor formal diperkirakan mencapai 1.023.780 orang pada 2024, dan jumlahnya terus meningkat, namun sektor formal diperkirakan masih menjadi mayoritas pada tahun 2030. Tahun 2036 secara absolut jumlah tenaga kerja sektor ini sebanyak 1.188.592 orang.

Kesempatan kerja sektor informal di Kabupaten Bandung diperkirakan sebagian besar pada status pekerjaan berusaha sendiri. Berusaha sendiri diperkirakan menciptakan kesempatan kerja sebanyak 373.400 orang pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 433.511 orang pada tahun 2030.

Jumlah kesempatan kerja pada sektor formal tertinggi diperkirakan ada pada status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai dengan kesempatan kerja yang tercipta diperkirakan sebanyak 874.309 orang pada tahun 2024, secara absolut jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 1.015.059 orang di tahun 2030.

Hakikat dari tenaga kerja sektor formal dan informal adalah pemberlakuan standar-standar ketenagakerjaan di tempat kerja, individu/kelompok pekerja, dan jaminan sosial. Sistem ketenagakerjaan di era industry 4.0 dan digitalisasi memberi dampak pada semakin tipisnya batas antara sektor formal dan informal ini. Sebagai negara berkembang yang didominasi oleh informalitas, Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara kedua sektor tersebut. Selain itu, tumbuhnya industri-industri besar di Kabupaten Bandung juga memberi dampak pada semakin terlindunginya tenaga kerja secara formal sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 4.7
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

STATUS PEKERJAAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Berusaha sendiri	373.400	384.222	396.877	405.970	415.108	424.289	433.511
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	149.471	153.803	158.869	162.509	166.166	169.841	173.533
3. Berusaha dibantu buruh tetap	66.443	68.368	70.620	72.238	73.864	75.498	77.139
4. Buruh/ Karyawan /Pegawai	874.309	899.648	929.281	950.572	971.967	993.464	1.015.059

STATUS PEKERJAAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5. Pekerja bebas di Pertanian	62.772	64.591	66.718	68.247	69.783	71.327	72.877
6. Pekerja bebas di Non Pertanian	163.681	168.425	173.972	177.958	181.964	185.988	190.031
7. Pekerja tidak dibayar	152.116	156.525	161.680	165.385	169.107	172.847	176.604
JUMLAH	1.842.191	1.895.581	1.958.018	2.002.880	2.047.960	2.093.253	2.138.755

6. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan

Kesempatan kerja menurut jabatan di Kabupaten Bandung diperkirakan terus meningkat secara absolut dari tahun 2024 hingga 2030. Jabatan yang memiliki jumlah terbesar diperkirakan adalah Tenaga Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar lainnya yaitu sebanyak 932.098 orang pada tahun 2024. Secara absolut jumlahnya terus meningkat menjadi 1.082.152 orang pada tahun 2030. Jabatan dengan peningkatan kesempatan cukup tinggi antara tahun 2024 hingga 2030 diperkirakan adalah Tenaga Usaha Jasa. Jabatan tersebut diperkirakan meningkat sebanyak 600.932 orang pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebanyak 96.741 orang dan menjadi sebanyak 697.673 orang pada tahun 2030. Hal positif dari peningkatan tersebut adalah adanya indikasi modernisasi di sektor yang selama ini dianggap sebagai sektor tradisional, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kesempatan kerja bagi pekerja terampil pada sektor ini juga diharapkan dapat menarik minat generasi muda Kabupaten Bandung untuk terjun langsung ke lapangan.

Peningkatan juga terjadi Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan serta tenaga tata usaha dan yang sejenis. Pergerakan positif kelompok jabatan yang dikategorikan tinggi ini diperkirakan sebagai dampak dari meningkatnya permintaan sektor industri dan jasa terhadap tenaga kerja dengan keterampilan menengah hingga tinggi.

Tabel 4.8
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan Kabupaten
Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

JENIS PEKERJAAN/JABATAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0/1. Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis	41.099	42.290	43.683	44.683	45.689	46.700	47.715
2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan	84.655	87.108	89.977	92.039	94.110	96.192	98.283
3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis	69.519	71.534	73.890	75.583	77.284	78.994	80.711
4. Tenaga usaha penjualan	60.566	62.321	64.374	65.849	67.331	68.820	70.316
5. Tenaga usaha jasa	600.932	618.348	638.715	653.350	668.055	682.830	697.673
6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	53.322	54.868	56.675	57.973	59.278	60.589	61.906
7/8/9/X/00. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, Lainnya	932.098	959.112	990.704	1.013.403	1.036.212	1.059.129	1.082.152
JUMLAH	1.842.191	1.895.581	1.958.018	2.002.880	2.047.960	2.093.253	2.138.755

7. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja

Salah satu pekerjaan rumah terbesar ketenagakerjaan di Indonesia adalah tingginya angka setengah penganggur atau sering juga disebut pekerja tidak penuh. Setengah penganggur merupakan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih bersedia menerima pekerjaan lain. Porsi kesempatan kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 diperkirakan sebanyak 460.702 orang atau 25,01

persen dari total kesempatan kerja yang tercipta di tahun tersebut. Jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun hingga diperkirakan mencapai 534.867 orang di tahun 2030.

Diperkirakan banyaknya masyarakat yang bekerja di perusahaan atau tempat kegiatan produksi lainnya, baik sebagai tenaga kontrak maupun tetap, sehingga mendominasinya penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Hal ini terlihat juga dari banyaknya pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pekerja.

Tabel 4.9
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja Kabupaten
Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

JAM KERJA	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0*)	17.664	18.176	18.775	19.205	19.637	20.072	20.508
1 – 9	55.918	57.539	59.434	60.796	62.164	63.539	64.920
10 -14	39.406	40.548	41.883	42.843	43.807	44.776	45.749
15 – 24	164.151	168.908	174.472	178.469	182.486	186.522	190.577
25 – 34	183.563	188.883	195.104	199.574	204.066	208.579	213.113
35 – 44	493.761	508.071	524.806	536.830	548.913	561.053	573.249
45 – 59	610.164	627.848	648.528	663.387	678.318	693.320	708.391
60+	277.564	285.608	295.016	301.775	308.567	315.392	322.247
JUMLAH	1.842.191	1.895.581	1.958.018	2.002.880	2.047.960	2.093.253	2.138.755

8. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan

Tren kesempatan kerja yang tercipta di Kabupaten Bandung diperkirakan terus meningkat antara tahun 2024 hingga 2030. Jumlah kesempatan kerja pada tahun 2024 diperkirakan sebanyak 1.842.191 orang dan meningkat menjadi 2.138.755 orang di tahun 2030. Dari jumlah tersebut, berdasarkan perkiraan kesempatan kerja berdasarkan daerah perkotaan sebanyak 1.171.080 orang

pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 1.932.588 orang pada tahun 2030.

Tabel 4.10
Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Perkotaan/Perdesaan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

DAERAH	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perkotaan	1.171.080	1.712.855	1.769.273	1.809.811	1.850.545	1.891.472	1.932.588
Perdesaan	671.111	182.726	188.745	193.069	197.415	201.781	206.167
JUMLAH	1.842.191	1.895.581	1.958.018	2.002.880	2.047.960	2.093.253	2.138.755

4.3. PERKIRAAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting untuk menarik investasi ke suatu daerah. Secara mikro, produktivitas sebuah perusahaan dihitung dari nilai tambah output dari suatu proses produksi setelah dikurangi biaya-biaya. Secara makro, produktivitas tenaga kerja dihitung dengan pendekatan PDB atau PDRB dibagi dengan total tenaga kerja. Produktivitas dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor tertentu sesuai dengan klasifikasi lapangan usahanya. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Bandung diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, diperkirakan produktivitas tenaga kerja sebesar 54,19 persen dan terus meningkat mencapai 60,34 persen pada tahun 2030. Jika ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, sektor real estat diperkirakan merupakan sektor dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi, yaitu sebesar 55,71 persen dan meningkat menjadi 209,60 persen di tahun 2030. Sektor kedua yang diperkirakan memiliki produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Informasi dan komunikasi dengan produktivitas sebesar

133,15 persen pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 226,17 kerja pada tahun 2030.

Tren pertumbuhan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi diperkirakan masih menjadi pendongkrak produktivitas tenaga kerja di sektor informasi dan komunikasi. Pertumbuhan beberapa wilayah di Kabupaten Bandung menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru turut berkontribusi positif terhadap produktivitas tenaga kerja sektor ini. Selain itu, pemerataan pembangunan juga bergerak positif untuk mengurangi ketimpangan wilayah perdesaan-perkotaan.

Tabel 4.11
Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030

Kategori	Lapangan Usaha	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	59,64	46,44	44,42	44,29	44,07	43,84	43,59
B	Pertambangan dan Penggalian	828,30	917,35	634,49	616,54	602,14	587,07	571,17
C	Industri Pengolahan	98,16	97,50	98,52	100,00	102,41	105,48	107,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,15	17,74	14,55	14,67	14,70	14,70	14,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,76	3,36	3,07	3,02	3,04	3,07	3,06
F	Konstruksi	42,60	42,50	43,61	45,01	45,95	47,00	48,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,88	30,69	31,77	32,73	33,92	35,17	36,37
H	Transportasi dan Pergudangan	36,69	36,78	40,26	43,65	46,46	50,00	53,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,48	17,58	17,76	18,94	19,85	20,92	22,09
J	Informasi dan Komunikasi	133,15	161,96	180,84	190,70	202,05	213,92	226,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,72	41,78	33,85	34,38	34,73	34,97	35,32
L	Real Estat	55,71	129,46	166,14	175,09	186,40	197,81	209,60
M,N	Jasa Perusahaan	5,55	6,90	9,29	9,87	10,54	11,26	12,00
O	Administrasi Pemerintahan,	97,58	86,99	71,32	71,06	70,22	69,71	69,10

Kategori	Lapangan Usaha	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib							
P	Jasa Pendidikan	32,05	36,02	40,04	41,43	42,74	44,05	45,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,77	54,00	50,65	55,29	59,75	65,03	70,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	12,83	15,30	19,62	20,97	22,16	23,59	25,07
	Produktivitas	54,19	52,80	54,26	55,54	57,03	58,79	60,34

4.4. PERKIRAAN PELATIHAN TENAGA KERJA

Kebijakan pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, dimana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja.

Pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh lembaga pelatihan memerlukan informasi mengenai jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Jenis pelatihan dapat direncanakan lebih baik apabila sistem informasi pasar kerja dapat dibangun. Hal ini juga dapat mengurangi berbagai kegiatan pelatihan yang tidak relevan terhadap permintaan pasar kerja. Terbentuknya sistem informasi pasar kerja sangat bermanfaat pula bagi pengambil kebijakan untuk menyusun kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan daya saing.

Kebijakan pelatihan memerlukan dukungan data tentang seberapa besar sebenarnya tenaga kerja kita yang perlu dilatih. Data ini dapat diperoleh dari tambahan kesempatan kerja. Secara lebih spesifik data yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja yang

perlu mendapatkan pelatihan adalah data penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, lapangan usaha, jabatan dan tingkat pendidikan. Dari keempat data tersebut selanjutnya dilakukan perkiraan untuk menghasilkan seberapa besar tambahan kesempatan kerja yang tercipta.

Pada periode 2024 diperkirakan akan ada tambahan kesempatan kerja sebanyak 85.863 orang. Dari jumlah tambahan kesempatan kerja itu, yang diperkirakan memerlukan pelatihan tenaga kerja adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu, dan buruh/karyawan/pekerja dengan tingkat pendidikan SMP, SMA Umum dan SMA Kejuruan. Diperkirakan dari ketiga status pekerjaan dengan tingkat pendidikan tersebut ada sebanyak 68.219 orang, yang perlu mendapatkan pelatihan kerja dengan fokus untuk kewirausahaan (berusaha sendiri dan berusaha dibantu) sebanyak 27.468 orang dan pelatihan untuk pekerja/buruh/karyawan sebanyak 40.751 orang.

Tabel 4.12
Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

STATUS PEKERJAAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Berusaha sendiri	17.404	10.822	12.656	9.093	9.137	9.181	9.223
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	6.967	4.332	5.066	3.640	3.658	3.675	3.692
3. Berusaha dibantu buruh tetap	3.097	1.926	2.252	1.618	1.626	1.634	1.641
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	40.751	25.339	29.633	21.292	21.395	21.496	21.595
5. Pekerja bebas di Pertanian	2.926	1.819	2.128	1.529	1.536	1.543	1.550
6. Pekerja bebas di Non Pertanian	7.629	4.744	5.548	3.986	4.005	4.024	4.043
7. Pekerja tidak dibayar	7.090	4.409	5.156	3.704	3.722	3.740	3.757
JUMLAH	85.863	53.390	62.437	44.862	45.080	45.293	45.502

BAB V

KESEIMBANGAN TENAGA KERJA

Perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan melalui sisi persediaan dan kebutuhan. Persediaan tenaga kerja menjadi tumpuan awal yang menentukan kuantitas dan kualitas tenaga kerja dalam proses perencanaan tenaga kerja, sedangkan kebutuhan tenaga kerja adalah lapangan pekerjaan yang harus diciptakan atau kesempatan kerja yang tersedia akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Kondisi Kabupaten Bandung cenderung surplus akan persediaan tenaga kerja. Berdasarkan hasil Sakernas BPS hingga Agustus 2023, sebanyak 122.429 orang warga Kabupaten Bandung masuk dalam kategori pengangguran.

Salah satu faktor penyebab tingginya jumlah penganggur di Kabupaten Bandung, dikarenakan adanya ancaman PHK yang dialami pekerja di Kabupaten Bandung akibat Pandemi Covid-19. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap pasar tenaga kerja. Menurunnya aktivitas ekonomi membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, sebanyak 122.429 orang warga di Kabupaten Bandung menjadi penganggur akibat pandemi Covid-19.

Besarnya angka pengangguran di Kabupaten Bandung menunjukkan belum terlalu baik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung dimana adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara beberapa kecamatan dan aktivitas perekonomian yang ada belum bisa menyerap semua angkatan kerja yang tersedia. Hal ini pun menjadi tugas utama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersinergi bersama meminimalisir jumlah pengangguran. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Bandung, salah satunya dengan penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya. Sejalan dengan berbagai upaya yang sedang dan akan dilakukan, maka angka penganggur terbuka diharapkan akan terus menurun sehingga pada tahun 2024 diperkirakan menjadi 137.981 orang dan pada empat tahun kedepan yakni tahun 2028 menurun lagi menjadi 119.252 orang. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) juga diharapkan terus menurun menjadi 6,97 persen pada tahun 2024 dan menjadi 5,57 persen pada tahun 2030.

5.1.PERKIRAAN PENGANGGUR TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR

Jumlah penganggur terbuka menurut golongan umur memiliki kecenderungan, yakni semakin tinggi umur angkatan kerja maka semakin rendah jumlah penganggurannya kecuali pada golongan umur 20-24 tahun. Jumlah penganggur pada golongan umur 20-24 tahun diperkirakan masih lebih tinggi dibandingkan golongan umur 15-19 tahun. Secara umum diperkirakan pada tahun 2024-2030 semua golongan umur akan mengalami penurunan jumlah penganggur. Kelompok usia muda (15-24 tahun) diperkirakan

masih akan mendominasi jumlah penganggur di Kabupaten Bandung.

Penganggur pada golongan umur 15-24 tahun merupakan penduduk usia sekolah yang selayaknya melakukan kegiatan pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Diperkirakan kelompok usia muda ikut terjun ke pasar kerja, dikarenakan beberapa hal antaranya kesulitan ekonomi keluarga sehingga memaksa mereka untuk berhenti melanjutkan pendidikan dan terpaksa masuk ke dunia kerja. Sementara Pasal 68 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Definisi anak dalam peraturan tersebut “anak adalah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Adanya aturan tersebut maka perusahaan tidak akan menerima pekerja anak dan memilih mempekerjakan karyawan yang sudah berpengalaman dan memiliki keahlian, sedangkan mereka dinilai masih kurang akan hal tersebut sehingga menyebabkan mereka ikut terjebak dalam kelompok pengangguran. Dengan demikian, menurunkan target pengangguran pada kelompok usia sekolah merupakan “PR” yang berat bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Agar target kedepan masih bisa ditekan lagi, tentunya perlu upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah berkoordinasi dengan swasta dan masyarakat.

Tabel 5.1
Perkiraan Jumlah Penganggur Terbuka
Menurut Golongan Umur
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15-19	43.219	39.734	35.215	36.280	37.353	38.434	39.523
20-24	52.939	48.670	43.135	44.439	45.753	47.077	48.412
25-29	14.569	13.394	11.871	12.230	12.592	12.956	13.323

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
30-34	9.827	9.034	8.007	8.249	8.493	8.739	8.986
35-39	3.078	2.830	2.508	2.584	2.660	2.737	2.815
40-44	1.232	1.133	1.004	1.034	1.065	1.095	1.127
45-49	4.169	3.833	3.397	3.500	3.603	3.707	3.812
50-54	5.847	5.376	4.764	4.908	5.053	5.200	5.347
55-59	0	0	0	0	0	0	0
60+	3.102	2.851	2.527	2.604	2.681	2.758	2.836
JUMLAH	137.981	126.855	112.428	115.826	119.252	122.704	126.182

Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Bandung empat tahun ke depan diperkirakan akan terus menurun walaupun penurunannya tidak terlalu besar tiap tahunnya. Hal ini diperkirakan terbatasnya peluang pekerjaan yang ada, namun jumlah peminatnya juga banyak. Pertambahan penduduk usia kerja yang masuk kelompok angkatan kerja baru setiap tahunnya bertambah banyak yang tidak dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja menyebabkan pengangguran. Tingginya TPT pada golongan umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun diperkirakan pada umumnya kedua golongan umur tersebut merupakan golongan umur yang baru menyelesaikan pendidikan menengah atas atau pendidikan tinggi baik diploma maupun universitas.

Kondisi yang telah terjadi sampai saat ini, angkatan kerja golongan umur 15-24 tahun yang mengalami masa transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja belum mempersiapkan diri secara matang sehingga golongan umur tersebut menganggur karena minimnya pendidikan atau kurangnya keterampilan bahkan memilih-milih pekerjaan. Dalam upaya mencapai target atau menekan lebih rendah lagi TPT khususnya pada usia muda, maka mengembalikan

mereka ke dalam dunia pendidikan bisa dijadikan salah satu alternatif. pendidikan dalam ini bisa formal maupun informal (pelatihan-pelatihan).

Dari data perkiraan TPT untuk golongan umur 30-34 tahun diperkirakan TPT nya relatif rendah dibandingkan dengan TPT provinsi. Mulai rendahnya TPT golongan umur 30 tahun keatas sangat erat jika dikaitkan dengan siklus kehidupan karena mulai usia 30 tahun seseorang akan berada pada awal membina rumah tangga sehingga kebutuhan ekonomi semakin meningkat dan orang tidak akan terlalu memilih-milih pekerjaan

Tabel 5.2
Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka
Menurut Golongan Umur
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(%)

GOLONGAN UMUR	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15-19	35,22	32,69	29,42	29,57	29,71	29,85	29,98
20-24	20,97	19,16	16,90	17,00	17,10	17,19	17,28
25-29	6,13	5,51	4,77	4,80	4,83	4,86	4,89
30-34	4,11	3,69	3,18	3,20	3,23	3,25	3,27
35-39	1,48	1,33	1,14	1,15	1,16	1,16	1,17
40-44	0,53	0,48	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42
45-49	1,95	1,74	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54
50-54	3,40	3,05	2,62	2,64	2,66	2,68	2,70
55-59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60+	1,73	1,54	1,33	1,34	1,35	1,36	1,36
JUMLAH	6,97	6,27	5,43	5,47	5,50	5,54	5,57

5.2. PERKIRAAN PENGANGGUR TERBUKA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui SDM yang tangguh, unggul, dan berkualitas baik diharapkan dapat mengisi lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan selanjutnya akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing serta pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, jumlah penganggur terbuka menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung tiap tahun nya ditargetkan menurun, dimana penurunan paling besar akan dialami oleh penganggur terbuka lulusan SMA Kejuruan dengan persentase sebesar 12.54 persen pada tahun 2024.

Penganggur terbuka sebagian besar berada pada pendidikan menengah seperti SMA maupun SMK. Data perkiraan menunjukkan bahwa jumlah penganggur terbuka lulusan SMA lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMK. Pada tahun 2024 diperkirakan penganggur lulusan SMA sebesar 48.549 orang menurun menjadi 44.397 orang pada tahun 2030. Pendidikan SMK berorientasi kerja dimana para lulusannya diharapkan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan mereka yang menempuh jalur pendidikan umum. Tingginya jumlah penganggur lulusan SMA diduga karena kurangnya keterampilan dan kualitas pendidikan, kurangnya relevansi antara lowongan pekerjaan dan kejuruan dari pencari kerja (mismatched). Saat ini pemerintah Kabupaten Bandung berupaya untuk menghubungkan lulusan menengah atas

dengan industri besar sehingga usaha tersebut diharapkan dapat menekan angka pengangguran yang ada.

Tabel 5.3
Perkiraan Jumlah Penganggur Terbuka
Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
≤SD	27.708	25.474	22.577	23.259	23.947	24.640	25.339
SMP	24.834	22.832	20.235	20.847	21.463	22.084	22.710
SMTA Umum	48.549	44.634	39.558	40.754	41.959	43.174	44.397
SMTA Kejuruan	28.104	25.837	22.899	23.591	24.289	24.992	25.700
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	3.010	2.768	2.453	2.527	2.602	2.677	2.753
UNIVERSITAS	5.776	5.310	4.706	4.849	4.992	5.136	5.282
JUMLAH	137.981	126.855	112.428	115.826	119.252	122.704	126.182

Dari target jumlah pengangguran seperti tersebut diatas, maka kalau dilihat TPT nya menunjukkan hal yang sama yaitu TPT berpendidikan SMA lebih tinggi dibandingkan dengan TPT yang berpendidikan SMK. Pada tahun 2024 diperkirakan TPT yang berpendidikan SMK sebesar 12,54 persen diharapkan tahun 2030 bisa menurun menjadi 10,15 persen. Tingginya TPT yang berpendidikan SMK diperkirakan masih terjadinya oversupply untuk lulusan SMK dengan jurusan tertentu sementara jurusan tersebut tidak sesuai dengan industri yang berkembang di wilayahnya atau standar kelulusan SMK belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan.

Berdasarkan data perkiraan TPT terendah terdapat pendidikan maksimal SD. pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 4,30 persen menurun menjadi 3,42 persen pada tahun 2030. rendahnya TPT pendidikan Maksimal SD diperkirakan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi dengan pendidikan tersebut tidak mempunyai

bargaining position dalam hal mendapatkan pekerjaan sehingga akan menerima pekerjaan apaun.

Tabel 5.4
Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka
Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(%)

PENDIDIKAN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
≤SD	4,30	3,86	3,33	3,36	3,38	3,40	3,42
SMTp	5,38	4,83	4,18	4,21	4,23	4,26	4,29
SMTA Umum	9,95	8,99	7,81	7,86	7,91	7,96	8,01
SMTA Kejuruan	12,54	11,35	9,90	9,97	10,03	10,09	10,15
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	8,79	7,93	6,88	6,93	6,97	7,02	7,06
UNIVERSITAS	4,50	4,04	3,48	3,51	3,53	3,55	3,58
JUMLAH	6,97	6,27	5,43	5,47	5,50	5,54	5,57

5.3. PERKIRAAN PENGANGGUR TERBUKA MENURUT JENIS KELAMIN

Tabel dibawah ini menyajikan hasil proyeksi jumlah penganggur terbuka menurut jenis kelamin. Selama kurun waktu tujuh tahun ke depan (2024-2030), pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung diperkirakan akan lebih banyak didominasi oleh penduduk laki-laki dimana hampir sebanyak 2 kali dibanding perempuan. Namun, pada jenis kelamin perempuan memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 jumlah penganggur laki-laki diproyeksikan turun dari 95.485 orang (7,54 persen) menjadi 121.927 orang (5,93 persen) pada tahun 2030. Sedangkan, untuk penganggur perempuan pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 42.496 orang (5,96 persen) dan pada tahun 2030 menurun menjadi 4.254 orang (2,04 persen).

Tabel 5.5
Perkiraan Jumlah Penganggur Terbuka
Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	95.485	122.578	108.637	111.921	115.231	118.567	121.927
Perempuan	42.496	4.277	3.791	3.905	4.021	4.137	4.254
JUMLAH	137.981	126.855	112.428	115.826	119.252	122.704	126.182

Jika ditinjau dari tingkat pengangguran terbuka (TPT), dalam periode 2024-2030 menunjukkan adanya penurunan TPT. Pada tahun 2024 TPT laki-laki diperkirakan sebesar 7,54 persen dan pada tahun 2030 diperkirakan sebesar 5,93 persen. Sedangkan, untuk TPT perempuan pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 5,96 persen dan pada tahun 2030 menjadi sebesar 2,02 persen. Penurunan TPT laki-laki dan perempuan ini diperkirakan oleh banyak terserapnya mereka di pasar kerja dari adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dalam periode yang sama. Gambaran perkiraan tingkat penganggur terbuka menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.6
Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka
Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(%)

JENIS KELAMIN	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	7,54	6,68	5,79	5,82	5,86	5,90	5,93
Perempuan	5,96	2,29	1,97	1,98	2,00	2,01	2,02
JUMLAH	6,97	6,27	5,43	5,47	5,50	5,54	5,57

D. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Perkotaan/Perdesaan

Pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung diperkirakan turun tipis sebanyak 11.799 orang antara tahun 2024 hingga 2030. Jumlah tersebut tentu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bandung. Menurut hasil Perkiraan Pengangguran terbuka berdasarkan daerah Perkotaan sebesar 136.421 orang pada tahun 2024 dan diperkirakan menurun menjadi 121.927 orang pada tahun 2030. Sedangkan untuk perkiraan pengangguran terbuka berdasarkan daerah perdesaan sebanyak 1.560 orang pada tahun 2024 dan mengalami kenaikan menjadi 4.254 orang pada tahun 2030.

Tabel 5.7
Perkiraan Penganggur Terbuka
Menurut Perkotaan/Perdesaan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(Orang)

DAERAH	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perkotaan	136.421	122.578	108.637	111.921	115.231	118.567	121.927
Perdesaan	1.560	4.277	3.791	3.905	4.021	4.137	4.254
JUMLAH	137.981	126.855	112.428	115.826	119.252	122.704	126.182

Pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung diperkirakan turun 1.40 persen antara tahun 2024 hingga 2030. Menurut hasil Perkiraan Pengangguran terbuka berdasarkan daerah Perkotaan sebesar 10,43 persen pada tahun 2024 dan diperkirakan menurun menjadi 5,93 persen pada tahun 2030. Sedangkan untuk perkiraan pengangguran terbuka berdasarkan daerah perdesaan sebanyak 0,23 persen pada tahun 2024 dan mengalami kenaikan menjadi 2,02 persen pada tahun 2030.

Tabel 5.8
Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka
Menurut Perkotaan/Perdesaan
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030
(%)

DAERAH	TAHUN						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Perkotaan	10,43	6,68	5,79	5,82	5,86	5,90	5,93
Perdesaan	0,23	2,29	1,97	1,98	2,00	2,01	2,02
JUMLAH	6,97	6,27	5,43	5,47	5,50	5,54	5,57

BAB VI

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

6.1. KEBIJAKAN UMUM

Pada hakikaatnya pembangunan merupakan yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Salah satu upaya dalam pembangunan yaitu terciptanya visi sangat berperan dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya, sebuah visi tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu, visi atau gambaran masa depan tersebut sangat perlu penjelasan terkait bagaimana rencana untuk melangkah tersebut. Dalam upaya penjabaran visi dapat diakomodir oleh misi merupakan arahan dalam rangka perwujudan Kabupaten Bandung.

Visi pemerintah Kabupaten Bandung merupakan pandangan jangka panjang yang diinginkan oleh pemerintah untuk mencapai kondisi atau keadaan tertentu di masa depan (2045). Hal ini mencakup aspirasi, tujuan besar dan arah strategis yang diinginkan pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengarahkan kebijakan. Visi ini juga mencerminkan harapan untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan masyarakat dan arah kebijakan yang terjemahkan dari Nasional. Hasil perumusan Visi Kabupaten Bandung tahun 2025-2045.

“Visi Kabupaten Bandung yang **Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan**”

Gambar 6.1
Visi Kabupaten Bandung tahun 2024



Sumber: Hasil Perumusan Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Pada tahun 2045, Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi Kabupaten yang maju dan berkelas, serta melampaui standar kualitas yang ada di Kabupaten Lain di Jawa Barat maupun di Indonesia secara keseluruhan. Kabupaten Bandung kedepannya diharapkan dapat menjadi contoh dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan, pelayanan publik yang efisien dan inovatif, serta kualitas hidup masyarakat yang tinggi.

Visi ini mencerminkan tekad Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya dengan memperhatikan aspek-aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, serta ekonomi. Oleh karena itu, pada tahun 2045 Kabupaten Bandung mampu menjadi pembeda dan mampu memberikan standar hidup yang lebih baik

bagi masyarakat dan menjadikan tempat tinggal yang diminati masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia Umumnya.

Setiap kata dalam Visi Kabupaten Bandung akan dijabarkan dalam muatan-muatan dibawah ini:

Maju : Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta bertumpu pada potensi wilayah dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung sebagai wilayah yang mampu menempatkan dirinya sejajar dan sederajat dengan wilayah lain yang telah maju dengan mengandalkan potensi sumber manusia yang dimiliki dan kemampuan daya saing sebagai kunci untuk mencapai kemajuan, serta memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan, merasakan manfaat kebijakan publik, dan memiliki akses yang sama terhadap layanan sumber daya yang tersedia.

Dalam mewujudkan Visi Maju, Kabupaten Bandung bertekad paada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, pengembangan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan lingkup penyediaan akses pendidikan yang merata, peningkatan kualitas tenaga pendidik da pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat.

Agamis : Kabupaten Bandung yang beriman dan bertakwa, serta menekankan pada nilai dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan lingkungan yang mempromosikan spiritualitas, moralitas dan kepatuhan terhadap ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam interaksi sosial dimasyarakat.

Dalam mewujudkan Visi Agamis, Kabupaten Bandung bertekad memberikan dukungan dan fasilitas untuk memperkuat kehidupan beragama masyarakatnya, menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan mendukung pengembangan lembaga-lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakatnya. Memperkuat pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan, mengadopsi kebijakan yang mempromosikan toleransi dan keharmonisan antar umat beragama, serta menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Sejahtera : Kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat kabupaten Bandung secara keseluruhan.

Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi wilayah yang dapat mensejahterakan masyarakat secara holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan budaya bagi seluruh masyarakatnya, serta mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati taraf hidup yang layak, merasa aman dan memiliki kesempatan yang adil dalam mengembangkan potensi di masyarakat. Namun demikian, Kabupaten Bandung juga perlu memahami adanya sisi ketergantungan dengan wilayah lain yang

direspons dengan hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif.

Dalam mewujudkan visi sejahtera, Kabupaten Bandung bertekad untuk memperkuat basis ekonominya dengan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mendorong kewirausahaan, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mempromosikan dan melestarikan kekayaan budaya lokal sebagai bagian.

Berlanjutan : Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Pada tahun 2045 Kabupaten Bandung diharapkan dapat menjadi Kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Kabupaten Bandung bertekad untuk membangun infrastruktur dan melakukan aktivitas pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi, keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

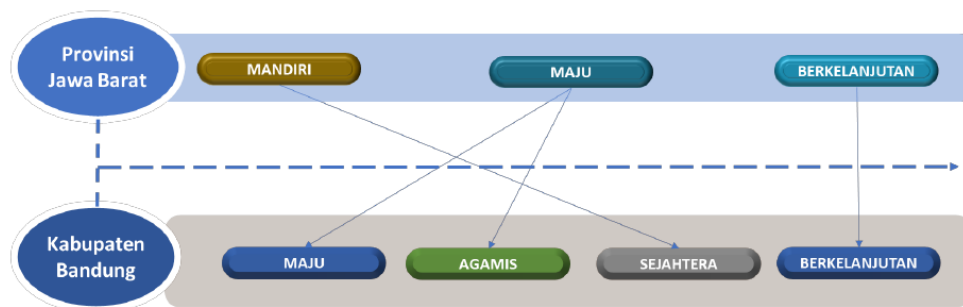
Dalam mewujudkan visi keberlanjutan Kabupaten Bandung berkomitmen menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan pelestarian ekosistem alam. Pembangunan di Kabupaten Bandung tidak hanya bertujuan untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Gambar 6.2
Keterkaitan Isu Strategis dan Visi
Kabupaten Bandung tahun 2045



Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Gambar 6.3
Penyelarasan Visi
Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat 2045



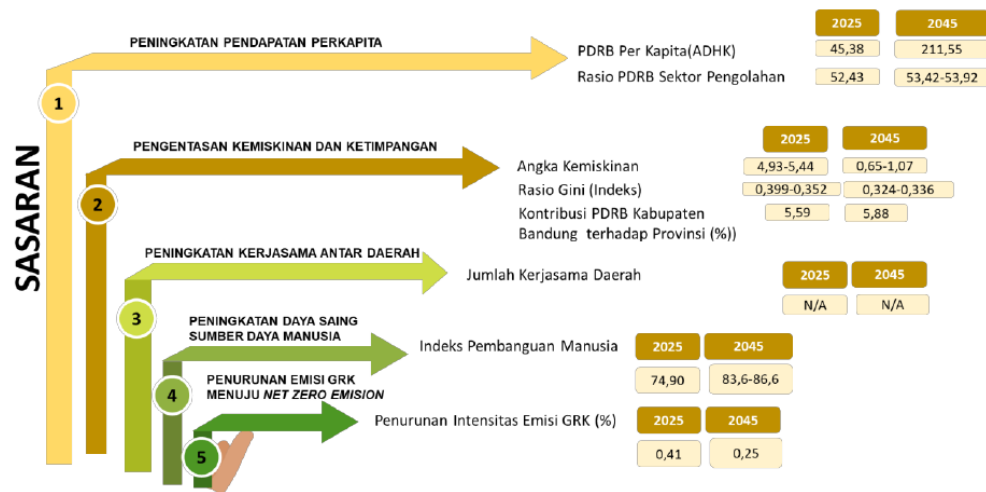
Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Pada tahun 2045, Kabupaten Bandung mempunyai Visi yang jelas untuk menjadi daerah yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan. Pada prinsipnya Visi ini tidak hanya sebagai cita-cita, namun akan diwujudkan dengan upaya partisipatif aktif dari

berbagai stakeholder yang berada di Kabupaten Bandung mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi dan asosiasi lainnya. Ketercapaian Visi Kabupaten Bandung Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan akan ditunjukkan dengan 5 (lima) sasaran visi, yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan Perkapita;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan;
3. Peningkatan Kerjasama antar Daerah;
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dan
5. Penurunan Emisi GRK menuju *net zero emission*.

Gambar 6.4
Sasaran Visi Kabupaten Bandung tahun 2045



Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung, 2024

Mendasar pada penjelasan Visi Kabupaten Bandung sebelumnya, perlunya rumusan umum yang akan menjadi panduan dan arah strategis yang berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan. Rumusan umum tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan Kabupaten Bandung untuk tahun 2045. Misi Kabupaten Bandung memiliki keselarasan dengan arah

pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPN 2025-2045 maupun dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat. Karena itu, misi Kabupaten Bandung untuk mewujudkan Kabupaten yang **Maju, Agamis, Sejahtera** dan **Berkelanjutan** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berakhlak, dan berkualitas

Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berdaya Saing memiliki makna penting dalam beberapa perananan pembangunan. Frasa ini mengandung beberapa makna penting:

Unggul : sumber daya yang “Unggul” merujuk pada individu yang memiliki keterampilan yang sangat baik dan tingkat kompetensi yang tinggi dalam bidangnya, memiliki kemampuan untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah atau menghadapi tantangan, mencari peluang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam suatu tim dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, sehingga tetap relevan dan efektif.

Berakhlak: sumber daya yang “Berakhlak” merujuk pada individu yang memiliki integritas, bersikap jujur, adil, dan menghormati hak dan martabat orang lain, serta tidak hanya memiliki keterampilan dan kompetensi yang tinggi, tetapi juga mendasarkan tindakan dan perilakunya pada nilai-nilai moral dan etika yang baik.

Bekualitas: Sumber daya yang “Berkualitas” merujuk pada individu yang inovatif dan kreatif, memiliki fokus pada

pencapaian hasil dan mencapai tujuan, memiliki kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan industri.

Selain itu dalam perwujudan misi ini adanya peran masyarakat Kabupaten Bandung yang sejahtera ekonomi, sosial dan psikologis masyarakatnya dengan memperhatikan kebutuhan dan hak setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, etnisitas, agama, atau latar belakang lainnya.

2. Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal

Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing merupakan upaya untuk membangun ekonomi yang mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal secara optimal, dan bersaing secara sehat di pasar Nasional dan Global. Transformasi ekonomi ini bertujuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, dalam proses pembangunan ekonomi, serta transformasi ekonomi berbasis kearifan lokal yang memiliki daya saing tinggi di berbagai tingkatan dengan memanfaatkan potensi keunggulan dan komparatif yang dimiliki daerah, seperti sumber daya alam, budaya lokal dan keunggulan kompetitif lainnya.

3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola pemerintahan yang transformatif bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung mampu untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan dengan cara yang membawa perubahan positif dan transformasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan teknologi, inovatif, Inklusifitas dan responsif. Teknologi bermakna memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat proses administratif, memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas. Namun, juga penting untuk memastikan akses yang setara terhadap teknologi agar tidak meninggalkan sebagian masyarakat. Responsif bermakna pemerintah yang mampu merespons dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan, aspirasi, serta perubahan dalam masyarakat. Inovatif bermakna pemerintah yang mampu menerapkan gagasan-gagasan baru, teknologi, dan pendekatan yang kreatif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Inklusifitas bermakna Pemerintah dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, dapat merasakan manfaat dari kebijakan dan program-program pemerintah.

4. Mewujudkan Kabupaten yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Bersih, Transparan dan Akuntabel merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam membuka layanan informasi secara terbuka kepada publik baik dari kebijakan, maupun tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipatif aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dipercaya oleh masyarakat dengan kemampuan pengambilan kebijakan yang cerdas dan responsif.

5. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkarakter

Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter merupakan upaya untuk membentuk masyarakat tidak hanya memiliki kesejahteraan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai budaya dalam tatanan kehidupan masyarakat dan mencerminkan karakteristik masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Upaya Kabupaten dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu yang berintegritas, bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama, serta memperkuat kekayaan budaya sebagai aset penting dalam pembangunan lokal. Selain itu partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai budaya dan karakteristik positif, serta melibatkan pembentukan komunitas yang berbasis pada nilai-nilai tersebut melalui pelatihan dan pendidikan untuk memperkuat keterampilan sosial dan kepemimpinan dalam masyarakat.

6. Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata

Mewujudkan pengembangan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata merupakan upaya Kabupaten Bandung dalam memastikan masyarakat memiliki akses yang setara ke layanan publik meliputi pendidikan, kesehatan dan transportasi. Termasuk dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai di pedesaan dan perkotaan melalui peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas publik bagi semua masyarakat. Selain itu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kecamatan di kabupaten Bandung dengan

memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, serta mengalokasikan sumber daya yang merata untuk mendukung pembangunan.

7. Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif

Meningkatkan infrastruktur yang inklusif sebagai upaya Kabupaten Bandung dapat memastikan bahwa Infrastruktur Dasar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk daerah yang terpencil dan terpinggirkan. Hal ini mencakup pembangunan jembatan, jalan dan transportasi umum yang mudah diakses, serta penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang merata, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan diseluruh Wilayah Kabupaten Bandung.

8. Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya Kabupaten Bandung untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam yang ada, termasuk hutan, air, tanah dan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan regulasi yang ketat terhadap eksploitasi yang tidak berkelanjutan, promosi praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan, serta program-program restorasi lingkungan. Selain itu perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan berbasis tata ruang yang efisien dan cermat. Ini melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, permukiman dan perindustrian yang berfokus pada pembangunan yang rendah karbon dan berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan visi dan misi jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 tersebut, maka terkait kebijakan dalam urusan ketenagakerjaan tertuang dalam Misi ke-1 yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berakhlak, dan berkualitas** dan Misi ke-2 yaitu **Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal.**

Adapun yang menjadi arah kebijakan jangka panjang terkait urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, dan pendidikan tenaga kerja bersertifikasi
2. Pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terintegrasi
3. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi
4. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, serta akses terhadap layanan keuangan.

Hasil yang diharapkan dari arah kebijakan jangka Panjang tersebut terkait dengan urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing global
2. Perwujudan pusat Kompetensi tenaga kerja terintegrasi dan Terpadu
3. Perwujudan tenaga kerja yang bersertifikasi dan berdaya saing global

Kebijakan perluasan kesempatan kerja erat kaitannya dengan perluasan investasi dan penetapan besaran upah. Investasi akan mendorong kebutuhan tenaga kerja, sebaliknya penetapan upah yang terlalu tinggi tanpa dibarengi dengan peningkatan produktivitas tidak mendorong investasi baru masuk.

6.2. KEBIJAKAN PENGENDALIAN ANGKATAN KERJA

Untuk mengendalikan angkatan kerja kebijakannya harus dimulai dari pengendalian penduduk karena meningkatnya jumlah penduduk akan memengaruhi angkatan kerja. Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk sudah lama dilakukan dengan Program Keluarga Berencana yang mendorong keluarga memiliki anak yang berkualitas dengan membatasi jumlah anak yang dimiliki.

Pengendalian tambahan angkatan kerja berkaitan dengan kebijakan pengendalian penduduk. Prioritas pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada Mewujudkan keluarga kecil dan berkualitas, peningkatan penggunaan data penduduk sebagai dasar acuan pembangunan dan memantapkan persebaran penduduk yang mandiri dan berkualitas. Untuk menghindari usia sekolah masuk ke pasar kerja maka :

1. Pelaksanaan pelatihan bagi usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan
2. Pembangunan infrastruktur pendidikan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau, agar angkatan kerja yang akan masuk ke pasar kerja dapat dikendalikan, sehingga mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Pemberian beasiswa ke perguruan tinggi sehingga diharapkan akan terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja muda.
4. Menyediakan sekolah kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah dan peningkatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.

5. Menyediakan lembaga-lembaga pelatihan yang kurikulumnya berorientasi pada dunia usaha dan dunia industri.

Pada tahun 2026 diperkirakan jumlah Angkatan kerja di kabupaten Bandung sebanyak 1.912.766 orang. Meningkat sebesar 195.390 orang dari tahun 2020. Peningkatan Angkatan kerja bisa menjadi potensi karena akan memberikan suplay tenaga kerja yang cukup pada dunia usaha yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi RPJMD. Namun peningkatan Angkatan kerja juga bisa menjadi permasalahan jika besarnya Angkatan kerja ini tidak mampu diserap oleh dunia usaha.

Mengendalikan angkatan kerja kebijakannya harus dimulai dari pengendalian penduduk karena meningkatnya jumlah penduduk akan memengaruhi angkatan kerja. Peningkatan penduduk di Kabupaten Bandung bukan hanya terjadi karena angka kelahiran namun juga disebabkan terjadinya migrasi penduduk. Berdasarkan data dari dinas kependudukan Provinsi Jawa Barat, tahun 2019-2020, Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten dengan migrasi masuk penduduk paling tinggi. Disusul Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Bekasi.

Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung harus bekerja sama dengan Kecamatan untuk secara periodik melakukan pendataan penduduk yang masuk.

Informasi yang didata berhubungan dengan ketenagakerjaan diantaranya adalah:

- a. Tujuan kedatangan
- b. Pekerjaan yang dimiliki
- c. Jenjang Pendidikan yang diselesaikan
- d. Keahlian yang dimiliki.

Berdasarkan data perkiraan yang sudah disampaikan dalam Bab 4, perkiraan peningkatan Angkatan kerja pada kelompok umur 15-19 masih cukup tinggi yaitu sebanyak 80.754 orang. Umur 15 – 18 tahun adalah usia sekolah SMP dan SMA. Jadi diantara besarnya angka pada golongan umur ini dimungkinkan ada Angkatan kerja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Untuk mengendalikan angkatan kerja terutama angkatan kerja muda dilakukan dengan mendorong penduduk usia sekolah tetap berada di sekolah. Dengan tetap bersekolah, diharapkan tidak menambah angkatan kerja baru dan kualitas pendidikan akan meningkat.

Tantangannya adalah mencegah putus sekolah anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki biaya untuk tetap bersekolah. Kebijakan pemerintah dalam mencegah putus sekolah salah satunya adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mensyaratkan keluarga penerima dana PKH yang memiliki anak usia sekolah harus menyekolahkan anaknya. Permasalahan yang muncul di daerah berkaitan dengan PKH adalah jumlah penerima PKH belum meng-cover semua masyarakat kurang mampu dan permasalahan data.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2010, namun sayangnya kembali meningkat di Tahun 2020. Rata – rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin tinggi ditandai

dengan meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Kondisi ini akan berdampak pada angka putus sekolah dan menurunkan angka melanjutkan sekolah.

Kabupaten Bandung sudah memiliki Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu program strategi yang menitikberatkan penguatan modal sosial masyarakat. Program strategi ini diharapkan dapat mendukung tercapainya penurunan tingkat kemiskinan Adapun tujuan dan sasaran program strategis Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- a. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Kabupaten Bandung baik di bidang sosial kemasyarakatan (daya tahan), bidang pemberdayaan ekonomi (daya saing dan daya tarik), maupun bidang pembangunan sarana dan prasarana dasar (daya lestari).
- b. Mengakselerasi pengembangan aktivitas usaha masyarakat berbasis klaster ekonomi dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, pelaku usaha mikro serta koperasi guna meningkatkan kewirausahaan dan skala ekonomi masyarakat, menciptakan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan ketahanan ekonomi keluarga.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat.

Selain program untuk keluarga miskin, untuk meningkatkan partisipasi sekolah Kabupaten Bandung juga memiliki program BEASTI, yaitu beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi.

Untuk masyarakat yang putus sekolah optimalisasi Pendidikan vokasional perlu terus di tingkatkan. Kabupaten Bandung melalui dinas Pendidikan sudah memiliki program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan. Beberapa agenda turunan yang diperlukan dalam melaksanakan program ini agar lebih efektif diantaranya adalah:

- a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa untuk meningkatkan akses masyarakat ke PKBM.
- b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas PKBM.
- c. Memfasilitasi sarana dan prasarana PKBM.
- d. Memfasilitasi peningkatan kualitas tenaga pendidik pada PKBM.

6.3. KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja atau tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilannya. Namun mengingat jumlah angkatan kerja sangat besar sehingga pelatihan tidak cukup dilakukan oleh pemerintah. UU Cipta Kerja menyebutkan pelatihan kerja dapat diselenggarakan tiga pihak yaitu a) lembaga pelatihan kerja pemerintah, b) lembaga pelatihan kerja swasta, dan c) lembaga pelatihan kerja perusahaan. Selain pelatihan, kerja sama pemerintah dan swasta (industri) sangat penting terutama dalam program pemagangan yang memberikan kesempatan bagi calon tenaga kerja untuk belajar dan mengalami atmosfer dunia kerja.

Program dan Kegiatan yang dapat direalisasikan berdasarkan nomemklatur dengan Program Pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- a Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- b Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- c Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
- d Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
- e Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- f Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil

Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan pendidikan pada periode 2023-2026:

1. Melanjutkan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana, yang didukung dengan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya.
2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
3. Merintis Program Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.
4. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global, melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional. Pada periode juga ditempuh upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya. Mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan melalui penerapan keterampilan dan

penguasaan multimedia yang telah diperoleh. Sedangkan upaya pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Sedangkan kebijakan pelatihan pada periode 2023-2026 yang terencana dan terarah antara lain:

1. Menciptakan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang representatif bagi para angkatan kerja baru maupun korban PHK dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
2. Mendayagunakan seluruh potensi lembaga pelatihan baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan perusahaan, revitalisasi BLK serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kualitas lulusan dengan prioritas kejuruan unggulan yang banyak dibutuhkan oleh pasar kerja.
3. Menciptakan lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang mampu melayani permintaan sertifikasi berbagai profesi.
4. Pengembangan standar kompetensi yang mengacu pada kebutuhan industri (pasar dalam negeri dan luar negeri).
5. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi yang menghasilkan kualifikasi sesuai kebutuhan industri.
6. Melakukan sertifikasi kompetensi bagi instruktur, luaran diklat dan tenaga kerja pengalaman.
7. Mengembangkan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan dunia industri.
8. Mendorong peningkatan pelaksanaan pemagangan dalam dan luar negeri baik kuantitas maupun kualitas.

Selain pelatihan, kerja sama pemerintah dan swasta (industri) sangat penting terutama dalam program pemagangan yang memberikan kesempatan bagi calon tenaga kerja untuk belajar dan mengalami atmosfer dunia kerja. Berdasarkan perkiraan status pekerjaan berdasarkan Pendidikan tenaga kerja diperkirakan yang paling banyak adalah dari lapangan usaha yang berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap, urutan kedua adalah buruh/karyawan/pegawai. Tingkat Pendidikan yang paling banyak adalah SMA dan SMK.

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja maka kebijakan yang diperlukan adalah:

- a. Menciptakan lembaga pelatihan kerja yang representatif bagi para angkatan kerja baru maupun korban PHK dalam mendapatkan pekerjaan yang layak;
- b. Mendayagunakan seluruh potensi lembaga pelatihan baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan perusahaan, revitalisasi BLK serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kualitas lulusan dengan prioritas kejuruan unggulan yang banyak dibutuhkan untuk pasar kerja yaitu pelatihan teknologi tepat guna pada bidang pertanian, pengolahan makanan, menjahit dan konstruksi.
- c. Mendorong adanya lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang mampu melayani permintaan sertifikasi berbagai profesi.
- d. Pengembangan standar kompetensi yang mengacu pada kebutuhan industri (pasar dalam negeri dan luar negeri)
- e. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi yang menghasilkan kualifikasi sesuai kebutuhan industri

- f. Melakukan sertifikasi kompetensi bagi instruktur, luaran diklat dan tenaga kerja pengalaman bekerjasama dengan BNSP atau LSP.
- g. Mengembangkan kerjasama dengan pihak industri
- h. Terus mendorong peningkatan pelaksanaan pemagangan dalam negeri baik kuantitas maupun kualitas.

Peluang usaha mandiri diperkirakan akan cukup besar. Hal ini juga diperkuat dengan ancaman resesi ditingkat ekonomi global yang akan berdampak pada peningkatan PHK di sektor industri pasar ekspor seperti textile dan alas kaki. Dimana dua industri ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Atas kondisi

tersebut, selain kompetensi yang sesuai dengan industri, dibutuhkan pula kebijakan dan program pendidikan yang responsive terhadap perubahan jaman, kebijakan ini sangat dibutuhkan mengingat proyeksi Angkatan kerja akan didominasi oleh golongan masyarakat dengan usia muda. Adapun program pelatihan yang dilakukan, seperti:

- a. Pelatihan pembuatan konten (content creator) dan penulis konten (content writer) media digital.
- b. Social Media Specialist/internet marketing.
- c. SEO Specialist,
- d. Pengembang Website,
- e. Data Scientist, dan
- f. App Developer.

6.4. KEBIJAKAN SEKTORAL

Kebijakan sektor ini merupakan rangkuman dari kebijakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang akan berdampak pada

dua kebijakan yaitu perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja atau SDM.

1. Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan data PDRB tahun 2017-2021

Meskipun kehutanan bukan lagi menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten namun terdapat peluang untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja pada sektor ini yaitu program perhutanan sosial. Pemerintah bisa menginisiasi pelaksanaan koordinasi dengan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS), Dinas Kehutanan Provinsi dan stake holder lain untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dari program ini.

Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Bandung sangat besar, berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2019 luas lahan pertanian di Kabupaten Bandung seluas 92.227,94 ha atau sebesar 52,91% dari total luas Kabupaten Bandung. Disamping lahan tersebut ada potensi tambahan lahan yang bisa digunakan berupa lahan semak belukar dengan luas lahan 14.720,69 ha.

Produksi komoditas Tanaman Pangan pada tahun 2020 sebesar 834.195 ton dan Produksi komoditas Hortikultura sebesar 457.446 ton. Tiga komoditas unggulan pangan adalah padi, umbi kayu dan jagung. Sedangkan unggulan tanaman hortikultura ada 5 yaitu bawang merah, cabe, tomat, kubis, dan kentang.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai

mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Orientasi pertumbuhan ekonomi bukan hanya mengejar kepada target pertumbuhan, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain. Paradigma pembangunan pertanian yang hanya menitikberatkan di sektor hulu, perlu diperbaharui dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh atau disebut pertanian untuk pembangunan (Agriculture for Development).

Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju zero waste (tidak ada yang disia-siakan).

Kebijakan pertanian yang bisa berdampak pada perluasan kesempatan kerja

- a. Menumbuhkan sentra produksi komoditi unggulan pertanian; kebijakan ini diharapkan tidak hanya untuk pemenuhan ketersediaan pangan daerah, tetapi juga sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Pembangunan daerah yang difokuskan pada pertumbuhan perekonomian di perdesaan secara tidak langsung akan mendorong segala macam kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Bandung.
- b. Memperluas jangkauan pemasaran komoditas pertanian unggulan; dengan cara: 1) Meningkatkan akses petani terhadap pasar; 2) Mengembangkan jejaring pasar domestik, melalui pengembangan sarana dan kelembagaan; 3) Pengembangan Informasi Pasar (PIP) melalui sistem informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, lengkap, koninyu dan up to date; 4) Promosi produk; 5) Mengembangkan jejaring pasar internasional
- c. Meningkatkan produktivitas budidaya pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan; peningkatan produktivitas pertanian akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung kelancaran usaha pertanian.
- d. Meningkatkan produksi ternak; seperti halnya pada peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan produksi peternakan juga akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan ini akan ditempuh dengan cara: 1) Intervensi on-farm, merupakan intervensi teknis budidaya peternakan, disesuaikan dengan kondisi agro-ekologis wilayah dan sistem produksi; 2) Pengembangan kapasitas kelembagaan; 3) Peningkatan genetik yang bertujuan untuk meningkatkan basis sumber daya ternak. Pilihannya termasuk seleksi bibit ternak unggulan lokal, substitusi bibit ternak eksotis atau perkawinan silang yang berkontribusi terhadap produksi ternak; 4) Pengendalian

kesehatan hewan yang bertujuan membatasi dampak penyakit pada produksi ternak; Memproses dan memasarkan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dalam infrastruktur yang diperlukan yang memungkinkan produk-produk ternak untuk menyediakan permintaan yang ada dengan aman dan juga masa depan.

2. Industri Pengolahan

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan sektor perindustrian dalam PDRB Kabupaten Bandung mengalami penurunan yang sangat drastis. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Bandung saja. Pada tingkat provinsi Jawa Barat dan nasional, laju pertumbuhan sektor industri menurun sangat tajam dan penurunan yang terjadi di Kabupaten Bandung lebih rendah jika dibandingkan dengan penurunan rata-rata pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Industri besar di Kabupaten Bandung adalah Industri textile beserta produk turunannya dan industry alas kaki. Salah satu permasalahan yang krusial dari industry ini adalah isu tenaga kerja. Salah satunya adalah daya serap lapangan kerja terhadap pencari kerja. Berdasarkan data dinas tenaga kerja Kabupaten Bandung, menunjukkan terjadi penurunan lowongan kerja pada sektor industry, terutama pada usaha formal. Hal kedua yang ditunjukkan dari data penempatan kerja Disnaker Kabupaten Bandung adalah pada setiap tahun lowongan yang tersedia tidak mampu terisi seluruhnya. Hal ini menunjukkan, ketidak sesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan lapangan usaha. Dengan kondisi tersebut kebijakan yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Bandung adalah:

- a. Meningkatkan lapangan usaha formal dengan menarik investasi pada sektor industri padat karya seperti yang sudah dibahas pada kebijakan umum dibagian sebelumnya.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pemberi kerja untuk mengetahui kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk menyiapkan kurikulum Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.

Sektor industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah industri kecil dan industri menengah. Berdasarkan data Disperindang Kabupaten Bandung, pertumbuhan IKM di Bandung terus meningkat dari tahun 2016-2020. Pertumbuhan ini tidak terpengaruh oleh Pandemic COVID-19.

Tingginya pertumbuhan industri kecil di tahun 2020 dapat mengindikasikan bentuk adaptasi masyarakat untuk bertahan secara ekonomi. Meskipun kemampuan/daya beli masyarakat menurun, tetapi industri kecil dan menengah merupakan kegiatan yang dapat memberikan alternatif pemasukan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali untuk mendorong pelaku-pelaku industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kemampuan dan cakupan pasarnya agar dapat mendorong perekonomian lokal terutama pasca-pandemi Covid-19 dan tekanan global.

Di Tahun 2020, IKM paling banyak tersebar di Kecamatan Kutawaringing dan jenis industri terbanyak adalah konveksi. Selain itu, di Kutawaringin juga terdapat industrial park yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan industri dan mendorong pertumbuhan industri-industri kecil di sekitar kawasannya. Tantangannya adalah IKM banyak yang belum memiliki izin, padahal dengan kepemilikan

ijin pelaku IKM bisa mendapatkan fasilitas dari Pemerintah untuk mengembangkan usahanya.

Sedangkan industri menengah banyak ditemukan di Kecamatan Majalaya. Aglomerasi industri menengah ini didominasi oleh industri tekstil, seperti pemintalan dan penenunan. Salah satu citra Kecamatan Majalaya adalah produk sarung yang pernah menjadi salah produk yang unggul dan bersaing di tingkat global. Permasalahannya adalah limbah industry yang mencemari lingkungan, kondisi ini akan bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Industri lain yang bisa dikembangkan adalah industry pangan, industri ini bisa menjadi alternatif penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bandung industry ini memiliki potensi pasar domestic yang menjanjikan. Berdasarkan data PDRB atas Pengeluaran. Komponen terbesar PDRB dari sisi konsumsi ini berasal dari Konsumsi Rumah Tangga. Bila diteliti lebih lanjut, struktur komponen konsumsi rumah tangga berdasarkan 7 (tujuh) kelompok COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), terlihat bahwa kelompok konsumsi makanan, minuman dan rokok merupakan komponen dengan dengan share terbesar yaitu hampir setengah dari total konsumsi rumah tangga, kemudian diikuti dengan kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya.

Peranan pemerintah Kabupaten Bandung dalam intervensi sektor industri pengolahan difokuskan pada industri kecil, terutama pada UMKM yang disinergiskan oleh koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat. Dalam skenario ini, peranan pemerintah adalah menjaga kontinuitas produksi dan

mengembangkan diferensiasi produk, membangun rintisan end-to-end system dalam pemasaran produk UMKM berbasis digital, serta mengembangkan pusat inovasi dan inkubasi bisnis menjadi kerangka prioritas ketahanan ekonomi lokal.

Berikut adalah kebijakan pada Disperindag yang akan berdampak pada peningkatan perluasan lapangan pekerjaan:

- a. Penetapan sentra industri
- b. Optimalisasi standardisasi produk IKM; kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk IKM di tingkat lokal, regional dan global.
- c. Optimalisasi pendampingan IKM dalam pemasaran produk; kebijakan ini dilaksanakan dengan membuat pameran-pameran produk
- d. Optimalisasi sarana dan prasarana IKM
- e. Optimalisasi perizinan perusahaan industry; dengan kepemilikan ijin, IKM akan bisa mendapatkan lebih banyak fasilitas dari Pemerintah

Khusus untuk pengembangan industri pangan dapat didorong melalui beberapa upaya.

- a. ketersediaan dan penyaluran bahan baku industri pangan melalui dinas Pertanian dan Disperindag, hal ini untuk mengoptimalkan keberlanjutan produksi.
- b. SDM yang kompeten diperlukan untuk menunjang industri pangan melalui diklat dan pendampingan.
- c. Penguatan kemitraan melalui lembaga litbang dan perguruan tinggi sehingga implementasi inovasi dan teknologi industri pangan dapat ditingkatkan, dengan tujuan adanya alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar.

- d. efisiensi melalui proses pengolahan dan penjaminan mutu juga pengembangan sistem logistik.
- e. promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar Kabupaten Bandung, dengan harapan jangkauan pasar semakin lebar dan peningkatan output industri dalam jangka panjang. Keenam dan terakhir adalah memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah.

Prioritas kebijakan penguatan UMKM dan koperasi terdiri atas:

- a. Kontinuitas produksi dan diferensiasi produk UMKM, yang diwujudkan dengan: 1) Pendampingan dan konsultasi pelaku UMKM; 2) Fasilitasi penguatan kontinuitas ketersediaan sarana produksi; 3) Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder meliputi: perguruan Tinggi, perbankan dan komunitas kreatif sebagai upaya pendampingan diferensiasi produk dan teknologi produksi; 3) Pengembangan standar dan protokol kesehatan dalam produksi produk; dan, 5) Fasilitasi sertifikasi produk.
- b. Pembangunan sistem end-to-end business, yang diwujudkan dengan: 1) Pengembangan digitalisasi pemasaran produk UMKM (eCommerce); 3) Penguatan kolaborasi dan Kerjasama dengan KADIN dan perbankan sebagai upaya pendampingan pemasaran; 3) Penguatan branding produk UMKM; 4) Pengembangan koperasi produksi digital;
- c. Penguatan Pemodalan UMKM, yang diwujudkan dengan: 1) Fasilitasi pengembangan Kerjasama perkreditan (business matching) dengan perbankan; 2) Penguatan lembaga BPR sebagai lembaga penyalur kredit usaha kecil; 3) Penguatan

kolaborasi dan kerjasama dengan PT. Permodalan Nasional Madani.

- d. Pengembangan pusat inovasi dan inkubasi bisnis, yang diwujudkan dengan: 1) Pendampingan dan konsultasi pelaku UMKM (inkubasi bisnis); 2) Pemetaan pengembangan business matching; 3) Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau institusi lainnya sebagai upaya transfer teknologi produksi dan diferensiasi produk, pemasaran, dan branding; 4) Penguatan database UMKM; dan 5) Penelitian dan pengembangan produk berorientasi ekspor dan substitusi impor.

3. Pengadaan Listrik dan Gas

Kabupaten Bandung memiliki kekayaan alam panas bumi yang dijadikan sebagai salah satu sumber pembangkit listrik. Di Kabupaten Bandung terdapat 5 perusahaan pembangkit listrik, yang bekerja di 3 (tiga) wilayah kawasan pengembangan panas bumi. Yaitu kawasan Pangalengan, Kamojang-Darajat, dan Cibuni.

Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam urusan Ketenagalistrikan dan gas. Kendati demikian, mengingat Kabupaten Bandung memiliki potensi yang cukup besar maka sektor ini bisa menjadi prospek penyerapan tenaga kerja. Disamping itu perkembangan Kabupaten Bandung sebagai salah satu penyangga Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung akan meningkatkan kebutuhan pasokan energi listrik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bandung bisa melakukan beberapa agenda seperti Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan memastikan penggunaan tenaga kerja lokal.

4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling rendah pada PDRB Kabupaten Bandung. Sektor ini hanya berkontribusi sebesar 0,04% pada total PDRB. Meskipun demikian, pada perkiraan jumlah tambahan kesempatan kerja pada tahun 2022-2026, kesempatan kerja pada sektor ini cukup besar. Rata-rata tambahan kesempatan kerja pada sektor ini sebanyak 736 kesempatan kerja dengan perkiraan produktivitas sebesar 2,27 juta rupiah/jiwa/tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas pada sektor ini sangat kecil. Jika produktivitasnya kecil maka tidak akan banyak orang yang mau bekerja pada sektor ini. Adapun kebijakan yang bisa dilakukan dalam sektor ini adalah:

- a. Meningkatkan cakupan layanan PDAM untuk Kawasan perkotaan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SPAM untuk pelayanan air bersih di perdesaan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan dan kelembagaan SPAM Perdesaan.
- d. Melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan limbah rumah tangga berdasarkan kluster wilayah.
- e. Optimalisasi IPAL terpadu di Kawasan industri
- f. Optimalisasi pemanfaatan limbah ternak sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik dengan skala industri.

5. Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. Baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.

Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi Gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel, jembatan dan lain sejenisnya.

Tingkat pertumbuhan sektor Kontruksi dari tahun 2017-2020 terus menurun dari 10,62 persen pada tahun 2017 turun menjadi 1,42 persen pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya anggaran pembangunan di tahun 2019 dan 2020 akibat COVID-19. Diperkirakan pada tahun 2022-2026 akan terus meningkat setiap tahunnya.

Pembangunan infrastruktur juga akan menyebabkan efek domino pada pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan penanaman modal.

Pembangunan infrastruktur pada anggaran Pemerintah Daerah dan Desa memiliki peranan yang cukup tinggi dalam mendukung perluasan kesempatan kerja pada sektor ini. Maka beberapa kebijakan yang bisa dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan anggaran modal berupa infrastruktur pada Anggaran Belanja Daerah; hal ini juga senada dengan perintah pada Undang-undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Dimana pada undang-undang ini mengamanatkan belanja modal pada APBD minimal 30 persen dari total belanja daerah.

Adapun rancana pembangunan infrastruktur yang akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja yang dilakukan di Dinas PUPR Kabupaten diantaranya adalah:

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
 - c. Optimalisasi Kawasan terbangun
 - d. Optimalisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan pola padat karya.

6. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi Penjualan barang-barang tersebut.

Berdasarkan data penduduk bekerja tahun 2017-2020, penduduk yang bekerja pada sektor ini terus meningkat setiap tahun dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan kecenderungan usaha perdagangan menjadi salah satu pilihan usaha masyarakat Kabupaten Bandung.

Permasalahan dalam sektor ini diantaranya adalah: 1) Belum efektif dan efisien jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis; 2) Belum efektif dan efisien pelaksanaan pengembangan distribusi & pemasaran produk dalam negeri 3) Belum optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan; 4) Daya Saing Pasar Rakyat Masih rendah; 5) Pasar tumpah yang beroperasi di jalan raya.

Untuk mengatasi masalah tersebut disusun kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat
- b. Melakukan koordinasi dengan desa dan kelurahan untuk menyediakan lahan untuk pasar tumpah sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas.
- c. Pembinaan dan penataan PKL di lingkungan pasar rakyat.
- d. Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan.

- e. Fasilitasi penerbitan rekomendasi surat tanda pendaftaran waralaba.
- f. Fasilitasi dan pendampingan

7. Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang terpapar oleh kemajuan teknologi digital. Penggunaan aplikasi transportasi online semakin populis dimasyarakat kabupaten Bandung. Disisi lain penggunaan angkutan konvensional mengalami kemandekan, masyarakat lebih memilih penggunaan kendaraan pribadi dan ojek online untuk mobilisasi ketimbang menggunakan angkutan kota. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri karena akan menyebabkan kemacetan di banyak titik.

Selain angkutan orang pengaruh teknologi juga berdampak terhadap angkutan barang. Massive-nya penggunaan e-commerce memungkinkan orang membeli barang tanpa harus pergi keluar rumah. Dengan kondisi ini tentunya akan mengurangi mobilisasi orang untuk membeli barang.

Transportasi barang (logistik) di Kabupaten Bandung berupa angkutan jalan darat, Kondisi tersebut mengakibatkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya kerusakan jalan. Selain itu, terlalu banyaknya angkutan barang melalui transportasi jalan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga tidak ramah lingkungan akibat kemacetan dan yang dapat meningkatkan emisi gas buang. Selain menjadi masalah namun kondisi ini juga bisa menjadi potensi untuk bidang pergudangan. Dengan

dibangunnya akses jalan Tol ke Kota Soreang, harus dimaksimalkan untuk menangkap peluang rute distribusi barang dari dalam dan luar kabupaten bandung melalui angkutan darat.

Potensi penambahan kesempatan kerja pada sektor ini diperkirakan sebanyak 633 kesempatan kerja per tahun. Angka yang cukup tinggi dan bisa dimungkinkan akan bertambah. Penambahan ini sangat dipengaruhi oleh angkutan barang. Untuk menyelaikan permasalahan dan menangkap peluang pada sektor ini maka diperlukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian transportasi online.
- b. Revitalisasi angkutan kota, untuk menciptakan angkutan umum yang aman dan nyaman bekerja sama dengan organda Kabupaten Bandung.
- c. Fasilitasi penerbitan rekomendasi tanda daftar Gudang.
- d. Menyediakan Kawasan pergudangan yang dekat dengan akses jalan Tol sebagai Hub untuk barang yang masuk dan barang keluar.

8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Sektor ini memiliki prospek yang cukup menjanjikan mengingat Kabupaten Bandung memiliki keindahan alam yang bisa dijadikan sebagai objek wisata.

Pembangunan pariwisata bukanlah tujuan akhir dari pembangunan di daerah. Pembangunan pariwisata merupakan

tujuan antara untuk menarik orang datang. Semakin banyak orang yang datang maka akan meningkatkan peluang orang untuk melakukan transaksi. Salah satu sektor yang akan terdampak paling besar dari perkembangan pariwisata adalah usaha pengadaan akomodasi dan makanan minuman. Meskipun sektor ini mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2019 dan 2020 karena Pandemic COVID-19. Setelah pandemic selesai diperkirakan sektor ini akan kembali bangkit.

Untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja pada sekiar ini ada dua arah kebijakan yang bisa dilakukan. Yaitu 1) kebijakan pengembangan Kawasan wisata sebagai daya Tarik orang untuk berkunjung; 2) kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Adapun program yang bisa dilakukan diantaranya adalah

- a. Pengembangan Kawasan pariwisata; merujuk pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2018-2025, dilakukan dengan:
 - pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi kekhasan dan kekhususan Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata siap kunjung yang memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
 - Pengembangan, standarisasi dan sertifikasi pariwisata halal;
 - penyediaan infrastruktur Aksesibilitas transportasi yang mendukung Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
 - pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar provinsi, nasional, dan internasional.

- penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berorientasi halal dan berkelanjutan;
 - penguatan jejaring regional, nasional dan internasional Industri Pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan;
 - pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten, Usaha Pariwisata dan masyarakat;
 - pengembangan pemasaran berbasis pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berorientasi pariwisata halal.
 - Pengembangan pariwisata berbasis Kawasan untuk meningkatkan kemanfaatan objek wisata pada desa-desa yang tidak memiliki objek wisata.
 - Mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) untuk meningkatkan Kerjasama antar desa dalam pengelolaan wisata.
 - Membangun tempat parkir di dekat gerbang Tol Soreang dan menyediakan angkutan yang murah dan nyaman menuju lokasi wisata. Hal ini dibutuhkan mengingat pada weekend destinasi wisata seperti daerah Ciwidey dan sekitarnya terjadi penumpukan kendaraan.
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; dilakukan dengan:
- melakukan pelatihan dan pendampingan manajemen pada rintisan usaha café.

- Melakukan pelatihan pengolahan makanan dan minuman, seperti pelatihan barista dan roaster untuk komoditas kopi.
- Inisiasi peraturan one produk one price untuk menghindari ancaman perang harga dan menarik minat orang makan di café dan resto atau sejenisnya terutama di Kawasan wisata.

9. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.

Pada tahun 2020 sektor ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar 26,31%, hal ini disebabkan oleh kebijakan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH) yang menyebabkan peningkatan permintaan pada perangkat komunikasi. Peningkatan ini juga didorong dengan banyaknya platform digital yang memungkinkan setiap orang bisa menyebarluaskan karya dalam bentuk gambar bergerak, video dan music.

Meskipun pandemic sudah COVID-19 sudah selesai, namun diperkirakan sektor ini akan memiliki prospek yang cukup baik. Diperkirakan pertumbuhan pada sektor ini lebih dari 6% pertahun. Penggunaan platform digital tidak akan bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Platform digital dalam hal ini internet, berpengaruh terhadap pola pertukaran pengetahuan. Dimasa lalu orang harus membeli buku

untuk mendapatkan suatu pengetahuan, saat ini pengetahuan tentang berbagai hal sudah banyak tersebar di internet. Dimasa lalu orang beriklan dengan menggunakan selebaran dan media cetak, saat ini orang lebih memilih beriklan di media digital karena lebih murah dan penyebarannya lebih cepat.

Untuk menangkap peluang pada sektor ini sebagai upaya peningkatan perluasan kesempatan kerja, arah kebijakan bisa diarahkan pada 2 hal, yaitu: 1) menyiapkan kompetensi SDM; dan 2) Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan dan meningkatkan akses masyarakat pada teknologi informasi.

Penyiapan kompetensi SDM bisa dilakukan dengan:

- a. Pelatihan conten writer
- b. Pelatihan conten creator
- c. Pendidikan pengembangan website dan aplikasi

Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan dan meningkatkan jangkauan teknologi informasi. Dilakukan dengan:

- a. Melakukan Kerjasama dengan provider penyedia jasa layanan komunikasi untuk membangun Menara pemancar sinyal pada daerah-daerah pelosok.
- b. Wi-Fi gratis yang disediakan di kantor-kantor desa.
- c. Membangun co-working space dengan kecepatan internet tinggi di kawasan industry dan Pendidikan.

10. Jasa Keuangan

Kategori sektor jasa Keuangan dan Asuransi mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup

kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari Lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Di Kabupaten Bandung sendiri yang bisa ditingkatkan adalah jasa perantara keuangan. Jasa Perantara Keuangan mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, Baitul Maal wat Tamwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Melihat riwayat dimasa lalu pertumbuhan pada sektor jasa keuangan dan asuransi tidak menunjukkan pertumbuhan yang terlalu bagus namun juga tidak buruk. Dari tahun 2017-2020 pertumbuhan pada sektor ini rata-rata sebesar 4,24 persen pertahun. Peranan sektor ini pada pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 1 persen. Sektor ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan terutama pada jasa perantara keuangan yang dilakukan oleh Koperasi.

Berdasarkan data Disperindag dan Dinas KUKM, pertumbuhan IKM dan UMKM di dari tahun 2017-2020 terus meningkat setiap tahunnya. Namun peluang ini belum berhasil dimaksimalkan oleh

Koperasi dalam memberikan pelayanan terhadap kelompok usaha. Pertumbuhan UMKM dan IKM bisa menjadi potensi bagi koperasi dalam memberikan jasa layanan perantara keuangan, terutama Usaha Mikro. Karena diantara mereka banyak yang belum memiliki akses terhadap permodalan dari Bank (bankable).

Tapi koperasi yang ada di Kabupaten Bandung juga memiliki tantangan sendiri. Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah: 1) Kualitas SDM Koperasi (Anggota, pengurus dan pengawas) masih rendah; 2) Jumlah Koperasi yang berkualitas masih rendah, berkualitas yang dimaksud adalah koperasi yang dinilai sehat, patuh dan aktif; 3) Kerjasama antara koperasi dan UMKM belum terlaksana dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan ini dibuat skema sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Koperasi, dengan operasional:
 - Penyelenggaraan Coaching Clinic dan Layanan Pendampingan usaha koperasi
 - Penyelenggaraan Inkubasi Bisnis bagi Koperasi
 - Digitalisasi Koperasi
 - Terbangunnya sistem Manajemen Data dan Informasi Koperasi Terintegrasi Berbasis Digital
- b. Peningkatan Kapasitas SDM, dengan operasional:
 - Uji Kompetensi bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi
 - Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk Peningkatan SDM
- c. Peningkatan Produktivitas Koperasi, dengan operasional:

- Fasilitas Koperasi melalui Perluasan Akses Pembiayaan/Lembaga Permodalan (LPDB, Perbankan, Antar Koperasi, dll)
 - Fasilitas Kemitraan usaha dan Promosi Koperasi
- d. Memfasilitasi kerja sama keuangan antara Koperasi dengan UMKM

11. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.

Berdasarkan rasio guru dan murid yang ada di Kabupaten Bandung tahun 2020, rasio guru murid SD sebesar 1:25 yang artinya satu orang guru menangani 25 orang siswa. Sedangkan pada jenjang SMP rasio guru murid sebesar 1:23 rasionya lebih besar dari tahun 2017 yang mana sebesar 1:17. Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Untuk mencapai kondisi ideal sesuai dengan PP No 74 tersebut Kabupaten Bandung masih membutuhkan guru sebanyak 5.213 orang dengan rincian 4.054 untuk guru SD dan 1.159.

Kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah:

- a. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dengan komitmen guru honor, serta pengangkatan guru P3K.
- b. Membuka peluang untuk melaksanakan pembangunan sekolah baru sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah bekerjasama dengan swasta.

12. Jasa Kesehatan

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh tenaga professional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan erawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak Melibatkan tenaga Kesehatan profesional.

Merujuk pada data dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, sampai dengan tahun 2025 diperkirakan ada kebutuhan penambahan nakes sebanyak 15.099 orang. Kebutuhan nakes paling banyak adalah perawat sebanyak 5.925 orang, kedua bidan sebanyak 3.075 orang dan dokter umum sebanyak 1.592 orang. Dari sisi ketenagakerjaan tentunya hal ini adalah potensi.

Namun kendalanya adalah pemerintah daerah belum memiliki kemampuan keuangan untuk penambahan jumlah tenaga medis secara mandiri oleh sebab itu kebijakan yang bisa dilakukan adalah dengan membuka peluang untuk melaksanakan pembangunan

kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah bekerjasama dengan swasta.

6.5. KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Arah Kebijakan

- Membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah proses bisnis yang terpadu dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.
- Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka perluasan kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan.
- Mengembangkan dan mengelola potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda.
- Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara
- Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal.

Program dan Kegiatan yang dapat direalisasikan berdasarkan nomemklatur dengan Program Pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pelayanan Antar kerja di Daerah

- a Penyediaan Sumber Daya Antar Kerja
- b Pelayanan antar Kerja
- c Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- d Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- e Perluasan Kesempatan Kerja

Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

- a Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi
- b Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- a Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
- b Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- c Job Fair/Bursa Kerja

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)

- a Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- b Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- c Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

Penerbitan Perpanjangan IMTA

Pelayanan antar Kerja di Daerah

- a Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
- b Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
- c Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan

Penerbitan Perpanjangan IMTA

Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Kabupaten Bandung

Pelayanan antar Kerja di Daerah

- a Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
- b Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan
- c Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan
- d Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja di Kabupaten Bandung
- e Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Kabupaten Bandung

Kebijakan penempatan tenaga kerja diarahkan untuk pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Keempat kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yaitu penganggur dan setengah penganggur. Beberapa kebijakan penempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas informasi pasar kerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
 - 2) Bimbingan teknis penyelenggaraan Bursa Kerja khusus dalam rangka meningkatkan pelayanan antar kerja pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi,

dan lembaga pelatihan kerja.

- 3) Optimalisasi penempatan tenaga kerja baik melalui mekanisme antar kerja lokal, antar kerja antar daerah (AKL/AKAD) dan peningkatan kuantitas dan kualitas pengantar kerja serta petugas antar kerja.
 - 4) Pembinaan dan pemantauan kepada perusahaan dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas serta optimalisasi kinerja Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan
 - 5) Pemberdayaan petugas Pengantar Kerja dan petugas Antar Kerja dalam rangka peningkatan pelayanan antar kerja
 - 6) Optimalisasi dalam memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan pengguna kerja melalui Job Fair.
 - 7) Peningkatan pengendalian dan pemantauan penggunaan tenaga kerja asing
 - 8) Perluasan kesempatan kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri Terdidik, pendampingan wirausaha baru, padat karya infrastruktur, penciptaan Wirausaha Baru,
 - 9) Pemberdayaan angkatan kerja khusus melalui pembentukan wirausaha baru .
 - 10) Perluasan kesempatan kerja dengan model Inkubasi Bisnis dalam rangka memperluas jejaring dengan instansi atau lembaga terkait.
2. Peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja luar negeri melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), meliputi:
- 1) Pembinaan dan peningkatan kualitas lembaga penempatan tenaga kerja melalui monitoring dan pengawasan secara profesional sesuai peraturan yang berlaku.

- 2) Meningkatkan keterampilan Pekerja Migran Indonesia (Up-Skilling) sehingga mempunyai kompetensi sesuai dengan kualifikasi jabatan.
- 3) Membentuk tim Satgas dalam rangka mencegah dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan penempatan.
- 4) Mengembangkan informasi pasar kerja luar negeri
- 5) Meningkatkan peluang kerja di luar negeri melalui identifikasi
- 6) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Pra dan Purna Penempatan.

6.6. KEBIJAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Arah Kebijakan

Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Program dan Kegiatan yang dapat direalisasikan berdasarkan nomemklatur dengan Program Pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi di Kabupaten Bandung

- a Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- b Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
- c Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten Bandung

- a Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan Daerah
- b Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan Daerah
- c Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- d Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah
- e Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Teknis

Perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja tetapi juga menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk penyelesaian yang bersifat antisipatif telah diundangkan berbagai peraturan yang mengatur adanya perangkat hubungan industrial yaitu minimal adanya Peraturan Perusahaan (PP) atau lebih baik lagi jika ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menjadi acuan bersama bagi pekerja dan pemberi kerja/pengusaha. Selain itu sebagaimana aturan yang berlaku secara internasional dapat dibentuk Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) yang menjamin kebebasan berpendapat bagi pekerja. Perangkat hubungan industrial yang terutama adalah adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit wajib untuk perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 50 orang

karena diharapkan menjadi jembatan utama dalam pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Beberapa kebijakan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja antara lain sebagai berikut:

1. Membangun komitmen dengan persepsi interpretasi, sikap dan tanggungjawab bersama untuk menjadikan hubungan industrial sebagai hal yang strategis dan signifikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kemajuan usaha, perbaikan ekonomi yang secara tidak langsung dapat memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran serta mengatasi kemiskinan.
2. Mendorong perusahaan untuk melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hubungan kerja yang sadar, konsisten dan konsekuen.
3. Optimalisasi peran dan fungsi sarana hubungan industrial, seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerja Sama Tripartit, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta meningkatkan jumlah sarana hubungan industrial di perusahaan.
4. Melaksanakan sosial dialog yang efektif di perusahaan, tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi sebagai strategi penyelesaian kasus hubungan industrial dan menetapkan langkah meningkatkan ketahanan dan kemajuan perusahaan;
5. Meningkatkan kapasitas Mediator Hubungan Industrial melalui pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan meningkatkan kapasitas Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB)

6. Mempercepat proses pengesahan Peraturan Perusahaan (semula 7 hari kerja menjadi 6 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap) dan mempercepat proses pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (semula 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap)
7. Optimalisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, diantaranya melakukan deteksi dini perusahaan rawan perselisihan hubungan industrial
8. E_PHI Sistem yang meliputi:
 - a. Pendataan pencatatan SP / SB
 - b. Pelayanan PP dan PKB melalui sistem IT
 - c. Pelayanan Sistem Pengaduan Perselisihan HI
 - d. Portal Dewan Pengupahan

Upaya perlindungan tenaga kerja termasuk jaminan sosial tenaga kerja diwujudkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bandung. Selain itu, pembentukan Dewan Pengupahan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga penting untuk menyusun kebijakan dalam menentukan besarnya Upah Minimum di daerah tersebut. Penerapan Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU) oleh perusahaan merupakan salah satu program untuk menjamin kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bandung

BAB VII PENUTUP

Keluaran dari penyusunan kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung ini adalah Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2024-2030 yang merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 5 (empat) tahun ke depan. RTK Kabupaten Bandung ini disusun berbasis pendayagunaan tenaga kerja melalui pengendalian tambahan angkatan kerja baru, penciptaan kesempatan kerja sektoral, serta perencanaan pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jamsostek. Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Bandung ini merupakan dasar penyusunan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dokumen ini dirancang untuk mengakomodasi kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Rencana Tenaga Kerja Kabupaten ini dapat direview secara berkala untuk diselaraskan dengan berbagai kebijakan dan program yang baru. Tujuannya agar RTK Kabupaten ini tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung.

Keberhasilan melaksanakan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten ini akan sangat tergantung pada komitmen, integritas dan dedikasi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dapat terwujud.

